



UNIVERSITAS INDONESIA

DIPLOMASI DIGITAL MELALUI KEBIJAKAN *21ST CENTURY STATECRAFT* SEBAGAI MANIFESTASI *SOFT POWER* AMERIKA SERIKAT: STUDI KOMPARATIF KASUS IRAN DAN MESIR (2009-2011)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional

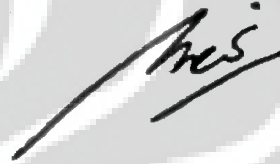
**NICO DERALIMA NOVITO
0806352353**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
APRIL 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Nico Deralima Novito
NPM : 0806352353
Tanda Tangan :



Tanggal : 27 April 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Nico Deralima Novito
NPM : 0806352353
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Diplomasi Digital melalui Kebijakan *21st Century Statecraft* sebagai Manifestasi *Soft Power* Amerika Serikat: Studi Komparatif Kasus Iran dan Mesir (2009-2011)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suzie Sudarman, M.A.

(*Suzie Sudarman*)
.....

Penguji : Drs. Fredy B.L. Tobing, M.Si., Ph.D.

(*Fredy B.L. Tobing*)
.....

Ketua Sidang : Drs. Makmur Keliat, Ph.D.

(*Makmur Keliat*)
.....

Sekretaris Sidang: Aninda Tirtawinata, M.Lit.

(*Aninda Tirtawinata*)
.....

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 April 2012

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini terinspirasi dari kelas Kekuatan Jaringan Informasi Global yang penulis ikuti pada semester keenam. Di dalam kelas ini, penulis mulai belajar banyak mengenai implikasi yang dihasilkan oleh revolusi teknologi dan informasi terhadap dinamika hubungan internasional di era sekarang. Dari sinilah kemudian penulis mencoba mencari-cari topik yang berhubungan dengan apa yang diajarkan di kelas ini. Karena penulis juga tertarik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka penulis memutuskan untuk menelisik mengenai diplomasi digital yang dijalankan negara ini di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.

Kebijakan *21st Century Statecraft* merupakan hal yang relatif baru di ranah diplomasi AS. Sebagai hasil inisiatif dari Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, kebijakan ini bertujuan untuk menggunakan perangkat-perangkat teknologi baru untuk melengkapi usaha-usaha diplomasi yang selama ini digunakan. Pada saat yang bersamaan, rentetan gerakan reaksioner terhadap pemerintahan otoritarian mulai muncul di kawasan Timur Tengah (yang sering disebut sebagai *Arab Spring*), termasuk protes pemilihan umum di Iran oleh kelompok oposisi serta revolusi di Mesir. Salah satu hal yang sering digarisbawahi dalam fenomena ini adalah peran signifikan dari teknologi informasi—terutama *social media*—dalam mendukung gerakan-gerakan ini. Hal ini menjadi titik pertemuan antara kebijakan diplomasi digital AS dan gerakan reaksioner di Timur Tengah, sehingga penulis mencoba untuk menganalisis peran serta cara kerja dari diplomasi digital AS terhadap dua studi kasus, yaitu Protes Iran 2009-2010 dan Revolusi Mesir 2011.

Penulis melihat bahwa isu yang kontemporer ini semakin perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional, mengingat makin signifikannya peran yang dimainkan oleh penggunaan teknologi dalam hubungan antar-negara maupun hubungan transnasional antar-masyarakat yang terjadi sekarang ini.

Depok, April 2012

Nico Deralima Novito

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini telah mendapatkan kontribusi yang tidak terhingga dari berbagai orang yang telah menghiasi kehidupan penulis, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Indonesia.

Pertama, terima kasih untuk **Mbak Suzie Sudarman** yang telah memberikan kepercayaannya untuk menjadi pembimbing penulis selama penulisan skripsi ini, serta ajaran dan dorongan yang sangat berharga bagi penulis.

Kedua, untuk para dosen-dosen Hubungan Internasional UI yang selalu inspiratif bagi penulis: **Mbak Dwi “Riris” Ardhanariswari** yang selalu memberikan semangat sejak penulis memulai langkah pertama dalam penulisan skripsi di dalam mata kuliah Seminar Pilihan Masalah; **Pak Makmur Keliat** sebagai ketua sidang, serta **Mas Fredy Tobing** sebagai penguji sidang yang memberikan masukan-masukan yang berharga bagi skripsi penulis; **Mas Hariyadi Wirawan** yang senantiasa mendukung penulis selama masa kuliah dan memberikan masukan-masukan yang berguna; **Mas Andi Widjajanto** dan **Mbak Aninda Rahmasari** yang berkontribusi pada proses penulisan skripsi ini mulai dari sebelum sidang *outline* hingga ketika sidang skripsi; dan **Mas Hizkia Yosie** yang menginspirasi penulis dalam mata kuliah Kekuatan Jaringan Informasi Global untuk menulis skripsi yang berhubungan dengan isu-isu teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap hubungan internasional.

Ketiga, bagi seluruh teman yang penulis temui selama masa kuliah di Hubungan Internasional UI sebagai bagian dari angkatan 2008. **Raisa Muthmaina**, sahabat terbaik yang selalu menyemangati penulis dalam saat senang maupun sedih. Terima kasih atas segala obrolan dan *chat* mengenai berbagai hal—mulai dari acara televisi terbaru hingga *fashion*—yang senantiasa membuat penulis segar dalam proses penulisan skripsi ini. *Thank you for being a loyal friend.* **Natalia Rialucky Tampubolon**, teman seperjuangan yang selalu mendorong penulis setiap saat. Terima kasih untuk seluruh inspirasi yang diberikan bagi penulis untuk selalu maju. *Thank you for always pushing me to give my best.* **Sri Rezeki**, sahabat yang selalu berbagi curahan hati dengan penulis, baik dalam hal akademis maupun diskusi filosofis mengenai hidup. *Thank you for always letting me share anything with you.* **Agung Pamungkas** dan **Annisa “Ipeh” Nirbito** yang rela untuk selalu diganggu oleh penulis melalui *BlackBerry Messenger* setiap saat dan selalu berbagi tawa dengan penulis. *Thank you for putting up with me and always be there on the other end of the chat.* **Shirley Simarmata** yang selalu mendorong penulis untuk tetap fokus pada penulisan skripsi di sela-sela obrolan *random*. *Thank you for always making me laugh.* Teman-teman dalam *cluster* Mastrans (Masyarakat Transnasional), **Nasrullah Noor Edikresnha**, **Riza Aryani**, **Romarga Waworuntu**, dan **Mita Yesyca**, terima kasih atas berbagai inspirasinya selama ini. **Yonathan Susilo**, **Deny Siahaan**, dan **Tulus Bangun Hutagalung**, beberapa teman pertama penulis di HI 2008, yang terus-menerus memberikan dukungan bagi penulis. Teman-teman “mantan” program percepatan, **Emirza Adi Syailendra**, **Avina Nadhila Widarsa**, **Rainintha Siahaan**, **Lesly Gijbert Christian Hosang**, dan **Pra Ulpa Ritonga**, terima kasih atas dukungannya selama ini. *Finally, I graduate like all of you.* Terima kasih pula kepada teman-teman HI 2008 lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Keempat, bagi teman-teman yang senantiasa menyemangati penulis lewat pertemanan yang selama ini dijalin. **Andhyta Firselly Utami**—*a friend on Twitter and real-life*—terima kasih untuk berbagai diskusi dengan penulis, mulai dari J.K. Rowling hingga *Pascal's wager*. **Rizki Yuniarini**, teman sekaligus rekan kerja yang telah menyumbangkan berbagai *insight* yang berguna bagi kehidupan penulis. **Hanifah Ahmad** dan **Dian Aditya Ning Lestari** yang selalu menginspirasi penulis dengan *perseverance* dan *excellence* yang senantiasa kalian tunjukan. **Willy Limiady** untuk dukungannya dan kontribusinya bagi pengembangan diri penulis di setiap saat.

Kelima, untuk teman-teman yang terlibat dalam karier *Model United Nations* (MUN) penulis selama masa kuliah. **Teman-teman delegasi UI untuk Harvard National MUN 2011 dan 2012** atas semangat yang diberikannya selama ini. **Rekan-rekan UI MUN Club**, terima kasih atas berbagai kontribusinya selama ini. **Teman-teman dalam panitia Indonesia MUN 2010 dan 2011**, terutama **Yanti Silalahi** dan **Wiweka Sukma Wardhani**, yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis. Terima kasih juga didedikasikan untuk rekan-rekan kerja penulis selama ini. **Rekan-rekan dalam 7th Floor MUN Consulting**, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini di berbagai proyek yang senantiasa menjadi semangat bagi penulis. **Athina Ibrahim**, editor penulis di media *online Whiteboard Journal*, yang selama ini mengizinkan penulis untuk rehat dari tugas sebagai koresponden selama penulisan skripsi.

Terakhir, untuk teman-teman yang penulis temui melalui *Twitter* (yang tentunya sejalan dengan topik skripsi penulis). **Amanda Aayusya (@mavieenlair)**, *a fellow Gleek and bookworm*, yang selalu menghibur penulis dengan *tweet-tweet*-nya. **Khairani Barokka (@mailbykite)**, yang senantiasa membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan *link-link* yang berguna serta menghubungkan penulis dengan orang-orang yang mengetahui secara mendalam akan isu yang penulis bahas. *Thank you for everything.*

Terakhir, penulis mendedikasikan ucapan terima kasih untuk keluarga penulis untuk segala dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. **Oma Grace Hartono, Papa Irawan Darma Utama, Mama Dewati Chandra Ningsih, Aunty Nenny, Aunty Tata, Om Uki, dan Alya Nur Firdausi.** Terima kasih untuk suntikan semangat dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Adik penulis, **Alessandro Dwi Juniarto**, terima kasih untuk selalu menghibur penulis, terutama ketika bermain *Angry Games*. *Thank you for always being there for me.*

Akhir kata, penulis ingin mendedikasikan karya ini untuk **Aunty Inung (Alm.)**, yang selalu menjadi inspirasi yang sangat besar bagi penulis sampai akhir hayatnya. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis. *This is dedicated to you.*

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

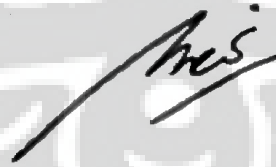
Nama : Nico Deralima Novito
NPM : 0806352353
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Diplomasi Digital melalui Kebijakan *21st Century Statecraft* sebagai Manifestasi
Soft Power Amerika Serikat: Studi Komparatif Kasus Iran dan Mesir
(2009-2011)**

dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 27 April 2012
Yang menyatakan,



Nico Deralima Novito

**Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Program Sarjana Reguler**

Nico Deralima Novito (0806352353)

Diplomasi Digital melalui Kebijakan *21st Century Statecraft* sebagai Manifestasi *Soft Power* Amerika Serikat: Studi Komparatif Kasus Iran dan Mesir (2009-2011)

(xii+111) halaman + daftar pustaka (21 buku + 5 artikel jurnal + 10 dokumen + 8 artikel media cetak + 39 artikel internet)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai strategi diplomasi digital Amerika Serikat yang dijalankan melalui kebijakan *21st Century Statecraft*, yang dicanangkan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Tujuan dari strategi diplomasi ini adalah untuk mengadaptasikan kemajuan teknologi yang telah mempengaruhi dinamika hubungan internasional ke dalam implementasi kebijakan luar negeri AS dalam rangka penyelenggaraan *soft power* negara ini. Dua studi kasus yang dipakai di dalam penelitian ini adalah implementasi *21st Century Statecraft* di dalam protes pemilihan presiden Iran (2009-2010) dan revolusi Mesir (2011), di mana AS mendukung penciptaan kebebasan Internet dan membantu penyediaan kapabilitas teknologi informasi bagi gerakan-gerakan masyarakat di kedua negara ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi diplomasi digital tidak hanya dapat digantungkan pada konsep *network society* (Manuel Castells) yang menyebutkan bahwa dengan terbentuknya jaringan antara negara dan masyarakat, maka pesan/naratif akan lebih mudah untuk disebarkan dan diterima oleh publik internasional. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus, yaitu kontrol pemerintahan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan *frame of thinking* masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa diplomasi digital berkontribusi pada penyelenggaraan *soft power* AS dengan berperan untuk membentuk pesan dan naratif mengenai AS bagi publik internasional; penyediaan dukungan jaringan dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan penyediaan dukungan bagi kebebasan Internet.

Kata kunci: diplomasi digital, soft power, Amerika Serikat, Protes Iran, Revolusi Mesir, teknologi informasi, social media, network society.

ABSTRACT

Name : Nico Deralima Novito
Study Program : International Relations
Title : Digital Diplomacy through 21st Century Statecraft Policy as the United States' Soft Power Manifestation: Comparative Case Study of Iran and Egypt (2009-2011)

This research explores United States' digital diplomacy strategy through 21st Century Statecraft policy, which was launched by Secretary of State Hillary Clinton under Obama Administration. This research is analyzing the implication of this strategy toward the manifestation of US soft power through comparative study cases of Iranian presidential election (2009-2010) and Egyptian revolution (2011), where the US supported the Internet freedom and helped to increase the information technology capabilities of civil society movements in both countries. The research shows that US digital diplomacy's success (or lack thereof) cannot depend on the notion that today's world has turned into a "network society" (Manuel Castells), which, arguably, makes messages/narratives easier to spread and be accepted by foreign public. Instead, there are other various factors that influence its implementation. As shown by the cases of Iran and Egypt, the main factors are the government's control toward IT infrastructure and respective public's frame of thinking. In the later analysis, this research also finds that digital diplomacy contributes to the implementation of US soft power through its roles: creation of narrative/message on US for international public; provision of network and information & communication technologies support; and the ensuring of Internet freedom for civil society.

Keywords: digital diplomacy, soft power, United States, Iranian Protest, Egypt Revolution, information technology, social media, network society.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DIAGRAM, DAN LAMPIRAN	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Permasalahan	1
I.2. Rumusan Permasalahan	6
I.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
I.4. Tinjauan Pustaka	9
I.4.1. Perkembangan Diplomasi Non-Tradisional Amerika Serikat	9
I.4.2. Diplomasi dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Diplomasi Digital	12
I.4.3. Kebijakan Diplomasi Digital Amerika Serikat	15
I.5. Kerangka Pemikiran	17
I.5.1. <i>Soft Power</i>	17
I.5.2. Diplomasi	19
I.5.3. Diplomasi Digital	20
I.5.4. Diplomasi Publik	21
I.5.5. <i>Network Society</i>	22
I.5.6. Asumsi Penelitian	23
I.6. Metodologi Penelitian	24
I.7. Pembabakan Skripsi	27

BAB II. KEBIJAKAN 21ST CENTURY STATECRAFT DEPARTEMEN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS PROTES IRAN (2009-2010) DAN REVOLUSI MESIR (2011)

II.1. 21 st Century Statecraft sebagai Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat	28
II.1.1. Perubahan Lanskap Politik Internasional sebagai Pemicu Kemunculan 21 st Century Statecraft	29
II.1.2. Inisiatif 21 st Century Statecraft sebagai Kebijakan Diplomasi Digital Amerika Serikat	32
II.2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mendukung Demokratisasi di Timur Tengah	37
II.3. 21 st Century Statecraft dan Protes Pemilihan Umum di Iran (2009 – 2010)	39
II.3.1. Protes Pemilihan Umum di Iran (2009-2010) dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	39
II.3.2. Kebijakan Mendukung Kebebasan Internet (<i>Internet Freedom</i>) di Iran oleh Amerika Serikat di bawah 21 st Century Statecraft	46
II.3.3. Kebijakan <i>Civil Society 2.0</i> di bawah 21 st Century Statecraft di Iran oleh Amerika Serikat	50
II.4. 21 st Century Statecraft dan Revolusi Mesir (2011)	54
II.4.1. Revolusi Mesir (2011) dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	54
II.4.2. Kebijakan Mendukung Kebebasan Internet (<i>Internet Freedom</i>) di bawah 21 st Century Statecraft di Mesir oleh Amerika Serikat	57
II.4.3. Kebijakan <i>Civil Society 2.0</i> di bawah 21 st Century Statecraft di Mesir oleh Amerika Serikat	59

BAB III. ANALISIS PERAN DAN IMPLIKASI 21ST CENTURY STATECRAFT DALAM KASUS PROTES IRAN DAN REVOLUSI MESIR TERHADAP PENYELENGGARAAN *SOFT POWER* AMERIKA SERIKAT

III.1. Peran 21 st Century Statecraft oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Penyelenggaraan <i>Soft Power</i> Amerika Serikat	62
III.1.1. Pembentukan Pesan dan Naratif mengenai Amerika Serikat bagi Publik Internasional	63

III.1.2. Penyediaan Dukungan Jaringan dan Kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	65
III.1.3. Penyediaan Dukungan Kebebasan Internet	67
III.2. Perbandingan Implementasi Kebijakan <i>21st Century Statecraft</i> dalam Kasus Iran dan Mesir	69
III.2.1. Implikasi Kebijakan <i>21st Century Statecraft</i> terhadap Kasus Protes Iran	70
III.2.2. Implikasi Kebijakan <i>21st Century Statecraft</i> terhadap Kasus Revolusi Mesir	75
III.2.3. Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Protes Iran dan Revolusi Mesir dan Kaitannya dengan Kebijakan <i>21st Century Statecraft</i> Amerika Serikat	79
III.3. Signifikansi <i>21st Century Statecraft</i> terhadap Penyelenggaraan <i>Soft Power</i> Amerika Serikat	82
BAB IV. PENUTUP	
IV.1. Kesimpulan	86
IV.2. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DIAGRAM, DAN LAMPIRAN

Gambar II.1.

Pemetaan <i>U-shahid</i> terhadap demonstrasi yang terjadi saat Revolusi Mesir 2011	61
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

Tabel III.1.

Perbandingan Faktor-faktor yang mempengaruhi Protes Iran dan Revolusi Mesir	80
-----------------------------------------------------------------------------------	----

Diagram III.1.

Hasil Temuan Penelitian	85
-------------------------------	----

Lampiran 1

Teks Pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary R. Clinton mengenai <i>21st Century Statecraft</i> dan Kebebasan Internet, di Washington, DC, 21 Januari 2010	99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Lampiran 2

Teks Pidato <i>Nowruz</i> Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Tahun 2010 untuk Masyarakat Iran.....	111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi telah mendorong perubahan yang sangat signifikan di berbagai bidang dan meningkatkan interkoneksi dunia. Salah satu faktor yang mendukung terjadinya hal ini, menurut Thomas Hylland Eriksen, adalah kehadiran Internet yang menghasilkan jaringan komunikasi serta informasi yang semakin cepat dan juga semakin padat.¹ Hal ini mendorong terciptanya masyarakat global yang terjejaring antara satu sama lain secara transnasional.²

Kenyataan ini berpengaruh pada dinamika politik dunia, khususnya berkaitan dengan bentuk kebijakan luar negeri yang diimplementasikan oleh berbagai negara. Joseph S. Nye, Jr. melihat kondisi di mana revolusi informasi dan globalisasi terjadi menciptakan komunitas dan jaringan virtual yang transnasional di mana aktor-aktor non-negara—baik pasar, masyarakat sipil, sampai individu—memainkan peranan yang lebih besar di konstelasi perpolitikan dunia. Aktor-aktor baru inipun memiliki apa yang dinamakan sebagai *soft power*, yaitu kekuatan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan dengan cara menarik atau mengkooptasi pihak yang lain serta memiliki kemampuan untuk membentuk preferensi. Nye melihat bahwa pada saat ini, bentuk *soft power* yang paling signifikan adalah informasi. Bila informasi dipertukarkan antara satu sama lain maka akan tumbuh pendekatan-pendekatan yang meningkatkan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam menghadapi tantangan baru—*power* pun lahir dari ketertarikan antarpihak ini.³

Menanggapi hal ini, tentunya implementasi dari kebijakan luar negeri yang diterapkan suatu negara harus beradaptasi kepada lanskap politik dunia yang baru. Alih-alih interaksi yang sebatas antarpemerintahan, sekarang terdapat interaksi transnasional langsung antara masyarakat dan kelompok dengan pemerintahan negara lain dan

¹ Thomas Hylland Eriksen, *Globalization: The Key Concepts* (Oxford & New York: Berg, 2007), hlm. 3

² *Ibid.*, hlm. 72.

³ Joseph S. Nye, Jr., "The Benefits of Soft Power" diakses dari <http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html/> pada tanggal 12 September 2011, pukul 14.38 WIB.

organisasi internasional yang seringkali menciptakan hasil dan koalisi baru yang menarik.⁴

Sebagai tanggapan atas perkembangan teknologi informasi ini, Amerika Serikat (AS) mulai melakukan pembenahan dalam melaksanakan diplomasinya. Pertama, sejak tahun 2003, Departemen Luar Negeri AS mendirikan *Office of eDiplomacy*, yang memiliki visi untuk memperkuat diplomasi AS melalui platform untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyebaran pengetahuan antar-entitas yang berhubungan dengan AS dengan menggunakan teknologi baru.⁵ Berbagai inisiatif lain pun bermunculan seiring meningkatnya minat AS dalam beradaptasi dengan lanskap baru ini, seperti blog *Dipnote* dan *ExchangesConnect*, sebuah situs jejaring sosial untuk pertukaran budaya yang difokuskan pada partisipan pertukaran pelajar.⁶

Melihat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat maka Departemen Luar Negeri AS di bawah Menteri Luar negeri yang baru, Hillary Rodham Clinton, mengeluarkan inisiatif *21st Century Statecraft* pada tahun 2009. Hillary Clinton mengemukakan bahwa inisiatif ini menjadi alat diplomasi yang baru untuk menghadapi berbagai tantangan yang tumbuh di abad ke-21 ini. Departemen Luar Negeri AS melihat bahwa terdapat banyak potensi yang dapat digali dari perkembangan teknologi informasi—seperti *Twitter* dan *Facebook*—yang dapat dimaksimalkan utilitasnya dalam implementasi bentuk diplomasi yang baru dan inovatif. Hal ini juga dianggap dapat digunakan untuk memberdayakan setiap individual yang tersebar di berbagai penjuru dunia dalam pembangunan di negara mereka masing-masing.⁷

Dalam artikelnya “Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development” dalam *Foreign Affairs* edisi November-Desember 2010, Hillary Clinton mengemukakan bahwa dalam memecahkan masalah global, tidak hanya

⁴ Nye, Jr., *Power in a Global Information Age: From Realism to Globalization* (London: Routledge, 2004), hlm. 3.

⁵ “Office of eDiplomacy” diakses dari <http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/> pada tanggal 12 September 2011, pukul 21.50 WIB.

⁶ Micah L. Sifry, “Hillary Clinton Launches ‘21st Century Statecraft’ Initiative by State Department” diakses dari <http://techpresident.com/blog-entry/hillary-clinton-launches-21st-century-statecraft-initiative-state-department/> pada 12 September 2011, pukul 23.47 WIB.

⁷ “21st Century Statecraft” | U.S. Department of State” diakses dari <http://www.state.gov/statecraft/index.htm/> pada tanggal , pukul 23.22 WIB.

masalah pertahanan saja yang dikedepankan, melainkan juga diplomasi dan pembangunan, melalui mana AS menjalankan *soft power*-nya. Hillary Clinton juga menekankan strategi diplomasi publik: interaksi dilaksanakan tidak sebatas antarpemerintahan, tetapi juga meliputi pemerintahan dan publik di negara lain. Agar diplomasi publik ini dapat berjalan dengan baik, tentunya dibutuhkan “alat” dan strategi yang ampuh.⁸

Kemudian dalam pidatonya pada bulan Mei 2009, Hillary Clinton untuk pertama kalinya memperkenalkan *21st Century Statecraft* sebagai sarana bagi AS untuk menggunakan alat-alat baru dan mencari rekan baru dalam memperluas diplomasi yang dilakukan karena kebijakan luar negeri tidak hanya sebatas *government-to-government* namun juga *government-to-government* serta *people-to-people*—AS berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat sipil, perempuan, pemuda, aktivis politik, dan aktor-aktor lain seiring pencapaian agendanya.⁹ Di situs Web Departemen Luar Negeri AS, dijelaskan bahwa *21st Century Statecraft* memiliki tujuan berikut: “*complementing traditional foreign policy tools with newly innovated and adapted instruments of statecraft that fully leverage the networks, technologies, and demographics of our interconnected world.*”¹⁰ Hal ini kemudian ditekankan kembali di dalam laporan *Quadrennial Diplomacy and Development Review* (QDDR) pertama yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa melalui teknologi baru yang menghubungkan berbagai tempat di dunia—Internet, SMS, *social media*, serta berbagai aplikasi *mobile*—maka AS dapat membangun platform baru untuk komunikasi, kolaborasi, dan perdagangan di abad ke-21, yang akan menghubungkan AS dengan aktor-aktor non-negara, yaitu masyarakat

⁸ Hillary Rodham Clinton, “Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development” dalam *Foreign Affairs*, 89, No. 6, (November/December 2010), hlm. 13-24.

⁹ “Remarks at the Global Press Conference | Hillary Rodham Clinton” diakses dari <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/05/123645.htm/> pada tanggal 13 September 2011, pukul 14.50 WIB.

¹⁰ “21st Century Statecraft” diakses dari <http://www.state.gov/statecraft/overview/index.htm/> pada tanggal 13 September 2011, pukul 15.01 WIB.

sipil (aktivis, organisasi, jurnalis, dan sebagainya) yang dapat menjadi rekan AS untuk mencapai sasaran kebijakan luar negerinya.¹¹

Signifikansi dari inisiatif *21st Century Statecraft* bagi Departemen Luar Negeri AS terlihat sangat besar karena tampak di situs Web-nya telah dijabarkan dengan isu-isu kebijakan utama yang lain, semacam terorisme dan ekonomi. Terdapat tiga kebijakan utama yang berada di bawah *21st Century Statecraft*, yaitu sebagai berikut: (i) menjamin kebebasan berekspresi dalam penggunaan Internet, yang meliputi hak untuk berpendapat, kebebasan pers, dan berkumpul di Internet; pasar terbuka untuk barang dan jasa digital untuk mendukung inovasi, investasi, dan kesempatan ekonomi; dan kebebasan untuk berjejaring antara satu sama lain; (ii) mendukung masyarakat sipil di seluruh dunia melalui inisiatif *Civil Society 2.0* yang akan membangun kapasitas teknis organisasi masyarakat sipil untuk mencapai tujuan mereka dengan menggunakan teknologi jaringan; dan (iii) mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam reformasi organisasi Departemen Luar Negeri AS, misalnya penggunaan *social media* sebagai platform diplomasi publik AS untuk mendapatkan khalayak yang baru.¹²

Sebagai pengejawantahan kebijakan-kebijakan di atas, maka dijalankanlah berbagai program yang berada di bawah pengawasan Alec J. Ross, yang menjabat sebagai Penasehat Senior untuk Inovasi bagi Hillary Clinton.¹³ Program-program ini memiliki beranekaragam bentuk—mulai dari koordinasi bantuan untuk gempa Haiti melalui SMS hingga penciptaan aplikasi telepon selular bagi masyarakat sipil di Afrika—dan terutama difokuskan membangun koneksi untuk mengembangkan bakat, inovasi, dan kewirausahaan dari beragam komunitas yang ada di dunia.¹⁴

¹¹ United States Department of State, *Leading Through Civilian Power: The First Quadrennial Diplomacy and Development Review* (Washington, D.C.: U.S. Department of State, 2010), hlm. 21-22.

¹² “21st Century Statecraft,” *Loc. Cit.*

¹³ Sebelum mulai memegang jabatan ini pada bulan April 2009, Ross telah menggeluti bidang digital dan nonprofit. Pada tahun 2000, dirinya mendirikan *One Economy*, sebuah lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk mendorong penggunaan konten-konten bahasa Arab di Internet yang mendapat dukungan dari berbagai nama besar di bidang teknologi, seperti Bill Gates. Kemudian, ketika Barack Obama terpilih, Ross diangkat untuk menjalankan kebijakan teknologi, media, dan telekomunikasi pemerintahan ini sebelum akhirnya direkrut oleh Departemen Luar Negeri AS. Lihat Jesse Lichtenstein, “Digital Diplomacy” dalam *New York Times Magazine* (July 16, 2010), dapat diakses dari <http://www.nytimes.com/2010/07/18/magazine/18web2-0-t.h>.

¹⁴ *Ibid.*

Inisiatif yang dijalankan oleh AS ini seringkali dijuluki sebagai diplomasi digital¹⁵ dan telah mendapat banyak tanggapan. Salah satu kritik terbesar akan inisiatif AS ini adalah Evgeny Morozov. Dalam artikel opininya di *Wall Street Journal*, Morozov melihat bahwa kebijakan-kebijakan dalam *21st Century Statecraft* merupakan suatu bentuk “*techno-utopianism*” yang dengan naifnya percaya bahwa dengan mendukung kebebasan Internet dan memperkuat masyarakat sipil dengan sarana teknologi informasi di berbagai negara akan mendorong realisasi demokratisasi di negara-negara tersebut (terutama yang selama ini berada di bawah pemerintahan otoritarian). Padahal alat-alat ini tidak hanya dapat digunakan oleh para aktivis yang memiliki jalan pikiran yang sama dengan pemerintahan AS—membangun demokrasi, dan sebagainya—namun juga oleh pemerintahan otoritarian, yang menggunakan Internet untuk mengawasi rakyatnya. Misalnya saja, pemerintahan Iran menggunakan Facebook untuk melacak jejak para pemrotes (*dissident*) di seluruh penjuru dunia.¹⁶ Menanggapi pandangan ini, Ross berpendapat bahwa Morozov melupakan bahwa teknologi ini pada akhirnya akan menyebar secara luas dan digunakan oleh berbagai aktor, sehingga justru akan sangat berbahaya bila Departemen Luar Negeri AS tidak memiliki peran di dalam kawasan ini.¹⁷

Melihat perdebatan di atas, penulis tertarik untuk menelisik perbedaan pandangan yang ada mengenai inisiatif *21st Century Statecraft* yang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri AS dengan peran dari inisiatif ini sebagai pengejawantahan dari *soft power* yang dimiliki oleh AS.

¹⁵ Departemen Luar Negeri Inggris mendefinisikan “diplomasi digital” sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan luar negeri melalui penggunaan Internet yang dapat memperluas cakupan komunikasi suatu negara baik dengan pemerintahan maupun masyarakat sipil dan individu berpengaruh di negara lain. (“What is digital diplomacy” diakses dari <http://digitaldiplomacy.fco.gov.uk/en/about/digital-diplomacy/> pada tanggal 14 September 2011, pukul 8.09 WIB.) Lihat juga Jesse Lichtenstein, “Digital Diplomacy” dalam *New York Times Magazine* (July 16, 2010); Sam duPont, “Digital Diplomacy” dalam *Foreign Policy* (August 2010); dan Sam Gustin, “Digital Diplomacy” dalam *TIME* (September 2, 2011).

¹⁶ Evgeny Morozov, “The Digital Dictatorship” dalam *Wall Street Journal* (February 20, 2010) diakses dari <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703983004575073911147404540.html/> pada tanggal 14 September 2011, pukul 8.33 WIB.

¹⁷ Jesse Lichtenstein, “Digital Diplomacy” dalam *New York Times Magazine* (July 16, 2010), diakses dari <http://www.nytimes.com/2010/07/18/magazine/18web2-0-t.h/> pada tanggal 15 September 2011, pukul 8.54 WIB.

I.2. Rumusan Permasalahan

Semenjak Hillary Clinton menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama, dirinya mulai melaksanakan perubahan-perubahan di berbagai aspek diplomasi yang dijalankan oleh Amerika Serikat, terutama dengan inisiatif *21st Century Statecraft*, di mana teknologi baru digunakan sebagai alat untuk meraih tujuan kebijakan luar negeri AS. Penulis tertarik untuk menyoroti bagaimana dengan fokus diplomasi yang seperti ini, AS berusaha untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dengan cara menggunakan *soft power* yang dimilikinya, yang salah satunya dilakukan dengan cara menarik perhatian masyarakat sipil melalui dukungan teknologi yang diberikan untuk memberdayakan usaha mereka.

Studi Hubungan Internasional yang dilakukan untuk membahas peran diplomasi yang memperjuangkan *soft power* dan menggunakan teknologi informasi sebagai alatnya ini (singkatnya, diplomasi digital) masih terbatas. Dengan adanya *21st Century Statecraft*, Departemen Luar Negeri AS berusaha untuk menawarkan alternatif baru untuk menyelesaikan masalah-masalah global serta memperluas cakupan jaringan mereka ke khalayak yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana peran dari inisiatif ini terhadap praktik diplomasi AS yang menjalankan *soft power* yang dimilikinya.

Salah satu negara di mana inisiatif *21st Century Statecraft* dapat dilihat dijalankan secara nyata adalah Iran, yang pada tahun 2009-2010 mengalami gejolak setelah dilakukan pemilihan umum untuk memilih calon presiden yang baru antara pemegang jabatan saat itu Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan kandidat oposisi Mir-Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi. Masyarakat pendukung oposisi menuduh rezim Ahmadinejad telah sengaja melakukan manipulasi pada hasil pemilihan umum tersebut dan memulai protes pada bulan Juni 2009. Protes yang dijuluki sebagai “Revolusi Hijau” ini mendapatkan banyak sorotan dunia, khususnya karena adanya penggunaan Internet yang intensif oleh para pemrotes untuk mengorganisasi gerakan mereka dan meluncurkan judul artikel seperti “The Revolution Will Be Twittered,” yang ditulis oleh

Andrew Sullivan dari *The Atlantic*.¹⁸ Melihat hal ini, Departemen Luar Negeri AS menjalankan beberapa inisiatif berkaitan dengan *21st Century Statecraft*, seperti *Civil Society 2.0*, yang diluncurkan oleh Hillary Clinton dalam pidatonya di Maroko pada November 2009, yang bertujuan untuk mendukung usaha masyarakat sipil di seluruh dunia dengan mengembangkan kapasitas teknologi mereka sehingga dapat mencapai misi mereka dengan menggunakan berbagai teknologi informasi yang tersedia sekarang.¹⁹

Di sisi lain, serangkaian revolusi terjadi di Timur Tengah yang dinamakan sebagai gerakan *Arab Spring*, di mana rakyat di negara-negara seperti Tunisia dan Mesir melakukan protes terhadap rezim yang berkuasa karena dianggap melakukan penekanan dengan cara-cara yang otoritarian terhadap masyarakatnya sendiri. Revolusi yang terjadi di Mesir khususnya telah membangun adanya diskusi baru mengenai penggunaan sosial media dan dampaknya pada pergerakan sosial masyarakat. Salah satunya melalui *Facebook page* yang berjudul “We Are Khaled Said” yang dibuat oleh seorang eksekutif Google bernama Wael Ghonim.²⁰ Hal ini dikarenakan pada saat revolusi Mesir berlangsung, perangkat *social media* menjadi media yang efektif bagi para demonstran untuk mengorganisasikan gerakan mereka serta menjadi *channel* untuk pesan-pesan agar dapat menjangkau berbagai belahan dunia. Di revolusi ini pula, AS berusaha melakukan bantuan bagi para aktivis dalam bidang teknologi, salah satunya dengan berusaha memastikan bahwa jaringan Internet di Mesir ketika demonstrasi sedang berlangsung tidak akan dimatikan oleh pemerintahan setempat.

Oleh karena itu, penulis akan mengangkat pertanyaan penelitian berikut dalam skripsi ini: **“Bagaimanakah implikasi inisiatif *21st Century Statecraft* sebagai bentuk diplomasi digital terhadap keberhasilan penyelenggaraan *soft power* Amerika Serikat dengan menggunakan perbandingan studi kasus Protes Iran dan Revolusi Mesir (2009-2011)?”**

¹⁸ Evgeny Morozov, *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom* (New York: PublicAffairs, 2011), hlm. 1.

¹⁹ “*21st Century Statecraft*,” *Loc. Cit.*

²⁰ “Egypt’s Revolution by Social Media” diakses dari <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703786804576137980252177072.html/> pada tanggal 15 September 2011, pukul 11.33 WIB.

Dari pertanyaan penelitian di atas, penulis berusaha untuk mengajukan sebuah **argumen** bahwa kesuksesan diplomasi digital sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak serta-merta bergantung pada anggapan bahwa dunia yang sekarang dilihat sebagai *network society* akan mempermudah strategi diplomasi publik seperti ini. Melainkan terdapat bermacam-macam faktor, seperti *frame of thinking* yang di dimiliki publik/masyarakat suatu negara (yang akan ditunjukkan oleh studi kasus Iran dan Mesir dalam hal ini) yang akan menentukan apakah strategi seperti ini dapat membantu Amerika Serikat dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang dimilikinya, terutama dalam penyebaran nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

Departemen Luar Negeri AS pertama kali meluncurkan inisiatif *21st Century Statecraft* ketika Hillary Clinton memperkenalkannya kepada publik lewat pidatonya pada Mei 2009. Dari sini, kemudian muncullah berbagai program yang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri AS, seperti Tech@State dan lain sebagainya. Kebijakan dan program yang dijalankan makin intensif pada tahun 2010, terutama *Civil Society 2.0*, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbagai organisasi masyarakat sipil secara internasional. Melihat perkembangan ini maka penulis membatasi periodisasi penelitian pada jangka waktu antara tahun 2009 dan 2011, yang juga sesuai dengan dua kasus yang menjadi fokus penelitian.

I.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Meskipun telah ada beberapa tulisan yang membahas diplomasi gaya baru berupa diplomasi digital, belum ada penelitian yang melihat bagaimana implementasi diplomasi ini memiliki implikasi terhadap keberhasilan manifestasi *soft power* suatu negara. Terlebih lagi terhadap inisiatif *21st Century Statecraft* yang masih tergolong sangat baru. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki **tujuan** untuk mendapatkan temuan-temuan mengenai implikasi dari inisiatif *21st Century Statecraft* sebagai bentuk diplomasi digital Amerika Serikat terhadap keberhasilan penyelenggaraan *soft power* negara ini, khususnya dalam kasus protes Iran yang terjadi pada tahun 2009-2010.

Adapun **signifikansi** dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman baru mengenai diplomasi digital, yang alih-alih difokuskan kepada negara lain, justru

difokuskan pada publik—termasuk *civil society*—di negara lain, yang dimudahkan dengan berbagai kemajuan di bidang teknologi informasi, terutama dengan adanya berbagai aplikasi-aplikasi Internet. Kajian mengenai diplomasi digital ini diharapkan dapat memberikan pendekatan baru terhadap cara diplomasi tradisional yang selama ini dijalankan antarpemerintahan negara. Selain itu, skripsi ini akan memaparkan kebijakan diplomasi digital baru Amerika Serikat, yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu *21st Century Statecraft*. Melalui penelitian ini, akan dijelaskan pula implikasi kebijakan tersebut terhadap keberhasilan manifestasi *soft power* negara ini. Dengan memaparkan hal-hal di atas, penelitian ini akan memberikan pendekatan baru terhadap cara diplomasi tradisional yang selama ini dijalankan antarpemerintahan negara dan memperkaya kajian mengenai diplomasi dalam ilmu Hubungan Internasional.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka atau *literature review* ini, akan dipaparkan berbagai literatur (buku, artikel jurnal, dan bentuk penelitian lainnya) yang telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, dengan adanya tinjauan pustaka, penulis akan menjelaskan mengenai **signifikansi** dari topik skripsi di tengah-tengah konteks bahasan literatur yang sudah ada, dalam rangka untuk membuktikan bahwa topik penelitian yang diajukan merupakan karya ilmiah yang orisinal dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Berbagai literatur dan karya ilmiah yang dibahas di dalam tinjauan pustaka ini utamanya berkaitan dengan perdebatan akan implementasi *soft power* Amerika Serikat melalui bentuk-bentuk diplomasi yang non-tradisional serta kebijakan-kebijakan terkait diplomasi digital, yang dilihat sebagai salah satu bentuk dari diplomasi publik. Oleh karena itu, akan terdapat tiga bagian utama dalam tinjauan pustaka ini, yaitu mengenai perkembangan diplomasi non-tradisional Amerika Serikat, diplomasi dan kemajuan teknologi informasi (yang memunculkan diplomasi digital), serta kebijakan diplomasi digital yang pernah dijalankan oleh Amerika Serikat.

1.4.1. Perkembangan Diplomasi Non-Tradisional Amerika Serikat

Dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat memiliki beragam cara dalam teknik diplomasinya, baik itu yang bersifat tradisional (umumnya difokuskan pada proses pertukaran yang terjadi antara perwakilan resmi antara dua negara atau lebih) maupun non-tradisional, seperti diplomasi publik. Salah satu karya ilmiah yang membahas ini adalah artikel berjudul **“The Butterfly Effect and the Making of ‘Ping-Pong Diplomacy’”** oleh **Zhaohui Hong** dan **Yi Sun**.²¹ Artikel ini menganalisis peran dari individu-individu yang ada, baik dari China maupun Amerika Serikat, dalam formulasi, implementasi, dan promosi *“Ping-Pong Diplomacy”* yang memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan baik antara kedua negara, yang membawa perubahan signifikan pada dinamika Perang Dingin pada masa itu. Zhahou dan Yi menyoroti *butterfly effect* yang ada dalam kasus ini, di mana dengan menggunakan cara diplomasi non-tradisional, yaitu pengiriman delegasi AS dan China ke Kejuaraan Tenis Meja Dunia yang ke-31 di Nagoya, Jepang pada tahun 1971, muncul apa yang dinamakan sebagai *“people’s diplomacy,”* yang berpengaruh pada perubahan opini publik, terutama di Amerika Serikat. Apalagi ketika tim tennis meja AS mengunjungi China setelah pertandingan berlangsung. Hal ini pada akhirnya menciptakan reaksi pers dan dukungan publik yang sangat positif sehingga mendorong Presiden AS pada saat itu Richard Nixon untuk mengunjungi China. Pada akhirnya hubungan antara kedua negara pun kembali membaik. Zhahou dan Yi kemudian menyimpulkan bahwa pemulihan hubungan diplomatik ini disebabkan adanya inisiatif-inisiatif diplomasi non-tradisional—yaitu Diplomasi Ping-Pong—yang menjadi katalis utama bagi perubahan dalam kebijakan luar negeri AS yang sangat signifikan ini.

Karya ilmiah lain yang juga dalam membahas perkembangan diplomasi non-tradisional AS lainnya (khususnya diplomasi publik) adalah artikel **Jan Melissen** yang berjudul **“The New Public Diplomacy: Theory and Practice”** dalam buku *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*.²² Sesuai dengan judulnya,

²¹ Zhaohui Hong dan Yi Sun, “The Butterfly Effect and the Making of ‘Ping-Pong’ Diplomacy” dalam *Journal of Contemporary China*, 9, No. 25, (2000), hlm. 429-448.

²² Jan Melissen, “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice” dalam Jan Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (New York & Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 3-27.

melalui tulisan ini, Jan Melissen berusaha untuk menelisik diplomasi publik *baru* di lingkungan yang berbeda pasca-Perang Dingin. Pertama-tama, Melissen memaparkan sejarah diplomasi publik secara singkat, sebelum melanjutkan ke perdebatan kontemporer mengenai hal ini. Sebagai salah satu instrumen penting bagi *soft power*, diplomasi publik telah dipraktikkan bahkan jauh sebelum diskusi mengenai diplomasi publik dimulai. Pada masa Perang Dingin, contohnya, Amerika Serikat, Uni Soviet, serta tiga kekuatan utama Eropa merupakan lima negara yang mulai intensif melaksanakan “*communications with the world*.” Bila dulu diplomasi publik hanya dipandang sebelah mata sebagai “pendamping” dari dialog diplomatik yang dijalankan, Melissen melihat bahwa diplomasi publik yang baru lama-kelamaan menjadi komponen standar dari keseluruhan praktik diplomasi dan lebih dari sekadar bentuk propaganda yang dilaksanakan oleh diplomat.

Berbeda dengan Hans Tuch yang tidak melihat diplomasi publik sebagai paradigma diplomasi yang baru, dalam analisisnya, Melissen tidak melihat diplomasi publik sebagai praktik yang menjadi monopoli negara—meskipun peran negara memang menjadi fokus utama di sini. Aktor-aktor non-negara besar dan kecil, serta aktor supranasional dan subnasional telah membangun kebijakan diplomasi publik mereka masing-masing. Mulai dari PBB dan Uni Eropa hingga NGOs seperti *Greenpeace* dan *Amnesty International*, aktor-aktor ini berusaha untuk mengirimkan pesan-pesan mereka kepada publik internasional. Dari hal ini, Melissen menyimpulkan bahwa sekarang diplomasi publik berjalan di dalam lingkungan yang berjejaring ketimbang model *state-centric* dalam hubungan internasional yang bersifat hierarkis, seperti yang dijelaskan oleh Brian Hocking. Hal ini kemudian memunculkan tantangan baru bagi para praktisi diplomasi dari pihak pemerintahan yang harus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak non-negara yang memiliki *soft power*, mulai dari sektor privat hingga masyarakat sipil.

Yang terakhir, terdapat penelitian yang dilakukan oleh **Kathy R. Fitzpatrick** yang bertajuk *U.S. Public Diplomacy in a Post-9/11 World: From Messaging to*

Mutuality.²³ Dalam tulisan ini, Fitzpatrick menekankan pentingnya sebuah model dialog bagi diplomasi publik AS yang dapat menjadi kerangka kerja yang lebih baik bagi implementasi kebijakan luar negeri AS dalam ranah ini. Model dialog dari diplomasi publik yang diajukan oleh Fitzpatrick ini difokuskan pada beberapa aspek, seperti mutualitas antarpihak, komitmen, *trust*, dan kolaborasi. Jadi diplomasi yang berjalan bersifat lebih “sosial” dan dua arah sehingga pemahaman yang ada di antara kedua belah pihak juga dapat membawa dampak yang lebih positif.

1.4.2. Diplomasi dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Diplomasi Digital

Selanjutnya, akan dipaparkan mengenai tulisan-tulisan yang membahas mengenai diplomasi digital, yang kemunculannya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya, terdapat banyak literatur yang membahas bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi praktik politik internasional sekarang. Namun, di sini pemaparan akan lebih difokuskan pada tulisan-tulisan yang menekankan pada kemunculan diplomasi digital.

Yang pertama adalah tulisan **Wilson Dizard, Jr.** dalam buku *Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age*.²⁴ Sebagai salah satu akademisi yang mengawali penggunaan istilah “diplomasi digital,” Dizard melihatnya sebagai strategi baru yang muncul setelah adanya berbagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*). Kemunculan ini dikarenakan kemajuan ICT telah mempengaruhi kebijakan luar negeri: tidak hanya melahirkan serangkaian isu strategis baru, namun juga mengubah cara negara mengatasinya.

Menurut Dizard, terdapat tiga tren yang menentukan peran diplomasi digital dalam kebijakan luar negeri suatu negara:

²³ Kathy R. Fitzpatrick, *U.S. Public Diplomacy in a Post-9/11 World: From Messaging to Mutuality* (Los Angeles: Figueroa Press, 2011).

²⁴ Wilson Dizard, Jr., *Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age* (Westport: Praeger Publishers, 2001), hlm. 1-5.

1. Meningkatnya isu kebijakan luar negeri yang terkait dengan sumber daya komunikasi dan informasi;
2. Perubahan organisasi sumber daya informasi dalam departemen luar negeri, terutama di Amerika Serikat, dan agen-agen yang terkait; dan
3. Peningkatan “diplomasi publik,” dan penggunaan teknologi digital untuk mempengaruhi opini publik.

Perubahan dalam tiga bidang di atas (kebijakan, operasi, dan diplomasi publik) merupakan tiga hal yang digunakan oleh Dizard untuk mengukur dampak dari kemajuan teknologi informasi terhadap kebijakan luar negeri yang mendorong kemunculan diplomasi digital. Selain itu, Dizard juga melihat bahwa Departemen Luar Negeri AS telah melalui serangkaian reorganisasi internal untuk berhadapan dengan isu digital ini. Reorganisasi ini juga dipengaruhi oleh dua kelompok luar, yaitu agensi federal domestik serta NGOs (*non-governmental organizations*). Kedua kelompok ini semakin meningkat pengaruhnya seiring meningkatnya kapabilitas mereka berkat penggunaan teknologi informasi yang memungkinkannya untuk mempengaruhi opini publik.

Tulisan lain yang membahas mengenai dampak kemajuan teknologi terhadap praktik diplomasi adalah buku oleh **R.S. Zaharna** yang berjudul *Battle to Bridges: U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy After 9/11*.²⁵ Zaharna memaparkan bahwa pasca-9/11, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah beberapa elemen yang berhubungan dengan praktik diplomasi negara (khususnya di sini adalah Amerika Serikat): kemunculan aktor-aktor non-negara yang baru serta memiliki tujuan politiknya masing-masing; teknologi komunikasi yang memudahkan pembentukan jaringan-jaringan antaraktor; dan cara aktor-aktor baru ini mengorganisasi diri mereka dengan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan politiknya.

Transisi yang terjadi dari era informasi ke era komunikasi global merepresentasikan pergeseran fokus yang terjadi dari informasi (*message content*) menuju komunikasi (*message exchange*). Jadi, siapa yang memfasilitasi dan menguasai

²⁵ R.S. Zaharna, *Battle to Bridges: U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy After 9/11* (New York & Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 73-91.

pertukaran informasi—alih-alih produksi informasi—sekarang memegang kekuasaan yang lebih di era komunikasi global. Oleh karena itu, menurut Zaharna, pemerintahan Amerika Serikat harus menyadari bahwa diplomasi publik yang baru secara inheren lebih ditekankan pertukaran pesan, sehingga strategi baru diplomasi publik harus beradaptasi pada dinamika ini.

Selanjutnya, terdapat pembahasan **Parag Khanna** dalam *How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance* mengenai apa yang dinamakannya sebagai “*mega-diplomacy*.”²⁶ Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan situasi dunia saat ini, di mana setiap aktor—pemerintahan, perusahaan, dan NGO—akan saling berinteraksi dan berkoalisi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang seringkali berkaitan. Khanna memaparkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak aktor-aktor baru yang mulai memasuki ranah diplomasi. Hubungan internasional sekarang tidak hanya menjadi dominasi negara, namun telah ditandai oleh kontes kekuatan dan legitimasi antara rezim, perusahaan, NGO, kelompok agama, serta individu-individu berpengaruh, yang masing-masing mengejar kepentingan mereka.

Selain itu, Khanna juga melihat bahwa Internet lama-kelamaan mulai menjadi ranah diplomasi virtual yang telah dijajaki oleh berbagai pemerintahan. Misalnya dalam situs jejaring sosial *Second Life*, dapat ditemukan konsulat virtual Swedia dan Brazil, sementara Departemen Luar Negeri AS pernah mengadakan debat *online* dengan *blogger* dari Mesir (contoh terakhir ini, khususnya, juga menekankan bagaimana sekarang pemerintahan negara mulai menganggap dengan serius masyarakat sipil di negara lain—sebuah bukti bahwa *soft power* tidak hanya dimiliki oleh negara semata). Pemerintah tidak hanya dapat menggantungkan diplomasinya pada pegawai Departemen Luar Negeri-nya, namun juga harus mendayagunakan berbagai aktor lain yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan negara tersebut. Khanna juga menekankan bahwa dalam menjalankan diplomasinya sekarang pemerintahan Amerika Serikat harus mempertimbangkan tiga dimensi: institutisi atau agensi pemerintahan

²⁶ Parag Khanna, *How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance* (New York: Random House, 2011), hlm. 9-55.

mana yang akan diikutsertakan dalam diplomasi (pendekatan pemerintahan), negara mana yang akan diajak bekerja sama (pendekatan “*multi-partner*”), dan bagaimana untuk meningkatkan sumber daya dan bakat dari sektor privat dan NGO (pendekatan “publik-privat”).

1.4.3 Kebijakan Diplomasi Digital Amerika Serikat

Terakhir, terdapat beberapa literatur yang membahas beberapa kebijakan diplomasi digital yang pernah dijalankan oleh Amerika Serikat di samping *21st Century Statecraft*. Yang pertama adalah penelitian yang dijalankan oleh **Lina Khatib, William Dutton, dan Michael Thelwall**, yang bertajuk “**Public Diplomacy 2.0: An Exploratory Case Study of the US Digital Outreach Team.**”²⁷ Penelitian ini memfokuskan diri pada inisiatif yang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri AS yang bernama “Digital Outreach Team (DOT)” (yang dijalankan terpisah dari inisiatif *21st Century Statecraft*), yang bertujuan untuk secara langsung berhubungan dengan warga negara di Timur Tengah dengan cara menerbitkan pesan-pesan mengenai kebijakan luar negeri AS dalam forum-forum Internet populer berbahasa Arab, Urdu, dan Persia di kawasan tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintahan AS untuk mengemukakan pandangannya terhadap isu-isu di kawasan tersebut yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri AS secara transparan.

Dalam penelitiannya, Khatib, et al. melihat hal ini sebagai bentuk bagaimana Internet telah memungkinkan pendekatan-pendekatan baru terhadap diplomasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan asesmen terhadap proses dan jangkauan metode baru diplomasi digital ini. Hasil yang didapatkan adalah bahwa untuk mewujudkan visi *public diplomacy 2.0* diperlukan pemikiran strategis yang kreatif mengenai bagaimana untuk mengimplementasi dan menggunakan Internet secara lebih efektif dalam dialog (*conversation*) yang tumbuh di antara pihak “lawan” yang seringkali memiliki kecurigaan terhadap Amerika Serikat (dalam hal ini, misalnya,

²⁷ Lina Khatib, William Dutton, dan Michael Thelwall, “Public Diplomacy 2.0: An Exploratory Case Study of the US Digital Outreach Team” dalam *Center on Democracy, Development, and the Rule of Law (CDDRL) Working Papers*, Number 120, January 2011.

poling menunjukkan bahwa opini publik di kawasan Timur Tengah terhadap Amerika Serikat mayoritas negatif). Studi kasus ini menunjukkan bahwa usaha untuk menginterpretasi dan mengkontekstualisasi pesan yang disampaikan sangatlah penting sehingga DOT dapat berkompetisi setara dengan para kritik kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.

Tantangan utama dalam menggunakan Internet untuk menjalankan diplomasi publik ini adalah bahwa seorang individu bisa saja mengunci diri mereka dalam apa yang dinamakan sebagai “*echo chambers*” virtual, di mana mereka tidak terekspos terhadap opini yang beragam dan pandangan yang saling berkontradiksi. Oleh karena itu, DOT berusaha untuk membangun dialog yang memasukkan segala perspektif ke dalamnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi para diplomat di seluruh dunia untuk mengetahui potensi dari mengikuti dialog dua arah mengenai berbagai isu kontroversial, serta pada saat yang bersamaan, juga secara sistematis mengeksplorasi strategi untuk menghadapi argumen yang seringkali ofensif dan emosional ketika terdapat kurangnya *trust* di antara pihak lawan. Khatib, et al. akhirnya menyimpulkan bahwa cara terbaik bagi AS untuk mendapatkan *trust*, tidak hanya dapat digantungkan pada metode diplomasi publik yang dijalankannya, namun juga melalui perubahan positif dalam kebijakan luar negerinya, yang menunjukkan bahwa negara ini “*walk the talk*.”

Selain itu, terdapat penelitian oleh **Rita J. King dan Joshua S. Fouts** berjudul “**Digital Diplomacy: Understanding Islam Through Virtual Worlds.**”²⁸ Di sini, King dan Fouts meneliti kebijakan yang diluncurkan oleh *Under-Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs* Departemen Luar Negeri AS, James K. Glassman, pada tahun 2008, yaitu “Public Diplomacy 2.0 (PD 2.0,” yang bertujuan untuk meraih publik di negara lain melalui interaksi virtual. Salah satu bentuknya adalah inisiatif “Understanding Islam through Virtual Worlds,” yang secara spesifik bertujuan untuk melihat bagaimana Internet dapat membantu pemahaman akan Islam yang lebih baik

²⁸ Rita J. King dan Joshua S. Fouts, “Digital Diplomacy: Understanding Islam Through Virtual Worlds” (Carnegie Council, 2009), diakses dari http://dancinginkproductions.com/uploads/pdfs/ui/DIP_understandingislam_policyrec_2009.pdf/ pada tanggal 10 Oktober 2011, pukul 8.46 WIB.

bagi para pembuat kebijakan, diplomat, dan seluruh individu di dunia. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Internet dapat mempelajari budaya Islam dalam cara yang kondusif sehingga dapat muncul dialog substantif antarbudaya.

Hasil temuan King dan Fouts menunjukkan bahwa banyak komunitas yang di dunia yang berbagi pengalamannya mengenai apa arti menjadi seorang Muslim pada tahun 2008 melalui berbagai aplikasi virtual di Internet, seperti *Twitter*, *Skype*, *FriendFeed*, *Facebook*, *YouTube*, *Second Life*, dan berbagai *blog*. King dan Fouts menekankan bahwa, meskipun mereka tidak merekomendasikan aktivitas dunia secara fisik dengan aktivitas secara virtual, dialog dua arah yang dimungkinkan oleh diplomasi digital ini telah mendukung pemahaman antarbudaya yang krusial antaraktor. Oleh karena itu, dalam menjalankan diplomasinya, pemerintah harus memahami bahwa paradigma komunikasi telah berubah dan bahwa kebijakan luar negeri, diplomasi publik, dan komunikasi strategis tidak hanya ditentukan oleh pendekatan dengan para elit tradisional di dunia “fisik,” namun juga dengan berbagai aktor yang ada. Mengutip Jonathan Taplin, King dan Fouts menekankan bahwa hal ini disebabkan informasi sekarang telah berjalan dalam arus yang terdesentralisasi, saling berjejaring, dan bersifat “*bottom-up*.”

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan mengkonseptualisasikan beberapa istilah yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu *soft power*, diplomasi digital, dan diplomasi publik. Namun selain ketiga istilah ini, penulis juga akan menambahkan istilah lain, yaitu *network society*, yang akan membantu analisis lebih lanjut dalam penelitian.

1.5.1. *Soft Power*

Dalam artikel “Public Diplomacy and Soft Power,” Joseph S. Nye, Jr. mendefinisikan *power* (kekuatan) sebagai kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan hal yang diinginkan, yang dapat dilakukan dengan tiga cara utama: ancaman

atau aksi koersif (diistilahkan sebagai “sticks”), dorongan dan pembayaran (“carrots”), dan atraksi atau menarik pihak lain untuk memiliki keinginan yang sama. Hal yang terakhir inilah yang menggambarkan *soft power*, di mana alih-alih menggunakan pendekatan yang koersif maka dilaksanakan ko-optasi terhadap pihak lain. (Istilah *soft power* diperkenalkan pertama kali oleh Nye dalam bukunya *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, dan didasarkan dari konsep “second face of power” yang dikembangkan oleh Peter Bachrach dan Morton Baratz pada tahun 1963.) Contohnya, suatu negara dapat menggapai tujuan yang diinginkannya dalam politik dunia karena negara lain ingin mengikutinya, mengagumi nilai yang dimilikinya, mengikuti contohnya, dan/atau memiliki aspirasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan keterbukaan yang sama. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi negara ini untuk menentukan agenda kebijakan luar negeri yang juga mementingkan *soft power* yang dimiliki.²⁹

Soft power tidaklah sekedar pengaruh (*influence*), karena pengaruh dapat ditemukan pada *hard power*, yang dicirikan oleh ancaman atau pembayaran. *Soft power* juga tidak sekedar persuasi ataupun kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan argumen, namun juga kemampuan untuk menarik perhatian (*entice and attract*). Nye menjelaskan bahwa secara behavioral, *soft power* dapat dilihat sebagai suatu kekuatan yang atraktif, sementara secara sumber daya, sumber daya *soft power* merupakan aset yang dapat menghasilkan atraksi tersebut. Dalam politik internasional, sumber daya yang menghasilkan *soft power* umumnya tumbuh dari tiga hal utama berikut:³⁰

1. Nilai yang diekspresikan oleh suatu negara atau organisasi dalam budayanya;
2. Contoh yang ditentukannya lewat praktik dan kebijakan internal; dan
3. Cara entitas ini menjalankan hubungan dengan pihak lain.

²⁹ Joseph S. Nye, Jr., “Public Diplomacy and Soft Power” dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* (2008; 616), hlm. 94-95.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

Cara yang sering dilakukan suatu negara untuk menyelenggarakan *soft power* yang dimiliki adalah melalui implementasi diplomasi publik (yang akan dijelaskan lebih mendalam dalam poin selanjutnya).

I.5.2. Diplomasi

Dalam buku *Essence of Diplomacy*, Christer Jönsson dan Martin Hall mengemukakan bahwa diplomasi masih menerima perhatian yang kecil di dalam Ilmu Hubungan Internasional, dan mereka berusaha untuk memaparkan dimensi-dimensi esensial dari diplomasi dan juga menjembatani antara teori dan praktik diplomasi. Menurut Jönsson dan Hall, diplomasi adalah institusi internasional yang telah berdiri lama dan menggambarkan kondisi manusia yang telah ada sebelum dimulainya sistem negara-bangsa. Selain itu, komponen utama dari diplomasi adalah negosiasi yang dilakukan antar-negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya.³¹ Di sini, diplomasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya.

Diplomasi juga didefinisikan sebagai “sistem komunikasi dari masyarakat internasional.” Menurut Hedley Bull, bentuk diplomasi yang paling dasar adalah adanya pengiriman pesan antara satu komunitas politis yang independen dengan yang lainnya. Jönsson dan Hall kemudian menambahkan bahwa dimensi-dimensi esensial dari bentuk komunikasi berupa diplomasi ini meliputi bahasa, pengumpulan informasi, pengiriman informasi (*diplomatic signaling*), negosiasi, komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi privat dan publik, serta perkembangan teknologi.³²

Dengan adanya diplomasi, maka pemerintahan suatu negara dapat mengkomunikasikan kepentingan kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara lain melalui dimensi-dimensi yang telah disebut di atas. Selain transmisi informasi dan negosiasi, salah satu hal yang terpenting adalah perkembangan teknologi, yang mempengaruhi cara suatu negara mengirimkan pesannya kepada negara lain. Salah satu

³¹ Christer Jönsson dan Martin Hall, *Essence of Diplomacy* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 3.

³² *Ibid*, hlm. 67.

contoh dari bagaimana perkembangan teknologi mengubah strategi diplomasi adalah diplomasi digital, yang akan dijelaskan di poin selanjutnya.

1.5.3. Diplomasi Digital

Istilah “diplomasi digital” pertama kali dimunculkan dalam ranah akademis oleh Wilson Dizard, Jr. dalam bukunya *Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age*. Dizard mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi kebijakan luar negeri, tidak hanya dengan memunculkan serangkaian isu strategis baru, namun juga mengubah cara negara mengatasinya. Dari sinilah, strategi baru berupa diplomasi digital dibutuhkan.³³

Menurut Dizard, terdapat tiga tren yang menentukan peran diplomasi digital dalam kebijakan luar negeri suatu negara:³⁴

1. Meningkatnya isu kebijakan luar negeri yang terkait dengan sumber daya komunikasi dan informasi;
2. Perubahan organisasi sumber daya informasi dalam departemen luar negeri, terutama di Amerika Serikat, dan agen-agen yang terkait; dan
3. Peningkatan “diplomasi publik,” dan penggunaan teknologi digital untuk mempengaruhi opini publik.

Perubahan dalam tiga bidang di atas (kebijakan, operasi, dan diplomasi publik) merupakan tiga hal yang digunakan oleh Dizard untuk mengukur dampak dari kemajuan teknologi informasi terhadap kebijakan luar negeri yang mendorong kemunculan diplomasi digital. Selain itu, Dizard juga melihat bahwa Departemen Luar Negeri AS telah melalui serangkaian reorganisasi internal untuk berhadapan dengan isu digital ini. Reorganisasi ini juga dipengaruhi oleh dua kelompok luar, yaitu agensi federal domestik serta NGOs (*non-governmental organizations*). Kedua kelompok ini semakin meningkat pengaruhnya seiring meningkatnya pula kapabilitas mereka berkat

³³ Wilson Dizard, Jr., *Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age* (Westport: Praeger Publishers, 2011), hlm. 1.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4-5.

penggunaan teknologi informasi yang memungkinkannya untuk mempengaruhi opini publik.³⁵

1.5.4. Diplomasi Publik

Diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk memobilisasi sumber daya *soft power* yang negaranya miliki untuk berkomunikasi dan menarik publik di negara lain, alih-alih pemerintahan mereka (yang lebih mencirikan diplomasi tradisional). Diplomasi publik berusaha untuk menarik perhatian kepada sumber daya *soft power* yang potensial ini melalui penyiaran (*broadcasting*), mensubsidi ekspor budaya, menjalankan pertukaran, dan lain-lain. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa budaya, nilai, dan kebijakan suatu negara yang disiarkan ini harus atraktif. Bila tidak, maka penyelenggaraan *soft power* tersebut tidak akan berhasil. Nye memberikan beberapa contoh. Misalnya, mengeksport film Hollywood yang penuh dengan adegan tidak senonoh dan kekerasan ke negara Muslim konservatif akan menghasilkan protes. Contoh yang lain, penyiaran VOA (*Voice of America*) yang menekankan kebaikan dari kebijakan pemerintah yang tampak arogan di mata publik negara lain akan dianggap sebagai propaganda dan tidak dapat menghasilkan *power of attraction*.³⁶

Cara yang dilakukan oleh pemerintahan negara dalam menjalankan *soft power*-nya telah mengalami transformasi seiring perkembangan yang terjadi di politik dunia. Pada masa Perang Dingin, diplomasi publik yang dilaksanakan cenderung difokuskan pada propaganda yang dilakukan antara pemerintahan negara blok Barat terhadap publik di negara blok Timur dan sebaliknya. Pada era baru ini, *soft power* sekarang bergantung pada **informasi**, yang sekarang dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat di dunia, terutama dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan menghasilkan Internet. Alhasil, muncul ledakan informasi yang menghasilkan apa yang dinamakan sebagai "*paradox of plenty*," yaitu banyaknya informasi menghasilkan kelangkaan perhatian. Ketika seseorang mengalami

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁶ Nye, Jr., "Public Diplomacy and Soft Power," hlm. 95.

information overload, maka sulit untuk menentukan fokus mereka. Sekarang, perhatian (*attention*) menjadi sumber daya yang lebih langka dibanding informasi, dan mereka yang dapat membedakan informasi berharga dari sekumpulan banyak informasi mendapatkan *power*.³⁷

Diplomasi publik yang efektif merupakan diplomasi dua arah, di mana pemerintah yang menjalankannya harus mengerti apa yang dipikirkan oleh pihak lain dan nilai apa saja yang kedua pihak saling miliki. Oleh karena itu, pertukaran sebagai bentuk diplomasi publik akan lebih efektif dibanding hanya penyiaran. Sangatlah krusial untuk memahami *target audience* dari diplomasi publik dan pesan yang akan dikirim harus dibentuk sedemikian rupa agar dapat beradaptasi dengan sifat dari publik tersebut sehingga dapat diterima dengan baik.³⁸

Jan Melissen berargumen bahwa sekarang kebijakan diplomasi publik tidak hanya dijalankan secara eksklusif oleh negara saja, namun juga oleh aktor non-negara, mulai dari organisasi internasional sampai berbagai NGO (*non-governmental organization*) internasional. Kedua, diplomasi publik ditujukan kepada publik di luar negeri, dan strategi dalam berurusan dengan publik ini harus dibedakan dengan sosialisasi diplomasi di tataran domestik. Ketiga, diplomasi publik sering dicitrakan sebagai arus informasi satu arah atau pun dua arah, tapi secara esensial, ditujukan untuk menyebarkan aspek positif dari suatu negara ke publik luar. Sebagai suatu metode diplomatik, diplomasi publik yang dijalankan oleh berbagai negara tidak seragam. Strategi ini mulai meningkat penggunaannya dalam hubungan bilateral negara, namun juga dapat dengan aktif diutilisasi oleh organisasi-organisasi internasional.³⁹

1.5.5. Network Society

Network society merupakan istilah yang dikemukakan oleh Manuel Castells untuk menggambarkan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dunia. Castells

³⁷ Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: PublicAffairs, 2004), hlm.

³⁸ Nye, Jr., "Public Diplomacy and Soft Power," hlm. 103.

³⁹ Jan Melissen, "The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice" dalam Jan Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 12-14.

melihat bahwa terjadi pergeseran dari *global society* menuju *network society*, di mana melalui keberadaan Internet dan *social media*, sekarang berbagai individu di dunia dapat berkomunikasi dengan satu sama lain dan membentuk jaringan-jaringan secara virtual. Castells melihat adanya sinergi potensial antara perkembangan *social media* dengan kapasitas otonomi dari masyarakat sipil di seluruh dunia untuk membentuk proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial inilah yang akan terjadi di ruang publik baru yang dibentuk oleh jaringan komunikasi, dalam hal ini berupa *social media*.⁴⁰

Perubahan yang menghasilkan *network society* ini, menurut Castells, secara perlahan akan berdampak dan mengubah norma-norma serta institusi-institusi yang selama ini menjadi struktur dari praktik sosial masyarakat. Insitusi yang ada di dalam masyarakat ini merupakan hasil dari konflik dan kompromi antaraktor sosial yang menjalankan konstitusi masyarakat berdasarkan nilai dan kepentingannya.⁴¹

Oleh karena itu, perubahan sosial yang terjadi ini merupakan hasil interaksi dari perubahan budaya (perubahan nilai dan kepercayaan yang telah terproses dalam pikiran manusia dalam skala yang cukup besar hingga dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan) dan perubahan politik (adopsi nilai-nilai baru oleh institusi yang berdifusi dengan budaya masyarakat). Dan salah satu pengejawantahan perubahan sosial ini adalah melalui gerakan resistensi terhadap pemerintahan, di mana gerakan-gerakan ini biasanya membangun jejaring solidaritas—dalam hal ini, secara virtual—demi mencapai tujuan mereka bersama.⁴²

1.5.6. Asumsi Penelitian

Berdasarkan pembahasan kerangka konsep yang akan digunakan di atas, maka penulis akan menarik beberapa asumsi dasar yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini:

⁴⁰ Manuel Castells, *Communication Power* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 303.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 299-300.

⁴² *Ibid.*, hlm. 346-347.

1. Inisiatif *21st Century Statecraft* yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat merupakan suatu bentuk diplomasi publik karena ditujukan kepada publik yang berada di luar Amerika Serikat.
2. Diplomasi digital merupakan cara diplomasi baru yang dijalankan oleh negara seiring berkembangnya teknologi informasi—terutama Internet—sebagai alat diplomasi baru yang kredibel untuk digunakan.
3. Publik Iran dan Mesir—terutama yang ikut serta dalam protes dan revolusi di negara masing-masing—merupakan bagian dari *network society*, yang saling terkoneksi satu sama lain akibat kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dimilikinya.
4. *Soft power* tidak hanya dimiliki oleh negara, namun juga oleh berbagai aktor-aktor non-negara, dalam hal ini publik Iran dan Mesir yang ikut serta di dalam protes masing-masing.
5. Diplomasi publik—terutama melalui diplomasi digital—menjadi cara diplomasi baru yang memiliki peran yang signifikan mengingat interaksi dalam politik dunia sekarang tidak hanya terbatas pada interaksi antarpemerintahan, namun juga interaksi transnasional antara pemerintah dengan masyarakat di negara lain.

I.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat beberapa alasan mengenai pemilihan metode penelitian ini. Pertama, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai diplomasi publik yang dilaksanakan dalam ranah digital serta penyelenggaraan *soft power* suatu negara. Hal ini tidak dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur yang ada dalam penelitian kuantitatif yang terlalu fokus pada prosedur kuantifikasi dan statistik. Kedua, penelitian ini mencoba untuk melihat interaksi peristiwa dan proses,⁴³ yang merujuk pada implikasi *21st Century Statecraft* terhadap penyelenggaraan *soft power* Amerika Serikat. Ketiga, penelitian ini

⁴³ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hlm.7.

menggunakan variasi bukti dan pengungkapan isu-isu baru.⁴⁴ Dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai diplomasi gaya baru ini belum secara mendalam dikaji dalam Ilmu Hubungan Internasional

Teknik **pengumpulan data** yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari sumber-sumber resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, seperti dokumen *Quadrennial Diplomacy and Development Review (QDDR)*, yang dapat diakses dari situs Web resmi badan ini. Data sekunder diambil dari buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian dari sumber yang valid dan berhubungan dengan topik penelitian.

Dari pengumpulan data yang dilakukan ini, penulis berharap untuk menemukan data mengenai beberapa hal:

1. Gambaran mendetail mengenai kebijakan *21st Century Statecraft* yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan dalam dua kasus, yaitu protes Iran dan revolusi Mesir;
2. Hubungan antara diplomasi *a la 21st Century Statecraft* dengan manifestasi *soft power* Amerika Serikat dengan melihat pencapaian dari implementasi kebijakan tersebut di Iran dan Mesir;
3. Perbandingan pencapaian kebijakan *21st Century Statecraft* yang diimplementasikan oleh Amerika Serikat di Iran dan Mesir; dan
4. Indikator serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan *21st Century Statecraft* dalam pengejawantahan *soft power* Amerika Serikat.

Bila data telah dikumpulkan, maka aktivitas berikutnya yang penulis lakukan adalah **analisis data** melalui beberapa tahapan, yaitu pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,⁴⁵ yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Pereduksian Data

⁴⁴ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Allyn & Bacon : Boston, 2003), hlm.33

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Alfabeta : Bandung, 2006), hlm.225

Pada tahap pertama ini, sejumlah informasi yang telah didapat akan direduksi ke dalam sebuah pola, kategori, maupun tema, yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan skema tertentu.⁴⁶ Dalam penelitian ini, khususnya, penulis akan mereduksi data yang ditemukan mengenai *21st Century Statecraft* ke dalam kategori-kategori jenis kebijakan di bawah inisiatif ini untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴⁷ Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bentuk penyajian data secara deskriptif analitis serta dalam bentuk bagan.

3) Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap terakhir ini, penulis akan menarik kesimpulan dengan menggambarkan persamaan dan perbedaan pola-pola yang didapatkan dari data yang terkumpul, dan kemudian menafsirkannya sesuai dengan konsep awal yang digunakan sebagai kerangka pemikiran. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁹

⁴⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (SAGE Publications, Inc : California, 1994), hlm.154.

⁴⁷ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 249.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 253.

I.7. Pembabakan Skripsi

Skripsi ini akan disusun ke dalam empat (4) bab utama:

Bab I: Bab Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II: Bab ini berisikan penjabaran mengenai subjek penelitian, yaitu kebijakan *21st Century Statecraft* Amerika Serikat, dan disusun sebagai berikut:

- *21st Century Statecraft* sebagai Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat;
- Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung demokratisasi di Timur Tengah (yang berhubungan dengan dua studi kasus yang dipakai dalam penelitian ini);
- Bentuk-bentuk implementasi kebijakan *21st Century Statecraft* di kasus protes Iran dan revolusi Mesir, di mana akan dijelaskan pula implikasi dan signifikansi dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pergerakan masyarakat sipil yang terlibat;

Bab III: Bab ini berisikan analisis yang mendalam mengenai implikasi yang dihasilkan oleh *21st Century Statecraft* terhadap penyelenggaraan *soft power* Amerika Serikat. Hal ini akan dilakukan dengan menganalisis kebijakan yang dijalankan pada tiap-tiap kasus dengan dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah dijabarkan pada bagian “Kerangka Pemikiran” di dalam Bab I. Dalam hal ini, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai implikasi kebijakan *21st Century Statecraft* terhadap keberhasilan *soft power* AS, dan juga aspek-aspek apa sajakah yang mendukung pelaksanaan diplomasi digital oleh AS ini.

Bab IV: Bab terakhir ini akan menyimpulkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, serta rekomendasi berkaitan dengan topik yang diharapkan dapat bermanfaat pada kajian studi Hubungan Internasional.

BAB II

KEBIJAKAN *21ST CENTURY STATECRAFT* DEPARTEMEN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS PROTES IRAN (2009-2010) DAN REVOLUSI MESIR (2011)

Dalam bab ini, pembahasan akan difokuskan pada jenis-jenis kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berada di bawah inisiatif *21st Century Statecraft* pada periode 2009-2011 secara umum, yang pada akhirnya diaplikasikan di dalam masing-masing studi kasus yaitu protes Iran dan revolusi Mesir.

Pertama-tama, penulis akan menjabarkan inisiatif *21st Century Statecraft* secara umum terlebih dahulu, khususnya berkaitan dengan alasan dan *raison d'être* mengapa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memilih untuk kebijakan ini di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dan arahan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.

Hal ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kebijakan luar negeri AS yang mendukung demokratisasi AS yang menurut penulis penting untuk memberikan konteks terhadap kebijakan *21st Century Statecraft* di Iran dan Mesir.

Kemudian, penulis akan menjabarkan bagaimana *21st Century Statecraft* diterapkan dalam kasus protes Iran dan revolusi Mesir dan bagaimana kebijakan tersebut berimplikasi terhadap pergerakan masyarakat yang terjadi di tiap-tiap negara. Kebijakan-kebijakan AS ini meliputi 1) kebijakan untuk mendukung kebebasan Internet (*Internet Freedom*); 2) *Civil Society 2.0*; dan 3) institusionalisasi inovasi teknologi informasi yang dilakukan, terutama yang berhubungan dengan koneksi antara AS dengan masyarakat di Iran dan Mesir. Pembahasan ini tentunya akan dilakukan secara terpisah antara Iran dan Mesir agar dapat terlihat jelas perbandingan antara keduanya.

II.1. *21st Century Statecraft* sebagai Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

Dimulainya kebijakan *21st Century Statecraft* terutama dipicu oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi. Menurut Kishan Rana, revolusi ini telah berdampak secara signifikan pada sistem diplomatik yang ada dan menjembatani

masalah jarak yang selama ini mendominasi jaringan diplomasi. Dengan adanya Internet, akan lebih mudah bagi pemerintahan suatu negara untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Perubahan yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa kehadiran Web 2.0 telah menyediakan kesempatan bagi departemen luar negeri untuk mengeksplor hal-hal yang disediakan oleh Internet yang dapat membantu kinerja mereka dalam menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara, baik itu dengan pengembangan situs Web bagi para kedutaan besar, pembentukan *intranet (virtual private network)* yang dapat menjadi media pertukaran tertutup antara kedutaan-kedutaan besar dengan pemerintahan, maupun melalui *blog* dan alat *social networking* lainnya, di mana diplomat dapat berinteraksi dengan satu sama lain maupun dengan publik di negara mana mereka ditempatkan dengan lebih mudah.⁵⁰

Kemajuan teknologi ini kemudian juga dibarengi dengan serangkaian hal lain yang membuat Hillary Clinton dalam jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri AS mencoba untuk menggunakan cara-cara kontemporer dalam menjalankan kebijakan luar negeri dengan mengutilisasi teknologi baru dan juga menggunakan sudut pandang berbeda dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internasional yang dihadapi oleh AS. Dari sini, muncul kebijakan *21st Century Statecraft*, yang akan dijelaskan secara lebih lanjut di bawah.

II.1.1. Perubahan Lanskap Politik Internasional sebagai Pemicu Kemunculan *21st Century Statecraft*

Di bawah pemerintahan Barack Obama, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berada di bawah kepemimpinan Hillary Clinton, yang pernah menjabat sebagai Senator AS dan menjadi kandidat calon presiden AS dari Partai Demokrat pada pemilihan umum 2008. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton menekankan adanya kebutuhan untuk meningkatkan diplomasi dan pembangunan sebagai agenda utama dalam kebijakan luar negeri AS di samping isu

⁵⁰ Kishan S. Rana, *21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide* (London: Continuum, 2011), hlm. 21.

pertahanan. Hal ini dilihat sebagai suatu pendekatan *smart power* untuk memecahkan berbagai masalah global yang beragam: ekstremisme yang penuh kekerasan, resesi global, perubahan iklim, hingga kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, maka pendekatan yang diambil dalam kebijakan diplomasi AS sekarang adalah penguatan sektor sipil, yang termasuk pegawai Departemen Luar Negeri serta USAID (*US Agency for International Development*). Hal ini tampak dari penambahan jumlah personel dalam kedua badan tersebut, yang disetujui oleh Kongres AS, untuk memperkuat kapasitas negara ini dalam mencapai kepentingan nasionalnya serta menyebarkan nilai-nilai Amerika.⁵¹

Hillary Clinton juga mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan *Quadrennial Diplomacy and Development Review* (QDDR)—yang dibentuk seperti *Quadrennial Defense Review* milik Departemen Pertahanan AS—pada bulan Desember 2010, yang merupakan sebuah *review* bagi Departemen Luar Negeri dan USAID yang berisi rekomendasi untuk mengembangkan kapasitas yang dimiliki untuk mencapai tujuan diplomasi dan pembangunan sekarang. QDDR juga mendefinisikan bagaimana koordinasi antara diplomasi dan pembangunan dapat direalisasikan serta memiliki sifat yang saling komplementer. Dokumen ini juga akan mengulas apa saja hal yang perlu diperbaiki serta pandangan mengenai opsi strategis serta sumber daya yang dibutuhkan pada masa depan.⁵²

Di dalam QDDR pertama yang diberi tajuk “Leading Through Civilian Power” itu sendiri, tren-tren yang membentuk konteks global bagi kebijakan luar negeri AS dibahas, yang mencakup hal-hal berikut.⁵³

1. Tantangan global yang baru

Berbagai tantangan yang dihadapi dunia di abad ke-21 ini makin beragam, termasuk terorisme, proliferasi materi nuklir, resesi global, perubahan iklim, *cybersecurity*, kejahatan transnasional, serta penyakit pandemik dan menular.

⁵¹ Clinton, *Loc. Cit.*, hlm. 13.

⁵² *Ibid.*, hlm. 14.

⁵³ US Department of State and USAID, *Leading Through Civilian Power: The First Quadrennial Diplomacy and Development Review*, hlm. 11-17, diakses dari <http://www.state.gov/qddr/> pada tanggal 18 Desember 2011, pukul 7.45 WIB.

2. Lanskap geopolitik dan geoekonomi yang baru

Hal ini dipengaruhi dengan munculnya pemain-pemain baru yang kuat di tataran internasional, seperti China, Brazil, India, dan Rusia, yang menjadi pusat-pusat pengaruh baru yang juga menginginkan suara dan representasi yang lebih besar di arena global.

3. Difusi *power* bagi berbagai aktor non-negara

Bila dahulu, *power* dalam sistem internasional hanya dijalankan oleh negara secara eksklusif, sekarang hal ini mulai dikuasai pula oleh aktor non-negara—mulai dari NGO, perusahaan multinasional, sampai kelompok teroris—yang memiliki cakupan transnasional dan memiliki kemampuan yang besar dalam mempengaruhi dinamika hubungan internasional.

4. Biaya yang meningkat dari konflik dan kelemahan negara

Meskipun banyak negara mengalami kemajuan di berbagai bidang pada saat ini, masih signifikan pula jumlah dari *weak* dan *fragile states*, yang kebanyakan menjadi sarang konflik. Tingginya konektivitas antarnegara di dunia sekarang membuat konflik dan kelemahan negara menjadi tantangan besar bagi AS dan sekutunya.

5. Era informasi yang telah mempercepat pacu hubungan internasional dan memfasilitasi era baru konektivitas

Tren paling penting yang membentuk kembali konteks global bagi kebijakan luar negeri AS adalah kemajuan teknologi yang telah secara signifikan mengubah bagaimana sebuah kebijakan luar negeri dijalankan dan telah mengubah aspek-aspek dari hubungan diplomatik. Di satu sisi, inovasi teknologi informasi dapat memperparah efek dari tantangan lain, namun juga dapat menciptakan kesempatan yang potensial untuk menyelesaikannya. Cepatnya pergerakan informasi membuat pemerintahan AS harus memiliki strategi untuk merespon segala perkembangan ekonomi maupun politik di dunia dengan cepat pula. Selain itu, teknologi baru telah meningkatkan konektivitas antarindividu dari berbagai belahan dunia. Setiap individu sekarang dapat menyuarakan pendapatnya dengan lebih bebas: opini publik sekarang dapat mempengaruhi pemerintahan di negara lain dan membentuk dinamika hubungan internasional.

Dari tren-tren di atas, tren ketiga dan kelima menjadi dasar bagi Departemen Luar Negeri AS untuk menjalankan inisiatif *21st Century Statecraft*-nya, di mana diplomasi AS sekarang diarahkan untuk diperluas dari konstituen tradisional dan mulai mendekati aktor-aktor baru, terutama masyarakat sipil (*civil society*). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa AS tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan suatu negara bila unsur masyarakatnya menentang pemerintahan AS. Arah kebijakan diplomasi yang baru ini akan dijalankan dengan mengutilisasi teknologi terbaru, serta inovator dan pengusaha di baliknya, dan mengintegrasikannya dalam usaha diplomasi dan pembangunan AS. Diplomasi publik juga akan menjadi misi diplomatik utama dengan membangun *hub* media regional untuk memastikan AS dapat berpartisipasi dalam berbagai debat publik di negara lain; memulai diplomasi komunitas untuk membangun jaringan yang memiliki kepentingan yang sama; serta memperluas hubungan antarindividu (*people-to-people*).⁵⁴

II.1.2. Inisiatif *21st Century Statecraft* sebagai Kebijakan Diplomasi Digital Amerika Serikat

21st Century Statecraft itu sendiri merupakan strategi diplomasi baru yang mulai dijalankan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam rangka menjawab tantangan global kontemporer. Pendekatan ini berusaha untuk menggali potensi dari alat dan teknologi baru dan menggunakannya untuk menjalin diplomasi publik dengan audiens yang baru, terutama masyarakat sipil. Revolusi dalam teknologi informasi—yang menghasilkan produk seperti Internet (*Twitter*, *Facebook*, dan lain-lain), SMS, media sosial, dan berbagai aplikasi *mobile* lainnya—memberikan Departemen Luar Negeri AS alat untuk melakukan *engagement* dengan masyarakat di negara lain dan memperluas paradigma diplomasi yang ada. Teknologi yang menjadi platform untuk komunikasi, kolaborasi, dan perdagangan di abad ke-21 ini dapat menghubungkan individu dengan individu lain, dengan sumber-sumber pengetahuan, dan dengan jaringan global.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. viii.

⁵⁵ QDDR, *Loc. Cit.*, hlm. 65.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Departemen Luar Negeri AS berusaha untuk mendapatkan komitmen dari Presiden Obama untuk mencapai level transparansi yang lebih tinggi dalam pemerintahan dan mendorong pemerintahan negara lain untuk bisa lebih transparan, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu, pemerintah AS juga membangun koneksi dengan mereka yang berada di balik pengembangan teknologi ini, termasuk para inovator dan pengusaha itu sendiri. Jadi, Departemen Luar Negeri AS berusaha untuk membangun *partnership* sektor publik dan privat yang menghubungkan pengalaman para diplomat dan ahli pembangunan di lapangan dengan energi dan sumber daya komunitas bisnis yang ada.⁵⁶

Program-program yang dijalankan di bawah *heading* inisiatif *21st Century Statecraft* ini sudah berjumlah banyak dan beragam sifatnya, yang antara lain, adalah sebagai berikut.⁵⁷

1. *Swat Text*

Setelah kekuatan Taliban mengambil alih kontrol Lembah Swat di Pakistan pada Mei 2010, pemerintah AS memberikan US\$100 juta sebagai bentuk dukungan kemanusiaan untuk membantu para pengungsi di sana. Namun, Hillary Clinton juga menganjurkan masyarakat AS untuk ikut membantu dengan mengirimkan pesan pendek (SMS) “swat” ke nomor 20222 dari telepon seluler dengan *provider* apapun sehingga setiap orang yang tinggal di AS dapat secara otomatis menyumbang US\$5 untuk *UN Refugee Agency*.

2. *Virtual Student Foreign Service*

Dalam pidatonya di upacara kelulusan New York University, Hillary Clinton mengumumkan inisiatif barunya untuk menghubungkan setiap mahasiswa di AS dengan kedutaan-kedutaan besar AS di luar negeri, dan memberdayakan mereka sebagai “diplomat” yang dapat berhubungan dengan masyarakat di negara lain.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sam duPont, “Reflections on 21st Century Statecraft” diakses dari <http://ndn.org/blog/2010/01/reflections-21st-century-statecraft/> pada 28 November 2011, pukul 18.30 WIB.

3. Pidato Kairo

Beberapa saat setelah Hillary Clinton mengumumkan inisiatif *21st Century Statecraft* pada akhir Mei 2010, Presiden Obama memberikan pidatonya di Kairo, Mesir, yang ingin membuktikan komitmen AS untuk memperbaiki hubungan AS dengan kaum Muslim (bukan pemerintahan) di seluruh dunia. Hal yang mendapat penekanan di sini adalah bahwa Obama mulai menaruh perhatian kepada publik yang ada, dan tidak hanya pada pemerintahan.

4. Kongo

Alec Ross mengunjungi Kongo bagian timur pada September 2010, tempat berlangsungnya salah satu konflik paling panjang dan mematikan di era modern. Ketika kembali, Ross memiliki ide untuk dua inisiatif: Pertama, sebuah sistem perbankan *mobile* yang dapat digunakan oleh pemerintah dan agen internasional untuk membayar tentara mereka, tanpa harus bergantung pada pengiriman uang tradisional yang tidak dapat diandalkan dan berbahaya. Kedua, Departemen Luar Negeri AS akan menyiarkan para mantan *combatant* di radio untuk menggunakan suara kredibel mereka agar dapat meyakinkan para anggota milisi untuk melakukan demobilisasi.

5. Kuba

Hubungan AS dengan Kuba sekarang mulai menggunakan nilai-nilai dari *21st Century Statecraft*, seperti kemudahan untuk pengiriman uang dan berkurangnya restriksi perjalanan untuk orang Kuba Amerika telah mendorong terjadinya dialog antarindividu. Sebagai tambahan, sanksi telekomunikasi terhadap Kuba juga mulai diturunkan di mana sekarang kabel bawah laut diizinkan dan penyedia layanan telepon selular telah dapat menjalankan bisnisnya di Kuba, yang akan memberdayakan individu di sana dengan teknologi informasi dan komunikasi.

6. *Mexico Initiative*

Hal ini merupakan usaha kolaborasi antara Departemen Luar Negeri AS, pemerintahan Meksiko, perusahaan telekomunikasi Meksiko, dan organisasi-organisasi nirlaba Meksiko dalam menghadapi masalah perdagangan obat-obatan terlarang dan tantangan dari kekerasan yang ditimbulkannya di daerah perbatasan, di mana warga Meksiko memiliki kesulitan untuk melaporkan kasus yang dilihat atau dialaminya

secara anonim kepada polisi. Oleh karena itu, dijalankan suatu inisiatif berupa kode pendek untuk SMS yang gratis, melalui mana warga Meksiko dapat melaporkan insiden kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan obat terlarang, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam *database* publik dan ditindaklanjuti oleh polisi lokal.

7. *Humari Awaz*

Hillary Clinton mengumumkan dukungan AS untuk pembangunan sebuah jaringan sosial berbasis telepon selular di Pakistan, ketika berbicara di Islamabad pada bulan Oktober. Jaringan ini dinamakan sebagai *Humari Awaz*—berarti “suara kita”—dan dapat diakses dengan nomor SMS gratis yang disediakan lima jaringan ponsel di sana. Warga Pakistan dapat menggunakan jaringan ini untuk tujuan sosial, maupun bisnis, media, agrikultur, dan lainnya. Pemerintahan AS akan menanggung biaya untuk 24 juta SMS pertama yang dikirim melalui *Humari Awaz*. Program ini direspon dengan cukup sukses, dengan setengah dari jumlah SMS yang gratis telah dipakai dalam beberapa minggu pertama setelah jaringan sosial ini diluncurkan.

8. *Civil Society 2.0*

Ketika berada di Marrakesh, Maroko, Hillary Clinton mengumumkan inisiatif baru yang bertajuk *Civil Society 2.0*, di mana Departemen Luar Negeri AS akan menyediakan dana dan keahlian bagi gerakan-gerakan masyarakat sipil yang bersifat *grassroots* di seluruh dunia dalam menggunakan teknologi agar dapat tumbuh dan bekerja dengan lebih efektif.

Aplikasi dari *Civil Society 2.0* yang pertama dimulai pada 20 November 2010 di Santiago, Chile, di mana Departemen Luar Negeri mengumpulkan ahli teknologi dan pemimpin *civil society* dari seluruh benua Amerika untuk mengikuti sebuah *workshop*, yaitu *TechCamp Santiago*. Tujuan dari acara ini adalah meningkatkan kemampuan *digital* organisasi masyarakat sipil, penyebaran informasi, pengembangan jaringan, dan menghubungkan individu-individu yang memiliki visi yang sama ke dalam organisasi-organisasi tertentu. Dengan memperluas kapasitas keseluruhan dari dunia *digital*,

organisasi-organisasi ini dapat bekerja dengan lebih efisien dalam mencapai tujuan mereka.⁵⁸

Ahli media sosial dan teknologi global dan regional akan bekerja sama dengan perwakilan dari masyarakat sipil regional untuk menentukan kebutuhan spesifik mereka dan membangun aplikasi praktis dengan tema-tema berikut:

- Mempromosikan kesempatan sosial dan ekonomi;
- Memastikan keselamatan warga di negara-negara tersebut;
- Memperkuat institusi pemerintahan demokratis yang efektif; dan
- Mencari solusi bagi tantangan keamanan energi dan perubahan iklim.⁵⁹

9. *Texting Haiti*

Setelah Haiti mengalami tragedi gempa bumi yang besar pada awal tahun 2010, Departemen Luar Negeri AS berkoordinasi dengan mGive, sebuah platform donasi *mobile*, untuk mendirikan sebuah nomor di mana warga AS dapat memberikan donasi US\$10 dengan mengirimkan sebuah SMS berisikan “HAITI” ke nomor 90999. Dalam beberapa hari, jumlah donasi yang terkumpul bagi Palang Merah dalam usaha bantuannya mencapai lebih dari US\$10 juta.

10. *Tech@State*⁶⁰

Inisiatif ini merupakan serial konferensi yang dilaksanakan di Departemen Luar Negeri AS yang menghubungkan inovator, diplomat AS, dan *official* pemerintahan lainnya untuk saling berbagi pengalaman dan mengembangkan alat baru untuk diplomasi dan pembangunan

11. *Virtual Presence Post (VPP)*⁶¹

Program ini merupakan alat manajemen organisasi yang membantu pegawai di Kedutaan Besar maupun Konsulat AS untuk memobilisasi alat-alat pengembangan diplomatik, termasuk perjalanan, program, media, dan teknologi, untuk memfokuskan dan memperbaiki hubungan dengan komunitas tertentu di mana AS tidak memiliki

⁵⁸ “Civil Society 2.0 | U.S. Department of State” diakses dari <http://www.state.gov/statecraft/cs20/index.htm/> pada tanggal 28 November 2011, pukul 23.45 WIB.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ QDDR, *Loc. Cit.*, hlm. 66.

⁶¹ *Ibid.*

fasilitas diplomatik dalam bentuk fisik. Saat ini terdapat 43 VPP yang aktif di seluruh dunia, yang ditargetkan kepada komunitas seperti di Zhengzhou, China; Chittagong, Bangladesh; Seychelles; San Marino; Somalia; Gaza, dan juga kelompok-kelompok adat di Guatemala.

II.2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mendukung Demokratisasi di Timur Tengah

Keberadaan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi kepentingan strategis bagi negara ini, mulai dari konflik Israel-Palestina hingga kekayaan minyak yang dikandung oleh kawasan ini. Namun, di samping berbagai isu ini, sejumlah ahli Timur Tengah di Amerika Serikat juga mengemukakan pandangan mereka bahwa AS juga memiliki keinginan untuk mendukung proses reformasi di kawasan ini, yang dimanifestasikan melalui demokratisasi dan dukungan bagi sistem ekonomi berbasis pasar bebas. Namun di lain sisi, hal ini juga mendapat kritik karena ada anggapan bahwa reformasi rezim di Timur Tengah belum tentu berpihak pada kepentingan AS karena hasil dari reformasi politik dapat menempatkan kaum Islamis di puncak kepemimpinan, yang disebabkan begitu lemahnya pengaruh kelompok liberal di Arab.⁶²

Menanggapi hal ini, Kenneth M. Pollack beranggapan bahwa *grand strategy* Amerika Serikat untuk merealisasikan reformasi di Timur Tengah akan difokuskan pada perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang bertahap dengan membantu (secara politik, ekonomi, atau bahkan militer dengan melindungi Timur Tengah dari bermacam-macam ancaman militer eksternal) berbagai kekuatan yang ada di dalam suatu negara Timur Tengah untuk berubah. Namun, di sisi lain, Pollack setuju bahwa usaha untuk membantu reformasi di kawasan ini tidaklah mudah, terutama karena adanya oposisi dari rezim yang berkuasa itu sendiri terhadap ide ini. Terlebih ketika ada beberapa rezim yang mencoba untuk mencegah munculnya semangat reformasi dengan retorik bahwa demokratisasi hanyalah usaha Barat untuk mendominasi negara tersebut, dengan

⁶² Kenneth M. Pollack, *A Path Out of the Desert: A Grand Strategy for America in the Middle East* (New York: Random House, 2008), hlm. 246.

memainkan kartu sentimen anti-Amerika, nasionalisme, dan terkadang sikap anti-Israel juga.⁶³

Oleh karena itu, Pollack menganggap bahwa Washington sebaiknya memfokuskan dirinya untuk mendorong liberalisme ekonomi untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih besar di Timur Tengah (yang dipandang akan mengurangi dukungan bagi kelompok Islamis) serta membantu modernisasi institusi pemerintahan dan militer di kawasan ini. Sementara itu, demokratisasi akan berkembang secara bertahap setelah langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya telah dijalankan.⁶⁴

Dalam wawancara yang diterbitkan dalam buku pada tahun 2008 oleh kolumnis *Washington Post*, David Ignatius kepada dua figur signifikan dalam politik luar negeri Amerika Serikat, Zbigniew Brzezinski dan Brent Scowcroft, diskusi mengenai peran AS di Timur Tengah juga dipertanyakan. Menurut Scowcroft, meskipun AS tampak mendukung rezim otoritarian di kawasan tersebut—seperti kerajaan Saudi dan rezim Mubarak di Mesir—tidak berarti AS tidak dapat berhubungan dengan publik Timur Tengah. Scowcroft melihat bahwa justru dengan memberikan dukungan kepada negara-negara Arab, AS menunjukkan inisiatifnya untuk mendukung pembangunan yang berlangsung, yang akan direspon positif oleh publik di sana.⁶⁵

Brzezinski menambahkan bahwa setelah Perang Dunia II, AS dipandang sebagai suatu “*liberating force*,” walaupun dirinya juga memiliki pendapat yang sama dengan kekhawatiran beberapa ahli Timur Tengah di atas bahwa usaha untuk menciptakan demokrasi tidak selamanya akan mendatangkan hasil yang AS inginkan.⁶⁶

Oleh karena itu, tampak bahwa kebijakan AS untuk mempromosikan demokrasi di Timur Tengah bersifat dilematis bagi AS sendiri. Di satu sisi, AS menginginkan adanya reformasi, khususnya di bidang politik, mengingat kebanyakan rezim pemerintahan di Arab bersifat otoritarian; namun di lain sisi, AS memiliki kepentingan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 247.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 279-280.

⁶⁵ Zbigniew Brzezinski dan Brent Scowcroft (dengan David Ignatius), *America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy* (New York: Basic Books, 2008), hlm. 92-93.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 94.

strategis dalam menjalin hubungan dengan rezim-rezim yang masih berkuasa ini, baik itu dengan motif ekonomi maupun keamanan. Belum lagi munculnya kekhawatiran bahwa kelahirannya demokrasi di negara-negara Timur Tengah hanya akan menempatkan kaum Islamis—beberapa di antaranya memiliki sentimen anti-Barat/anti-Amerika—di puncak-puncak kepemimpinan, padahal kawasan ini memiliki nilai strategis yang begitu tinggi bagi AS.

Pembahasan mengenai kebijakan luar negeri AS untuk mendukung demokratisasi di Timur Tengah di atas akan penulis kaitkan dengan dinamika yang ada seputar kebijakan *21st Century Statecraft* dan implementasinya dalam kasus protes Iran dan revolusi Mesir, yang akan dijelaskan secara lebih merinci di bagian selanjutnya.

II.3. *21st Century Statecraft* dan Protes Pemilihan Umum di Iran (2009 – 2010)

Di dalam bagian ini, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang protes pemilihan umum yang terjadi di Iran yang dimulai pada tahun 2009 dan penggunaan teknologi informasi yang terjadi pada saat itu. Setelahnya, akan dijelaskan kebijakan diplomasi digital di bawah tajuk *21st Century Statecraft* yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan protes yang terjadi di Iran ini.

II.3.1. Protes Pemilihan Umum di Iran (2009-2010) dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Latar belakang dari protes pemilihan umum di Iran yang dimulai pada akhir tahun 2009 dapat ditelusuri dari sejarah perkembangan politik negara ini. Menurut Yahya R. Kamalipour, masyarakat Iran telah berjuang untuk menginstitutionalisasi nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia, dan aturan hukum di negaranya selama lebih dari satu abad—meskipun hal ini tidak selamanya mencapai kesuksesan yang nyata. Contohnya Revolusi Konstitusi yang dijalankan pada 1906 digagalkan oleh Rusia dan pada tahun 1953, sebuah revolusi kembali digagalkan oleh kudeta yang didalangi oleh CIA dan Inggris. Aspirasi masyarakat pun kembali muncul dalam berbagai konteks sejarah, termasuk Revolusi Islam tahun 1979 dan pada akhirnya pemilihan umum yang

dilaksanakan pada tahun 2009, yang berujung pada protes publik yang diwarnai kekerasan.⁶⁷

Hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan pada 12 Juni 2009 ini menunjukkan bahwa kandidat *incumbent*, Presiden Mahmoud Ahmadinejad terpilih kembali sebagai kepala pemerintahan Iran. Hal ini juga mendapat dukungan dari *Supreme Leader* Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Meskipun demikian, pendukung kandidat oposisi, Mir Hossein Mousavi, percaya bahwa hasil pemilihan umum ini telah dimanipulasi serta bersifat tidak adil. Sebagai respon, para pemilih yang tidak merasa puas kemudian memulai protes dengan berdemonstrasi di Tehran dan kota-kota besar lainnya di Iran. Protes yang awalnya bersifat damai inipun perlahan-lahan diwarnai oleh kekerasan setelah tentara pemerintahan Iran berusaha untuk menghentikan para demonstran dengan jalan kekerasan. Ratusan orang terbunuh, mengalami kekerasan fisik, ditangkap, dan juga dipenjara. Hal ini kemudian mendapatkan perhatian dari media di seluruh dunia, dan meluncurkan “Gerakan Hijau” (“*Green Movement*” atau “*Green Wave*”)—pendukung Mousavi—yang terus meningkatkan momentumnya di dalam dan luar Iran.⁶⁸

Salah satu hal yang ditekankan dalam protes yang berlangsung ini adalah pengaruh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi—terutama melalui Internet—terhadap berbagai demonstrasi yang berlangsung, terutama dalam hal pengorganisasian demonstrasi serta penyebaran pesan dan informasi berhubungan dengan gerakan protes yang dilakukan pada waktu itu.

Bahkan sebelum pemilihan berlangsung, berbagai perangkat *social networking* mulai dipakai oleh berbagai kandidat untuk menyebarkan pesan mereka, terutama para kandidat oposisi yang memiliki akses terbatas terhadap saluran komunikasi publik yang dikuasai oleh pemerintahan yang masih berkuasa di bawah Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Mir Hossein Mousavi (perdana menteri beraliran kiri dari tahun 1981 hingga 1989), Mehdi Karroubi (mantan ketua parlemen yang reformis), dan Mohsen

⁶⁷ Yahya R. Kamalipour, “Introduction” dalam Yahya R. Kamalipour (ed.), *Media, Power, and Politics in the Digital Age: The 2009 Presidential Election Uprising in Iran* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010), hlm. xvii.

⁶⁸ *Ibid.*

Rezaei (mantan komandan Garda Revolusi Iran) mulai menggunakan teknologi baru yang dapat menjangkau orang yang lebih banyak dalam kampanye yang mereka lakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Behzad Mortavazi, seorang anggota komite kampanye Mousavi, penggunaan teknologi semacam ini dijalankan karena pesan-pesan yang disampaikan akan lebih mudah untuk diperbanyak, misalnya dengan mem-*forward* pidato dan *slideshow* foto melalui *Bluetooth* dan *e-mail*, serta mengundang lebih banyak pendukung di *Facebook*. Contohnya, pendukung Mousavi telah membuka sekitar 20 halaman *Facebook* yang telah menarik sekitar 7.500 anggota pada bulan Mei 2009. Meskipun pesan yang disampaikan tidak serta-merta *anti-incumbent*⁶⁹

Sebelum pemilihan presiden tahun 2009 dimulai pula, pemerintahan Iran telah memblokir akses Internet dalam jangka waktu yang singkat, terutama dalam pemilihan-pemilihan umum sebelumnya. Namun beberapa pengamat melihat bahwa kemajuan yang dimiliki oleh pemerintahan Iran dalam memonitor dan memfilter teknologi telah membuat aktivitas pemblokiran tidak perlu lagi untuk dilakukan. Sebaliknya, pemerintahan justru mulai menggunakan Internet untuk mendiseminasi disinformasi dan konten yang bersifat pro-pemerintahan. Setelah pemilihan presiden dilaksanakan, dan gerakan-gerakan protes mulai dimulai, koneksi Internet dilaporkan telah melambat namun tetap dapat diakses. Selain itu, jumlah aktivis Internet dan *blogger* yang ditangkap juga meningkat. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas pemerintahan dalam memfilter dan memonitor penggunaan Internet di dalam Iran yang aktif.

Pemerintahan Iran melacak komunikasi dan konten *online* melalui lokasi yang tersentralisasi di dalam monopoli telekomunikasi negara ini, yaitu Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Batas kebebasan bagi situs Internet dan *blog* ini masih diperdebatkan di bawah hukum Iran, namun berdasarkan Undang-Undang Pers yang ada, setiap *blogger* diharuskan memiliki izin untuk menjalankan aktivitasnya. Selain itu, seluruh konten di dalam situs web dan *blog* harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Budaya dan Panduan Islam. Pemerintahan Iran juga

⁶⁹ Najmeh Bozorgmehr, "Facebook sets tone in Iran's electoral Contest" diakses dari <http://www.ft.com/cms/s/0/da46ad4e-3f19-11de-ae4f-00144feabdc0.html/> pada tanggal 2 Maret 2012, pukul 20.09 WIB.

mengatur akses ke Internet dengan membatasi kecepatan Internet yang dapat disediakan oleh ISP (*Internet Service Provider*/penyedia jasa Internet) sebesar 128 *kilobyte per second* (kbps) bagi pengguna. Kebijakan ini membuat para pengguna Internet di Iran mengalami kesulitan dalam mengunduh konten-konten multimedia. Selain itu, dilaporkan pula bahwa Iran telah membatasi kecepatan akses Internet bagi rumah tangga.⁷⁰ Sementara, laporan lain menyebutkan bahwa Iran telah menangkap berbagai aktivis, *blogger*, dan jurnalis dengan tuduhan seperti pernyataan anti-pemerintahan, propaganda yang melawan Iran, dan membahayakan keamanan nasional Iran.⁷¹

Terdapat sejumlah bentuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai oleh kelompok oposisi, terutama *Twitter*, gambar, video (yang kebanyakan diunggah ke situs *video-sharing*, *YouTube*), *Facebook*, serta berbagai *blog* dan situs lainnya.⁷² Berikut akan dijelaskan signifikansi dari masing-masing terhadap protes yang dijalankan di Iran.

1. *Twitter*

Twitter dilihat sebagai perangkat *social media* yang dapat dengan cepat menyediakan berita terakhir mengenai observasi protes yang terjadi di lapangan serta menyebarkan informasi bagi berbagai outlet berita. Karena *Twitter* dapat digunakan melalui komputer maupun telepon seluler yang terhubung ke Internet, yang dimiliki sebagian besar masyarakat Iran, maka media ini sering dipakai ketika rangkaian protes sedang berlangsung. Agar pesan-pesan yang dikirim melalui *Twitter* yang berhubungan dengan protes Iran dapat ditemukan dengan mudah, baik dalam bahasa Farsi maupun Inggris, maka digunakan *hashtag* #IranElection.

Lev Grossman melihat bahwa *Twitter* merupakan medium yang sangat cocok bagi gerakan-gerakan protes yang bermunculan karena gratis, dapat digunakan di mana saja (*mobile*), sangat personal, dan sangat cepat (asalkan terdapat koneksi

⁷⁰ "Speed Reduced for High Speed Internet in Iran" diakses dari http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2006/10/061020_fb_rsh_adsl.shtml/ pada tanggal 30 November 2011, pukul 14.16 WIB.

⁷¹ U.S. State Department, "2009 Human Rights Report: Iran."

⁷² "Internet brings events in Iran to life" (*BBC News*, 15 June 2009) diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8099579.stm/> pada tanggal 19 November 2011, pukul 18.45 WIB.

Internet yang baik). Selain itu *Twitter* dapat dipakai dengan jaringan SMS (pesan singkat melalui jaringan telepon seluler), sehingga memudahkan pengguna telepon seluler di berbagai belahan Iran. *Twitter* juga memungkinkan tersebarnya informasi ke luar Iran dengan lebih mudah berdasarkan pandangan mata para demonstran. Hal ini berbeda dengan informasi yang datang dari media-media resmi Iran seperti koran dan televisi di mana berita-berita mengenai protes—khususnya mengenai kekerasan tentara pemerintahan terhadap demonstran—telah disensor.⁷³

Meskipun demikian, penggunaan *Twitter* di Iran bukan tanpa halangan: penggunaan di Iran sering menemui bahwa pemerintahan memblokir akses mereka ke layanan telepon selular dan beberapa situs, termasuk *Twitter*. Solusi yang dijalankan adalah dengan menggunakan *proxy* (*server* di mana IP dari situs yang ingin diakses akan disembunyikan) dan cara-cara lain sehingga informasi yang diinginkan dapat muncul, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diakses.

Signifikansi *Twitter* dalam protes Iran ditekankan oleh berbagai media yang menjuluki protes Iran sebagai “*Twitter Revolution*”—meskipun hal ini juga dikritik oleh berbagai pihak lain. Julukan ini dipakai antara lain oleh *The Washington Post* dalam editorialnya mengenai protes Iran.⁷⁴ Hal senada juga diungkapkan oleh kolumnis majalah politik *The Atlantic*, Andrew Sullivan, yang mengatakan bahwa, “*the revolution will be twittered.*”⁷⁵

Di lain sisi, keunggulan *Twitter* juga menjadi kelemahannya. Informasi yang sedemikian banyak mengenai protes Iran yang tersirkulasi di *Twitter* sangat beragam dan tidak dapat terverifikasi. Ada beberapa anggapan bahwa sebagian dari *tweet* (pesan) dalam bahasa Inggris berasal dari orang-orang Iran yang berada di luar

⁷³ Lev Grossman, “Iran Protests: Twitter, the Medium of the Movement” (*TIME*, June 17, 2009) diakses dari <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1905125,00.html> pada tanggal 19 November 2011, pukul 19.24 WIB.

⁷⁴ “Editorial: Iran’s Twitter Revolution” (*The Washington Post*, June 16, 2009) diakses dari <http://www.washingtonpost.com/news/2009/jun/16/irans-twitter-revolution/> pada tanggal 19 November 2011, pukul 18.56 WIB.

⁷⁵ Andrew Sullivan, “The Revolution Will be Twittered” (*The Atlantic*, June 13, 2009) diakses dari <http://www.theatlantic.com/daily-dish/archive/2009/06/the-revolution-will-be-twittered/200478/> pada tanggal 19 November 2011, pukul 19.00 WIB.

negeri dengan tujuan menarik perhatian media-media internasional. Meskipun demikian, *Twitter* tetap menjadi salah satu *channel* utama bagi para demonstran untuk menyampaikan pesan mereka yang berkaitan dengan protes pemilihan presiden Iran ini.⁷⁶

2. Gambar

Gambar atau fotografi mengenai protes Iran ini didistribusikan dalam jumlah yang besar melalui berbagai platform *photo-sharing* di Internet. Salah satunya adalah melalui sebuah *blog* foto berjudul “Tehran24” yang diperbarui secara berkala. Pemilik *blog* ini mengatakan bahwa situsnya telah diblokir di Iran dan hanya bisa diakses dari luar negeri. Selain itu, kecepatan dalam mengunggah (*upload*) foto sangat lambat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengunggah satu foto bisa mencapai satu jam. Namun, foto-foto yang diterbitkan di *blog* ini berasal dari para saksi yang melihat keadaan protes yang berlangsung di ibukota Iran. Selain *blog* di atas, foto-foto juga dikirimkan melalui situs *photo-sharing*, seperti *Flickr* dan *Picasa*, yang memperlihatkan protes dan kerusuhan yang terjadi di jalanan-jalanan Tehran.⁷⁷

3. *YouTube* (video)

Perangkat teknologi lain yang dipakai adalah *YouTube*, yaitu sebuah situs *video-sharing*. Sejumlah video amatir telah di-*upload* ke situs ini dengan jangka waktu yang cukup lebar—mulai dari masa kampanye untuk pemilihan umum hingga protes yang terjadi. Contoh-contoh video yang ada menunjukkan kerusuhan yang terjadi di jalanan-jalanan Tehran serta kekerasan yang dilakukan oleh Basiji (pasukan milisi paramiliter di bawah Garda Revolusi Iran) terhadap para demonstran.⁷⁸

⁷⁶ Lev Grossman, “Iran Protests: Twitter, the Medium of the Movement,” *Loc. Cit.*

⁷⁷ “Internet brings events in Iran to life,” *Loc. Cit.*

⁷⁸ *Ibid.*

4. Facebook

Jika *Twitter* lebih bersifat *real-time* dan berguna bagi penyebaran pesan secara cepat, maka *Facebook* menjadi tempat bagi para demonstran untuk mendukung suatu tujuan tertentu dan menyampaikan pandangan mereka tentang hal tersebut, dalam hal ini, ketidaksetujuan mereka terhadap hasil pemilihan presiden yang memenangkan Presiden Ahmadinejad.

Kampanye yang muncul di *Facebook* salah satunya muncul dalam bentuk suatu *group* (halaman forum) yang berjudul “*I [heart] Iran*,” di mana para pendukung oposisi *Green Movement* menyampaikan komentar mereka mengenai protes yang berlangsung dalam bahasa Farsi dan Inggris. Beberapa anggota juga meng-*upload* klip-klip video protes di halaman ini. Terdapat juga kampanye yang mengajak pengguna *Facebook* lainnya untuk mengganti gambar profil mereka menjadi warna hijau untuk menunjukkan dukungan mereka bagi kelompok oposisi. Meskipun demikian, tidak semua *Facebook group* terdiri dari pendukung oposisi. Sebuah *group* bernama “*In support of President Mahmoud Ahmadinejad*” mendukung hasil pemilihan umum serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Ahmadinejad.⁷⁹

5. Blog dan Situs Web Lainnya

Berbagai *blog* dan situs Web lain melaporkan mengenai protes yang berlangsung, baik yang berasal dari Iran sendiri maupun media internasional. Salah satunya adalah situs *Global Voices*, yang mengumpulkan artikel-artikel *blog* dari kontributornya di Tehran dan menyajikan analisis dan gambar-gambar mengenai protes pemilihan umum di sana.⁸⁰

Meskipun protes terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2010, tidak ada hasil nyata yang muncul dari berbagai demonstrasi yang dilangsungkan. Mahmoud Ahmadinejad tetap memegang kursi kepala pemerintahan di Iran sebagai presiden,

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

sementara suara kelompok oposisi kian melemah, yang disebabkan, antara lain, semakin ketatnya pengawasan yang

II.3.2. Kebijakan Mendukung Kebebasan Internet (*Internet Freedom*) di Iran oleh Amerika Serikat di bawah *21st Century Statecraft*

Kebijakan mengenai kebebasan Internet pertama kali didirikan ketika Hillary Clinton menyampaikan pidatonya akan isu ini pada bulan Januari 2010. AS, yang melihat dirinya sebagai pemimpin global dalam mempromosikan kebebasan berekspresi di era Internet ini, mencanangkan kebijakan yang memiliki tiga elemen utama: hak asasi untuk kebebasan berekspresi, pers, dan berkumpul di Internet (*cyberspace*); pasar terbuka untuk barang dan jasa digital untuk mengembangkan inovasi, investasi, dan kesempatan ekonomi; dan kebebasan untuk berhubungan dengan mendukung akses kepada teknologi koneksi yang ada di berbagai belahan dunia. Kebijakan ini juga terkait dengan negara-negara yang pemerintahannya memblokir konten, menyensor kebebasan berekspresi, dan memberhentikan potensi Internet sebagai mesin yang mendukung kebebasan berekspresi dan perdagangan. Secara keseluruhan, kebijakan kebebasan Internet ini dijalankan untuk mendukung pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat yang terbuka.⁸¹

Kemudian pada pidatonya yang kedua mengenai isu ini, Hillary Clinton juga mengangkat visinya mengenai Kebebasan Internet dan mengangkat isu “*dictators dilemma*” yang menjangkiti masyarakat yang tertutup. Rezim-rezim ini harus menentukan apakah mereka memilih untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial dari Internet atau harus ketinggalan berbagai kesempatan itu dalam rangka mengontrol kebebasan berekspresi. Salah satu pengejawantahan kebijakan ini adalah kerjasama Departemen Luar Negeri AS dengan berbagai pemerintahan lain untuk membangun strategi bersama untuk mempertahankan kebebasan sekaligus menjamin keamanan di Internet.⁸²

⁸¹ “21st Century Statecraft,” *Loc. Cit.*

⁸² *Ibid.*

Dalam isu kebebasan Internet, Iran merupakan salah satu negara yang cukup ketat dalam mengontrol penggunaan Internet sejak akses mulai menyebar dari universitas dan badan pemerintahan ke masyarakat umum pada akhir dekade 1990-an. Pada tahun 2009 dan 2010, Iran diperkirakan memiliki pengguna Internet sebesar 33.200.000 jiwa, yang setara dengan sekitar 45% populasi keseluruhan.⁸³ Selain itu, diperkirakan pula bahwa 47 juta orang Iran memiliki telepon seluler dan 60 persen dari populasi berumur di bawah 30 tahun dan terobsesi dengan teknologi.⁸⁴

Iran juga memiliki jumlah *blogger* yang signifikan yang menulis berbagai macam konten, terutama berhubungan dengan isu-isu politik di dalam Iran. Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2009 yang berjudul *2009 Country Reports on Human Right Practices*, pemerintahan Iran memonitor komunikasi yang terjadi melalui Internet, terutama melalui situs-situs *social networking*, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube*, dengan teknologi yang dibeli pada akhir 2008. Dari aktivitas ini, pemerintahan Iran mengancam, mengganggu, dan menangkap orang-orang yang menuliskan komentar-komentar yang mengkritik pemerintahan di Internet. Selain itu, dalam beberapa kasus, dilaporkan bahwa pemerintahan Iran juga menyita paspor dan juga menangkap anggota keluarga pelaku.⁸⁵

Ketika protes berlangsung, pemerintahan Iran juga semakin gencar dalam memonitor penggunaan Internet. Hal ini tidak hanya ditujukan untuk mencari para pendukung oposisi, namun juga orang-orang Iran yang tersebar di seluruh dunia yang mengkritik rezim Ahmadinejad, menurut seorang mantan anggota parlemen Iran. Usaha pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan Iran meliputi pelacakan aktivitas *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube* yang dilakukan oleh orang-orang Iran di seluruh dunia. Mereka yang secara terang-terangan mengkritik pemerintahan Ahmadinejad melaporkan telah mendapatkan ancaman, contohnya keluarga mereka yang masih tinggal di Iran ada yang ditanyai maupun ditahan sementara akibat hal-hal yang mereka

⁸³ "Iran Internet Usage and Telecommunications Report" diakses dari <http://www.internetworldstats.com/me/ir.htm/> pada tanggal 3 Maret 2012, pukul 8.07 WIB.

⁸⁴ Najmeh Bozorgmehr, "Facebook sets tone in Iran's electoral Contest," *Loc. Cit.*

⁸⁵ Patricia Moloney Figliola, Casey L. Addis, dan Thomas Lum, *U.S. Initiatives to Promote Global Internet Freedom: Issues, Policy, and Technology* (CSR Report for Congress, 2011), hlm. 10.

terbitkan di Internet. Sejumlah orang juga diminta untuk menunjukkan akun *Facebook* mereka oleh petugas imigrasi ketika baru tiba di Bandara Internasional Imam Khomeini di Tehran. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa paspor mereka ditahan karena kritik yang telah mereka katakan di berbagai situs *social media*.⁸⁶

Pada bulan November 2009, deputi komandan tentara Iran, Jend. Massoud Jazayeri, menulis sebuah editorial di koran konservatif *Kayhan* bahwa kelompok protes di dalam dan di luar Iran telah diidentifikasi dan akan ditanggulangi pada waktu yang tepat. Selain itu, menteri intelijen Heydar Moslehi telah mengumumkan pelatihan “letnan Internet senior” untuk melawan musuh-musuh virtual Iran secara *online*. Iran juga mengumumkan adanya unit baru beranggotakan 12 orang dalam tentara yang bernama Unit Kriminal Internet untuk melacak individu yang menyebarkan kebohongan dan penghinaan terhadap rezim Ahmadinejad. Pasukan keamanan elit Iran, Garda Revolusi, juga memiliki unit pengawasan Internet yang terpisah untuk melacak aktivis dan tokoh politik yang memiliki pengaruh. Setelah protes pemilihan terjadi, unit-unit pengawasan Internet ini juga melacak aktivitas *online* orang-orang Iran di luar negeri.⁸⁷

Menyikapi keadaan ini, Departemen Luar Negeri AS berusaha untuk membantu para demonstran agar tetap mendapat akses ke Internet, terutama untuk menggunakan perangkat-perangkat yang krusial, seperti *Twitter*. Pandangan akan pentingnya menjamin kebebasan Internet di Iran juga ditekankan oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates yang mengatakan pada bulan Juni 2009 bahwa perangkat *social media*, seperti *Twitter*, memainkan peranan yang krusial dalam mendokumentasikan dan mengkoordinasi protes yang terjadi di Iran. Hal ini menjadi “aset strategis yang besar bagi Amerika Serikat (*huge strategic asset for the United States*),” ungkapnya. Selain karena sifatnya yang membuat informasi sangat sulit untuk dikontrol oleh pemerintahan otoritarian, kemunculan *social media* juga menjadi “kemenangan besar bagi kebebasan di seluruh dunia karena monopoli informasi tidak lagi berada di tangan pemerintahan

⁸⁶ Farnaz Fassihi, “Iranian Crackdown Goes Global” (*Wall Street Journal*, December 3, 2009) diakses dari <http://online.wsj.com/article/SB125978649644673331.html/> pada tanggal 5 Maret 2012, pukul 8.40 WIB.

⁸⁷ *Ibid.*

*(it's a huge win for freedom around the world because this monopoly of information is no longer in the hands of the government).*⁸⁸

Pandangan ini dimanifestasikan oleh Departemen Luar Negeri AS, antara lain, dengan menghubungi *Twitter* untuk menunda *upgrade* dan *maintenance* sistem yang mereka lakukan yang akan memberhentikan layanan perangkat ini pada siang hari bagi rakyat Iran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden AS Barack Obama bahwa suara rakyat Iran harus didengarkan dan tidak justru ditekan. Obama juga menyatakan bahwa dirinya mengutuk seluruh kekerasan yang terjadi dan bahwa dunia sedang melihat Iran yang menginginkan perubahan. Setelah permintaan ini, perusahaan *Twitter, Inc.* mengatakan dalam *blog*-nya bahwa penundaan *upgrade* sistem akhirnya dijalankan karena kegunaan *Twitter* sebagai alat komunikasi yang sangat penting di Iran. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk ikut campur dalam urusan internal Iran, namun sebagai bagian dari misi AS untuk memastikan bahwa suara rakyat Iran dapat didengar dan bahwa *Twitter* telah menjadi bentuk komunikasi yang krusial bagi sebagian besar demonstran.⁸⁹

Selain dengan menghubungi *Twitter*, pemerintahan AS juga mencoba untuk mengirimkan pesannya bagi masyarakat Iran dengan menggunakan video yang berisikan pernyataan Presiden Obama pada hari *Nowruz* atau tahun baru Iran. Dalam video yang diunggah ke *YouTube* pada bulan Maret 2010 ini, Obama mengemukakan bagaimana sejarah antara kedua negara tersebut telah mengalami berbagai masalah, namun dirinya mengharapkan “permulaan baru” dengan Iran. Secara implisit, Obama juga mengkritik aksi pemerintahan Iran dalam menggunakan kekerasan untuk menghentikan protes pemilihan umum yang terjadi. Selain itu, Obama juga menekankan bahwa AS berkomitmen untuk mendukung hak asasi rakyat Iran untuk dapat berbicara dengan bebas, berkumpul tanpa adanya rasa takut, hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil, dan hak untuk mengekspresikan pandangan tanpa adanya ancaman

⁸⁸ Michelle Levi, “Gates Calls Twitter ‘A Huge Strategic Asset’” diakses dari http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-5096183-503544.html/ pada tanggal 29 November 2011, pukul 8.35 WIB.

⁸⁹ Sue Fleming, “U.S. State Department speaks to Twitter over Iran” (Reuters, June 16, 2009) diakses dari <http://www.reuters.com/article/2009/06/16/us-iran-election-twitter-usa-idUSWB01137420090616/> pada tanggal 30 November 2011, pukul 20.15 WIB.

terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya. Video ini telah ditonton lebih dari 100,000 kali dan diterima dengan baik oleh publik Iran.⁹⁰

Rebecca MacKinnon, seorang ahli kebijakan Internet di *New America Foundation*, beranggapan bahwa pemerintahan AS lebih giat dalam mendukung kebebasan Internet di negara-negara yang memiliki hubungan tidak terlalu baik dengan AS, termasuk Iran. Meskipun demikian, dalam berbagai pernyataan, pemerintahan AS menekankan bahwa agenda kebebasan Internet ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim ataupun untuk melemahkan musuh yang AS miliki.⁹¹

II.3.3. Kebijakan *Civil Society 2.0* di bawah *21st Century Statecraft* di Iran oleh Amerika Serikat

Kebijakan *Civil Society 2.0* dicanangkan oleh Hillary Clinton pada pidatonya di Maroko pada November 2009 dengan tujuan untuk mendukung usaha masyarakat sipil di berbagai belahan dunia yang dipercayai dapat membuat komunitas lebih sejahtera dan stabil. Visi yang disampaikan oleh Hillary Clinton mengenai hal ini adalah untuk membangun kapasitas teknis dari organisasi masyarakat sipil untuk mencapai misi mereka dengan menggunakan teknologi koneksi. Kebijakan *Civil Society 2.0* bertujuan untuk memberikan organisasi-organisasi ini alat teknologi serta sukarelawan yang ahli untuk membantu meningkatkan tingkat melek digital, memperkuat jaringan informasi dan komunikasi berbagai NGO, dan memperkuat implikasi dari gerakan masyarakat sipil. Alat-alat yang diberikan jumlahnya beragam, mulai dari yang sederhana seperti situs Web dan SMS sampai sistem manajemen konten dan platform *social media*—semuanya dipercayai dapat menjadi katalis yang kuat bagi pertumbuhan kelompok-kelompok masyarakat sipil.⁹²

⁹⁰ "Remarks of President Obama Marking Nowruz | The White House" diakses dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-marking-nowruz/> pada tanggal 30 November 2011, pukul 20.55 WIB.

⁹¹ Mary Beth Sheridan, "U.S. warns against blocking social media, elevates Internet freedom policies" (*The Washington Post*, January 28, 2011) diakses dari http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/28/AR2011012804554_2.html?sid=ST2011012806871 pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 23.08 WIB.

⁹² "21st Century Statecraft," *Loc. Cit.*

Kebijakan *Civil Society 2.0* yang berusaha diterapkan oleh AS di Iran pada masa protes Iran adalah dengan memberikan bantuan terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil—dalam hal ini, yang ikut andil dalam protes Iran—dengan memberikan sokongan teknologi dan akses sehingga mereka dapat menggunakan Internet untuk mengorganisasikan gerakan serta menyebarkan informasi tentang protes yang berlangsung.

Terdapat beberapa bentuk implementasi kebijakan ini. Hal pertama yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan aplikasi Internet di AS yang digunakan secara global. Salah satunya adalah *Twitter*, sebuah situs *social networking* di mana penggunaanya dapat menerbitkan pesan pendek maksimal 140 karakter di dalam akun yang dimiliki sehingga bisa menyebarkan pesan tersebut dengan cepat kepada siapapun yang memiliki akses Internet.

Pada tahun 2009, para demonstran di Iran yang memprotes hasil pemilihan umum di sana menggunakan *Twitter* sebagai media untuk menyebarkan informasi mengenai keadaan di sana ke seluruh penjuru dunia. Namun, di tengah-tengah masa krisis di Iran, *Twitter* dijadwalkan untuk menjalani perawatan—sehingga harus ditutup. Departemen Luar Negeri AS melalui Jared Cohen, staf perencanaan kebijakan Departemen Luar Negeri, dan Alec Ross, penasihat senior untuk inovasi bagi Menteri Luar Negeri pun melakukan intervensi untuk mendukung kebebasan informasi. Keduanya menghubungi Jack Dorsey, pemilik *Twitter*, dan mendorongnya untuk tetap membiarkan *Twitter* *online* agar suara para demonstran di Iran masih dapat didengar. Para eksekutif *Twitter* pun menuruti keinginan pemerintah AS ini, dan *Twitter* akan *offline* untuk perawatan pada dini hari waktu Iran, sehingga tidak akan mengganggu arus informasi yang datang dari negara ini.⁹³

Bentuk implementasi yang kedua adalah dengan mendukung pengembangan perangkat lunak (*software*) bernama *Haystack* yang diciptakan oleh perusahaan yang bernama sama. Perangkat ini dapat digunakan sebagai alat anti-sensor terhadap situs-situs yang diblokir oleh pemerintahan Iran. *Haystack* mulai mendapat berbagai sorotan

⁹³ Sam duPont, "Reflections on 21st Century Statecraft," *Loc. Cit*;

setelah pemerintahan Iran berusaha untuk memblokir transmisi video, *e-mail*, dan alat komunikasi lainnya yang menggambarkan protes pemilihan umum. Berkat hal ini, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, serta Departemen Perdagangan telah menyetujui diekspornya *Haystack* ke Iran. Persetujuan ini diperlukan karena AS menerapkan sanksi perdagangan terhadap Iran. Namun, pengembangan perangkat ini dihentikan di tengah jalan pada September 2010 karena ditengarai terdapat sistem keamanan yang lemah, yang justru dapat membahayakan penggunaannya dengan mengekspos identitas yang dimilikinya.⁹⁴

Dalam suatu wawancara, pendiri *Haystack*, Austin Heap, mengatakan bahwa adanya kekhawatiran mengenai cara kerja dan keamanan dari perangkat lunak yang dikembangkannya merupakan hal yang valid. Keputusan ini diambil setelah Evgeny Morozov menulis di *Foreign Policy* bahwa sistem keamanan *Haystack* yang lemah justru akan membahayakan pengguna di Iran karena dapat mengekspos diri mereka kepada otoritas pemerintahan. Morozov mengkritik keputusan pemerintahan Amerika Serikat dalam mendukung teknologi ini tanpa terlebih dahulu benar-benar memeriksa risiko yang dapat dihadirkan oleh perangkat ini, terutama bagi para pengguna di Iran.⁹⁵

Bentuk *engagement* terakhir yang dilakukan adalah melalui *virtual embassy* bagi publik Iran (<http://iran.usembassy.gov/index.html>) dengan tujuan untuk memperkenalkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat bagi masyarakat Iran. Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sejak tahun 1980, setelah terjadi krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Tehran pada tahun 1979, yang berlanjut hingga 1981. Kedutaan virtual ini memiliki tujuan untuk meningkatkan *outreach* dan dialog antara masyarakat Amerika dan Iran. Rencana untuk membuka “kedutaan besar virtual” ini telah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pada akhir Oktober 2011. Hillary Clinton menyebutkan bahwa *virtual embassy* ini, antara lain, akan memberikan publik Iran informasi *online* mengenai visa dan program pertukaran pelajar meskipun tidak ada hubungan diplomatik yang formal

⁹⁴ Cecilia Kang, “Haystack stops tests of iran anti-censor software amid security concerns” diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/13/AR2010091305827.html> pada tanggal 1 Februari 2012, pukul 14.44 WIB.

⁹⁵ *Ibid.*

antara kedua negara tersebut. Hillary Clinton mengatakan bahwa AS telah menyediakan teknologi dan pelatihan untuk membantu masyarakat Iran dalam memberhen batasan pemerintahan terhadap Internet dan bentuk komunikasi yang lain dan pada saat yang bersamaan, juga memperluas **sanksi** terhadap Tehran (hal ini berkaitan dengan plot untuk membunuh duta besar Saudi Arabia di Washington yang diindikasikan berhubungan dengan pemerintahan di Tehran, **serta masalah nuklir Iran**).⁹⁶

Namun, pada tanggal 7 Desember 2011, hanya 24 jam setelah situs ini dibuka untuk umum, pemerintahan Iran memutuskan untuk memblokir akses ke situs ini dari dalam Iran. Kantor berita Fars melaporkan bahwa pemblokiran ini merupakan “reaksi oleh otoritas Iran terhadap plot terbaru yang dilakukan oleh Washington terhadap bangsa Iran.” Laporan Fars juga menyebutkan bahwa situs ini pada akhirnya akan tidak efektif karena hanya akan berfungsi sebagai *website* sosial tanpa adanya hasil yang terukur bagi AS. Terhadap kebijakan pemerintahan Iran ini, Gedung Putih mengeluarkan komentar bahwa pemblokiran ini menunjukkan determinasi Iran untuk menciptakan “*electronic curtain of surveillance and censorship around its people* (pagar elektronik dalam bentuk pengawasan dan sensor bagi masyarakatnya).”⁹⁷

II.4. 21st Century Statecraft dan Revolusi Mesir (2011)

Di dalam bagian ini, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang revolusi yang terjadi di Mesir pada tahun 2011 dan pengaruh dari penggunaan teknologi informasi terhadap usaha revolusi yang dijalankan di negara ini. Setelahnya, penulis akan menjelaskan implementasi kebijakan diplomasi digital Amerika Serikat dalam kasus ini.

II.4.1. Revolusi Mesir (2011) dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

⁹⁶ Andrew Quinn, “U.S. plans ‘virtual embassy’ for Iran, say Clinton” (26 October 2011), diakses dari <http://english.alarabiya.net/articles/2011/10/26/173911.html/> pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 10.14 WIB.

⁹⁷ J. David Goodman, “Iran Shuttters U.S. Embassy on the Web” (December 7, 2011), diakses dari <http://www.nytimes.com/2011/12/08/world/middleeast/iran-shuttters-us-embassy-on-the-web.html/> pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 09.46 WIB.

Pergolakan sosial di dunia Arab dimulai pada akhir Desember 2010 yang ditandai dengan gerakan *Jasmine Revolution* di Tunisia, yang berhasil menjatuhkan rezim diktatorial Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Semangat revolusi ini kemudian mulai ditiru oleh masyarakat Mesir yang berusaha untuk menjatuhkan rezim pemerintahan Presiden Hosni Mubarak yang telah memimpin selama hampir 30 tahun sejak pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada 16 Oktober 1981. Kemarahan masyarakat Mesir terhadap rezim ini terutama disebabkan oleh sifatnya yang semakin otoriter. Ketika baru naik menjadi Presiden, Mubarak memberlakukan *Emergency Law* yang pada awalnya ditujukan untuk melawan terorisme setelah pembunuhan Sadat. Namun, dalam pelaksanaannya, hukum ini sering disalahgunakan, di mana polisi dapat menangkap orang tanpa adanya tuduhan, memenjarakan tahanan tanpa melewati proses pengadilan, pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta mendirikan pengadilan keamanan khusus. Tidak hanya itu, tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan korupsi di pemerintahan juga membuat masyarakat mulai resah. Kemudian Mohamed ElBaradei, mantan ketua *International Atomic Energy Agency* (IAEA) secara terang-terangan menantang kepemimpinan otoriter Mubarak. ElBaradei pun mulai mendapat simpati dari masyarakat yang mulai menyusun gerakan-gerakan demi menjatuhkan Mubarak dari kursi kepemimpinannya.⁹⁸

Dari sinilah berbagai protes akan kepemimpinan Mubarak muncul melalui penggunaan *social media*, seperti *Facebook* dan *Twitter*. Salah satu inisiatif yang terkenal adalah sebuah *Facebook group* berjudul “*We Are Khaled Said*” yang dibuat oleh seorang eksekutif Google bernama Wael Ghonim. Khaled Said adalah seorang pebisnis Mesir yang pada pertengahan tahun 2010 mendapat meninggal akibat serangan dari polisi setelah Said mencoba merekam aksi polisi ini ketika sedang membagi marijuana hasil sitaan di antara mereka. *Group* ini dibuat untuk mengenang Said yang menjadi korban dari kekerasan negara, yang kemudian dikembangkan menjadi tempat bagi warga Mesir untuk melaporkan tindakan polisi yang sewenang-wenang dan

⁹⁸ “Egypt News – Revolution and Aftermath” diakses dari <http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/egypt/index.html/> pada tanggal 17 Mei 2011, pukul 20.34 WIB

korupsi yang dilakukan oleh negara. Inisiatif Ghonim inipula yang menjadi medium untuk merencanakan dan mengorganisasikan protes bagi para warga Mesir. Dirinya mengatakan bahwa, “*Without the Internet, this revolution would not have happened.*”⁹⁹

Berbekal pendukung yang ada di laman Facebook tersebut, Ghonim dan aktivis-aktivis mulai menginisiasi diadakannya protes besar-besaran oleh masyarakat untuk menuntut mundurnya Presiden Mubarak. *Social media* kemudian digunakan untuk merencanakan dan mengorganisasi demonstrasi yang akan dilaksanakan di kota-kota besar di Mesir. Di *Twitter*, aktivis seperti Gigi Ibrahim (yang memiliki nama akun @Gsquare86), mulai menggunakan *hashtag* #25jan untuk menandakan bahwa gerakan masyarakat ini akan mulai dijalankan pada tanggal 25 Februari 2011. Pada hari itu, ribuan rakyat Mesir berbondong-bondong menjalankan protes di jalan. Meskipun pada dasarnya mereka tidak terorganisasi secara resmi, namun mereka memiliki motivasi dan semangat yang sama, yaitu untuk menghentikan rezim otoriter Mubarak.

Setelah demonstrasi dilakukan selama hampir tiga minggu sejak tanggal 25 Januari 2011, akhirnya Hosni Mubarak turun sebagai presiden Mesir dan memberikan tampuk kepemimpinannya kepada militer pada tanggal 11 Februari 2011.¹⁰⁰ Dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh para aktivis di Mesir untuk melaksanakan transisi politik di negaranya tidak sia-sia, dan harapan bagi Mesir yang lebih demokratis di masa depan pun kembali dimiliki oleh setiap warganya.

Peran penggunaan *social media* dalam gerakan revolusi Mesir ini dapat dikategorikan ke dalam tiga cakupan besar:

1. Mengorganisasi Demonstrasi¹⁰¹

Facebook dan *Twitter* digunakan oleh para masyarakat untuk mengorganisasi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25 Januari 2011 di

⁹⁹ “Egypt’s Revolution by Social Media” diakses dari <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703786804576137980252177072.html/> pada tanggal 17 April 2011, pukul 23.45 WIB.

¹⁰⁰ Jeremy M. Sharp, *Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. Foreign Policy* (CSR Report for Congress, 2011), hlm. 1.

¹⁰¹ E.B. Boyd, “How Social Media Accelerated the Uprising in Egypt” diakses dari <http://www.fastcompany.com/1722492/how-social-media-accelerated-the-uprising-in-egypt/> pada tanggal 17 April 2011, pukul 20.56 WIB.

Kairo, Alexandria, dan beberapa kota Mesir lainnya. Melalui outlet *social media* ini, jumlah orang yang sadar akan adanya gerakan ini mulai berkumpul dan membentuk gerakannya masing-masing. Para pengguna *Twitter*, contohnya, menggunakan *hashtag* #jan25 untuk menandai dimulainya protes terhadap rezim Mubarak. Bahkan revolusi ini sering dijuluki sebagai *Facebook Revolution*, akibat media yang digunakan untuk mengorganisasinya.

2. Menyebarkan Informasi¹⁰²

Facebook, *Twitter*, *YouTube*, dan perangkat *social media* lainnya digunakan untuk menyebarkan informasi—baik mengenai apa yang terjadi di lapangan ketika para demonstran melakukan protes-protes maupun penyebab kemarahan mereka terhadap rezim Mubarak. *Social media* juga menjadi pengganti bagi media tradisional yang dikontrol ketat oleh negara. Sebagai hasilnya, muncul para *citizen journalists*, yang melaporkan pandangan mata mereka.

3. Menarik Perhatian Internasional

Dalam poin ini, terdapat dua bagian. *Pertama*, penyebaran informasi melalui *social media* menarik perhatian dari media berita internasional, mulai dari *Associated Press* dan *New York Times* hingga CNN dan Al-Jazeera. Dengan *social media* pula, para demonstran mencoba untuk membentuk narasi bahwa protes yang mereka lakukan tidak bersifat anarkis seperti yang dicoba digambarkan oleh rezim Mubarak itu sendiri. Seorang blogger Mesir, misalnya, mendorong media internasional untuk menggunakan kata-kata seperti “*revolt*” dan “*uprising*” alih-alih “*chaos*” dan “*unrest*.”¹⁰³

Kedua, melalui *social media*, para aktivis mulai mencoba untuk menekan pemerintah negara-negara lain untuk mendukung aksi yang mereka lakukan, terutama pemerintahan Amerika Serikat yang selama ini menganggap Mesir sebagai sekutu terdekatnya di Timur Tengah. Pada awalnya, Washington tidak mengemukakan pernyataan apa-apa mengenai protes yang terjadi di Mesir,

¹⁰² “Egypt’s Revolution by Social Media,” *Loc. Cit.*

¹⁰³ E.B. Boyd, “How Social Media Accelerated the Uprising in Egypt,” *Loc. Cit.*

namun dengan semakin banyaknya informasi yang keluar dari negara ini melalui *Twitter*, *YouTube*, dan sebagainya, Washington tidak dapat lagi menutup matanya dan perlahan-lahan mulai mengubah pendirian mereka, di mana para pejabat pemerintahan AS, termasuk Presiden Barack Obama sendiri, mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan untuk dilaksanakannya transisi politik di negara ini.¹⁰⁴

II.4.2. Kebijakan Mendukung Kebebasan Internet (*Internet Freedom*) di bawah 21st Century Statecraft di Mesir oleh Amerika Serikat

Namun, di lain sisi, penggunaan *social media* ini telah membuat pemerintah Mesir sendiri sadar akan ancaman yang dapat muncul. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran Evgeny Morozov bahwa rezim-rezim otoriter justru akan menggunakan Internet sebagai jalan baru untuk lebih memonitor kegiatan warganya. Tiga hari setelah dimulainya protes, pemerintah Mesir memblokir hampir seluruh akses Internet serta layanan telepon seluler di berbagai penjuru Mesir.¹⁰⁵ Tujuan dari pemblokiran akses Internet yang dilakukan oleh pemerintahan Mesir ini cukup jelas, yaitu untuk mempersulit kemampuan para demonstran untuk mengorganisasi diri mereka. Tetapi pada kenyataannya, walaupun 88 persen akses Internet di negara ini diblokir, demonstrasi dan protes tetap berlangsung. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada hari Jumat setelah akses Internet ditutup yang dijuluki sebagai “*Day of Wrath*.” Karena tidak memiliki akses terhadap alat-alat *social media* yang mereka gunakan, para demonstran menggunakan alat *networking* yang tradisional, yaitu mesjid, di mana orang-orang ini berkumpul untuk merencanakan aksi mereka selanjutnya.¹⁰⁶

Tindakan pemblokiran akses Internet yang dijalankan oleh pemerintah Mesir ini pun kemudian mendapatkan *backlash* dari beberapa kelompok *hacker*. Satu kelompok

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Noam Cohen, “Egyptians Were Unplugged, and Uncowed” diakses dari <http://www.nytimes.com/2011/02/21/business/media/21link.html/> pada tanggal 17 Desember 2011, pukul 23.35 WIB.

¹⁰⁶ Spencer Ackerman, “Egypt’s Internet Shutdown Can’t Stop Mass Protests” diakses dari <http://www.wired.com/dangerroom/2011/01/egypts-internet-shutdown-cant-stop-mass-protests/> pada tanggal 31 Mei 2011, pukul 14.47 WIB.

“*hactivist*” yang bernama Anonymous berhasil meng-*hack* dan menutup situs Web yang dimiliki oleh Kementerian Informasi Mesir dan juga Partai Demokratik Nasional yang merupakan basis pendukung Mubarak. Sumber dari kelompok *hacker* ini menyatakan kepada media bahwa serangan yang mereka lakukan ini merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung gerakan antipemerintah yang sedang berlangsung.¹⁰⁷ Selain aktivitas *hacker* yang menyerang situs-situs pemerintah ini, sebagian penduduk Mesir berhasil menggunakan aplikasi dan *proxy* tertentu untuk mengakses *Twitter* dan memberitakan kondisi yang mereka hadapi melalui akun *Twitter* mereka masing-masing.¹⁰⁸

Pemblokiran Internet yang dilakukan oleh pemerintahan Mesir ini dilihat sebagai tantangan bagi usaha Amerika Serikat dalam mempromosikan kebebasan Internet. Sehari sebelum pemblokiran mulai dilakukan pada 28 Januari 2011, Hillary Clinton secara umum telah meminta Mesir untuk tidak menutup akses ke teknologi dan *social media* yang digunakan untuk mengorganisasi demonstrasi. Setelah ternyata akses diblokir, pemerintahan AS melihat aksi ini sebagai sesuatu yang disayangkan. Melalui sebuah *tweet*, juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs, menyatakan bahwa pemerintahan Mesir harus menghormati hak rakyatnya dan kembali menghidupkan akses Internet. Kemudian, Alec Ross mewakili Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan bahwa, meskipun *social media* dan Internet tidak serta-merta menjamin keberhasilan revolusi, namun platform semacam ini telah meningkatkan kecepatan dan efektivitas dari berbagai gerakan protes yang bermunculan. Ross menuturkan bahwa berangkat dari revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, berbagai gerakan revolusi akan menjadikan teknologi sebagai salah satu komponen utamanya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ “Hackers Take Down Government Websites in Egypt and Yemen” diakses dari <http://mashable.com/2011/02/03/hackers-egypt/> pada tanggal 31 Mei 2011, pukul 14.06 WIB.

¹⁰⁸ John Leyden, “Anon hackers join Egyptian protests” diakses dari http://www.theregister.co.uk/2011/01/27/anonymous_egyptian_protest/ pada tanggal 31 Mei 2011, pukul 15.12 WIB.

¹⁰⁹ Mary Beth Sheridan, “U.S. warns against blocking social media, elevates Internet freedom policies” (*The Washington Post*, January 28, 2011) diakses dari http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/28/AR2011012804554_2.html?sid=ST2011012806871 pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 23.08 WIB.

Kebebasan Internet di sini memegang peranan penting karena makin signifikannya angka pengguna Internet di negara ini. Berdasarkan statistik PBB, jumlah pengguna Internet naik dari 1 persen menjadi 21 persen dari populasi dari awal hingga akhir dekade 2000-an. Pengguna Internet yang aktif terutama populasi muda, berpendidikan, dan tinggal di kota-kota besar Mesir, yang telah menjadi pusat dari protes anti-pemerintahan yang berlangsung. Selain itu, diperkirakan terdapat 160.000 *blogger* di Mesir yang berpengaruh dalam membahas masalah-masalah yang selama ini dianggap tabu di kalangan masyarakat, seperti isu militer.¹¹⁰

II.4.3. Kebijakan *Civil Society 2.0* di bawah *21st Century Statecraft* di Mesir oleh Amerika Serikat

Meskipun tidak diimplementasikan secara penuh pada kasus revolusi Mesir, Departemen Luar Negeri AS memiliki rencana untuk menyediakan program-program anti-sensor bagi para aktivis untuk mencegah akses Internet dari sensor atau aktivitas *hacking* yang dijalankan oleh pemerintah. Pada bulan Januari 2011, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan rencananya untuk menggunakan dana sebesar US\$30 juta pada program pelatihan anti-sensor untuk aktivis, serta menyediakan teknologi berbasis Web untuk membantu aktivis dalam menghindari pemblokiran akses Internet yang dilakukan oleh pemerintah. Dana ini disetujui oleh Kongres AS pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan sebesar 600% dibandingkan tahun 2010.¹¹¹

Selain dengan menyediakan peralatan untuk menghalang pemblokiran Internet, sebagai bentuk kebijakan *Civil Society 2.0*, Departemen Luar Negeri AS juga mendukung pengembangan perangkat lunak bernama *Ushahidi* (yang berarti “pengakuan” dalam bahasa Swahili), yang ditujukan untuk pengumpulan data, visualisasi data, dan pemetaan interaktif. *Ushahidi* pertama kali muncul sebagai situs Web pada awal 2008 untuk memetakan laporan mengenai kekerasan yang terjadi di Kenya pasca-pemilihan umum di sana. Laporan-laporan ini datang dari berbagai

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

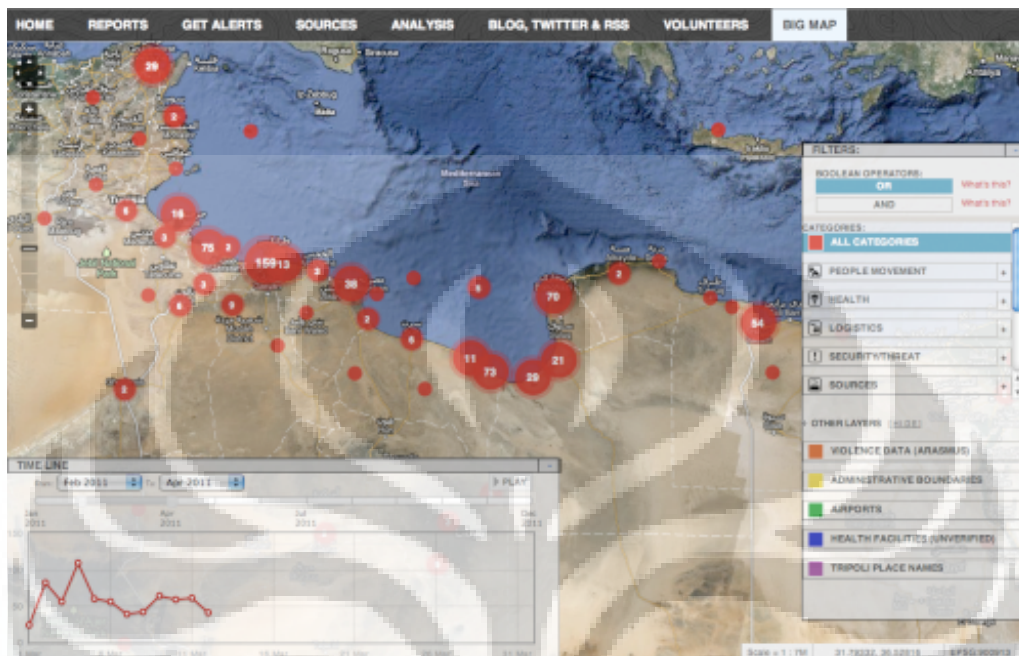
pengguna yang dipandang sebagai *citizen journalist* melalui Internet maupun telepon seluler. Pada saat itu di Kenya, *website* ini memiliki pengguna yang mencapai 45.000 orang, yang menjadi katalis bagi pengembangan perangkat ini ke depannya.¹¹² Melalui inisiatif *Civil Society 2.0*, Departemen Luar Negeri AS mendukung pengembangan *Ushahidi*, sehingga dapat dipakai di negara-negara lain.¹¹³

Pada saat revolusi Mesir berlangsung, *Ushahidi* juga memainkan peranan yang penting sebagai alat komunikasi bagi kelompok-kelompok yang terlibat. Ketika itu, sebuah peta Mesir dibentuk melalui perangkat ini oleh *Development and Institutionalization Support Center* (DISC) di Kairo dan diberi nama "*U-shahid*" yang berarti "kamu menjadi saksi" dalam bahasa Arab. Peta ini digunakan untuk mengawasi jalannya demonstrasi yang terjadi pada saat revolusi terjadi. Beberapa hal yang menarik mengenai peta *U-shahid* ini, menurut sebuah artikel yang dikeluarkan oleh *developer Ushahidi* adalah 1) adanya kesadaran DISC bahwa peta yang mereka buat dapat diblokir oleh pemerintahan dan membahayakan keselamatan mereka; 2) peta yang dibuat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat Mesir; 3) peta ini dihubungkan dengan situs *social media*, terutama *Twitter* dan *Facebook*, sehingga mudah untuk berbagi informasi mengenai insiden yang terjadi di tengah-tengah deomonstrasi; 4) halaman utama peta secara otomatis menunjukkan foto dan video dari kejadian yang ada sehingga menjadi sumber informasi yang bernilai mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan; 5) layanan peringatan melalui *e-mail* dan SMS menginformasikan pengguna akan laporan-laporan baru berdasarkan kategori tertentu, seperti kekerasan terhadap demonstran, atau lokasi spesifik, seperti *Tahrir Square*; dan 6) ketika Internet diblokir di Mesir, peta ini juga menjadi *offline* karena *server*-nya terletak di Kairo.¹¹⁴

¹¹² "Ushahidi: About Us" diakses dari <http://ushahidi.com/about-us/> pada tanggal 20 Maret 2012, pukul 23.45 WIB.

¹¹³ E.B. Boyd, "State Department is Trying to Make a Thousand Ushahidis Bloom" (*Fast Company - Co. Exist*, 19 September 2011) diakses dari <http://www.fastcoexist.com/1677975/state-department-is-trying-to-make-a-thousand-ushahidis-bloom/> pada tanggal 20 Maret 2012, pukul 23.57 WIB.

¹¹⁴ "Mapping the Egypt Protests and Libya Crisis" (Ushahidi Blog, April 7, 2011) diakses dari <http://blog.ushahidi.com/index.php/2011/04/07/mapping-egypt-and-libya/> pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 8.57 WIB.



Gambar II.1.

Pemetaan *U-shahid* terhadap demonstrasi yang terjadi saat Revolusi Mesir 2011
(Sumber: <http://blog.ushahidi.com/index.php/2011/04/07/mapping-egypt-and-libya/>)

Selain peta di atas, *Arabic Network for Human Rights Information* (ANHRI) juga mengembangkan peta *CrowdMap* yang menggambarkan bagaimana protes berlangsung pada 25 Januari 2011. Pemetaan ini bertujuan untuk memperlihatkan di kota-kota mana saja di Mesir, gerakan revolusi mulai dijalankan, sehingga akan memudahkan para demonstran untuk mengorganisasikan dirinya. Selain itu, pemetaan ini juga digunakan untuk mengkoordinasikan sukarelawan yang dapat membantu bila terjadi krisis di tengah-tengah protes yang berlangsung.¹¹⁵

¹¹⁵ "Crowdmapping Egypt #Jan25" (Ushahidi Blog, February 7, 2011) diakses dari <http://blog.ushahidi.com/index.php/2011/02/07/crowdmapping-egypt-jan25/> pada tanggal 21 Maret 2011, pukul 9.05 WIB.

BAB III

ANALISIS PERAN DAN IMPLIKASI 21ST CENTURY STATECRAFT DALAM KASUS PROTES IRAN DAN REVOLUSI MESIR TERHADAP PENYELENGGARAAN *SOFT POWER* AMERIKA SERIKAT

Bab ini akan menjabarkan mengenai peran-peran dari kebijakan *21st Century Statecraft* yang dijalankan oleh AS yang akan menjadi temuan utama dari penelitian ini. Hal-hal tersebut adalah: 1) pembentukan *image* serta narasi di publik bahwa AS mendukung perjuangan yang mereka lakukan; 2) penyediaan dukungan jaringan dan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu pengejawantahan dari dukungan tersebut; dan 3) memastikan tetap terjaganya kebebasan Internet di negara lain. Sifat dan *outcome* yang berbeda dari kedua studi kasus akan menjadi pengukur mengenai situasi apakah yang menentukan keberhasilan dari implementasi diplomasi digital AS.

Kemudian, dari peran-peran ini, penulis akan melihat apakah AS telah dapat mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dalam kasus protes Iran dan revolusi Mesir dengan melihat implikasi-implikasi yang dihasilkan oleh kebijakan *21st Century Statecraft* terhadap situasi di kedua negara tersebut, berdasarkan temuan-temuan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

Terakhir, dengan berdasarkan peran dan pencapaian AS melalui strategi diplomasi digital-nya dalam kedua kasus, penulis akan melihat implikasinya terhadap penyelenggaraan *soft power* AS dan mengapa diplomasi digital menjadi signifikan untuk dijadikan sebagai salah satu perangkat diplomasi negara ini.

III.1. Peran *21st Century Statecraft* oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Penyelenggaraan *Soft Power* Amerika Serikat

Dalam bagian ini, penulis akan menganalisis bagaimana kasus Iran dan Mesir menggambarkan peran kebijakan *21st Century Statecraft* yang dijalankan oleh Amerika Serikat terhadap penyelenggaraan *soft power* negara ini. Penulis mengidentifikasi **tiga peran utama** yang ada, yaitu 1) pembentukan pesan dan narasi mengenai dukungan Amerika Serikat bagi publik internasional, yang diwakili oleh gerakan-gerakan

masyarakat yang muncul di Iran dan Mesir; 2) penyediaan dukungan terhadap jaringan dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi, yang lebih difokuskan pada perangkat teknologi; dan 3) penyediaan dukungan terhadap kebebasan Internet bagi masyarakat sipil.

III.1.1. Pembentukan Pesan dan Narasi mengenai Amerika Serikat bagi Publik Internasional

Peran pertama yang dimainkan oleh *21st Century Statecraft* terhadap penyelenggaraan *soft power* Amerika Serikat adalah dengan membentuk pesan dan narasi mengenai Amerika Serikat bagi publik internasional, dalam hal ini, yaitu Iran dan Mesir. Pierre Cyril Pahlavi mengemukakan bahwa terdapat tiga alasan dilakukannya diplomasi publik, yaitu untuk membentuk hubungan dengan publik internasional yang didasarkan pada kepercayaan dan empati; mempengaruhi kelompok-kelompok penting dalam suatu masyarakat; dan membantu pencapaian kepentingan nasional.¹¹⁶

Dari pernyataan Pahlavi di atas dapat dikatakan, bahwa dalam hal ini Amerika Serikat berusaha untuk menyampaikan pesan dan narasi bahwa AS mendukung nilai-nilai kebebasan dan demokrasi di negara lain, yang melalui *21st Century Statecraft*, diterjemahkan ke dalam nilai kebebasan Internet. Dengan menjalankan *21st Century Statecraft* yang ditujukan kepada publik di Iran dan Mesir, AS mencoba untuk menyampaikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan kebebasan harus dijunjung. Selain itu, dengan menyediakan teknologi baru bagi gerakan-gerakan masyarakat, AS juga ingin mencintrakan bahwa dirinya mendukung pembangunan negara-negara ini, terutama dengan mengembangkan sektor-sektor masyarakatnya.

Bila dikaitkan dengan konsep *network society* oleh Manuel Castells, kapasitas dari jaringan Internet yang sangat besar telah memungkinkan terjadinya komunikasi yang spontan, tidak terorganisasi, dan memiliki tujuan dan keanggotaan yang berbeda-beda. Di sini kepentingan negara mengambil peranan dalam usahanya untuk memperluas

¹¹⁶ Pierre C. Pahlavi, *Cyber-Diplomacy: A New Strategy of Influence* (Paper presented to the Canadian Political Science Association General Meeting, 2003) diakses dari <http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/1822/pahlavi.pdf/> pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 15.50 WIB.s

penggunaan jaringan dengan membangun pesan dan peserta yang semakin beragam, yang pada akhirnya akan membangun *critical mass* yang semakin tinggi pula.¹¹⁷

Dengan adanya anggapan inilah, maka AS mengembangkan strategi diplomasi digital agar dapat menjangkau masyarakat-masyarakat internasional dengan lebih efektif guna menyampaikan pesan-pesan serta narasi mengenai citra yang ingin dibangun mengenai negaranya.

Selain itu, melihat penggunaan teknologi informasi di Iran dan Mesir (serta negara-negara lain di dunia) didominasi oleh generasi muda, ada nilai lebih yang dapat digunakan oleh AS dalam strateginya ini. Menurut Clay Shirky dalam bukunya *Cognitive Surplus*, generasi muda sekarang menggunakan Internet serta teknologi *social media* untuk berbagai macam tujuan, mulai dari pembangunan komunitas, kelompok dukungan (*support group*), kampanye, sampai sebagai tempat di mana orang-orang dengan kepentingan yang sama dapat bergabung tanpa harus tersendat oleh jarak fisik. Meskipun demikian, Shirky melihat bahwa dunia *cyber* yang tercipta akibat berbagai kemajuan teknologi ini tidak hanya menjadi alat, namun juga sebagai ruang publik (*public space*), yang sama pentingnya dengan ruang fisik. Meskipun tetap mengakui adanya perbedaan antara mereka yang beraktivitas di ruang *cyber* maupun ruang fisik, generasi muda sekarang melihat keduanya ebbagai sesuatu yang sama. Keikutsertaan dalam komunitas virtual dilihat sama pentingnya—dan juga memberikan dampak yang signifikan—dengan aktivitas yang ada di dunia nyata. Bagi generasi muda, dunia virtual telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama dengan semakin gencarnya penggunaan Internet dan *social media* di berbagai belahan dunia.¹¹⁸ Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Iran dan Mesir, memang generasi muda di kedua negaralah yang aktif menggerakkan demonstrasi lewat *social media* dan berbagai perangkat teknologi yang lain. Dan di sinilah, Amerika Serikat melihat adanya kesempatan untuk memberikan bantuan dan melakukan *engagement* dengan mereka.

¹¹⁷ Manuel Castells, *The Rise of Network Society: The Information Age: Economic, Society, and Culture*, Volume I (West Sussex: Blackwell, 2000), hlm. 385.

¹¹⁸ Clay Shirky, *Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age* (New York: The Penguin Press, 2010), hlm. 90.

Tetapi penulis juga melihat bahwa hal ini tidak akan selamanya lancar karena ada tantangan-tantangan lain, yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya (misalnya, kontrol pemerintahan yang sangat ketat di Iran terhadap infrastruktur teknologi informasi di negaranya). Selain itu, strategi diplomasi digital masih bersifat komplementer dalam keseluruhan strategi diplomasi yang dijalankan oleh AS. Tetapi sebagai bentuk diplomasi publik, *21st Century Statecraft* cukup berhasil dalam memastikan penyebaran pesan dengan mengutilisasi teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Melihat argumen Shirky di atas mengenai penggunaan Internet oleh generasi muda, maka strategi diplomasi digital AS ini tepat untuk ditujukan kepada generasi muda di negara-negara lain, yang dengan aktif menggunakan peralatan-peralatan ini dalam kegiatan sehari-harinya. Dan hal ini dapat diutilisasi dengan baik untuk membentuk pesan dan narasi mengenai kontribusi AS di tataran internasional dengan menggunakan pendekatan *21st Century Statecraft*, meskipun tetap tergantung pada kondisi di tiap-tiap negara yang dituju.

Selain itu, dengan pembentukan pesan ini, maka Amerika Serikat juga dapat menarik perhatian (*entice and attract*) publik di negara lain dengan lebih efektif, terutama karena pesan-pesan seperti kebebasan Internet memiliki resonansi yang cukup besar bagi generasi muda di berbagai belahan dunia.

III.1.2. Penyediaan Dukungan Jaringan dan Kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peran kedua yang dimainkan oleh *21st Century Statecraft* adalah penyediaan dukungan jaringan dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bab II, penulis telah menjelaskan secara lebar mengenai bagaimana AS mendukung gerakan-gerakan masyarakat melalui inisiatif *Civil Society 2.0* dengan menyediakan dukungan bagi jaringan (misalnya dengan mengembangkan perangkat-perangkat lunak untuk menembus pemblokiran Internet yang dilakukan oleh pemerintah) maupun kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi (seperti pengembangan aplikasi *Ushahidi* yang dipakai untuk memetakan demonstrasi yang terjadi di Mesir).

Hal ini menjadi penting karena peranan yang dimainkan oleh Internet dan *social media* bagi masyarakat dunia secara luas. Dalam artikelnya, "The Political Power of Social Media," Clay Shirky melihat bahwa sejak meningkatnya penggunaan Internet mulai dari awal dekade 1990-an, *social media* telah menjadi suatu "*fact of life*" bagi masyarakat sipil di berbagai belahan dunia, dan juga melibatkan banyak aktor--mulai dari warga negara biasa, aktivis, organisasi non-pemerintahan (NGO), perusahaan telekomunikasi, penyedia perangkat lunak, hingga pemerintahan. Menurut Shirky, hal ini mendorong pemerintahan AS untuk merespon dengan seperangkat kebijakan baru yang merefleksikan perubahan ini.¹¹⁹

Kembali lagi ke konsep *network society* yang dikemukakan oleh Castells, dengan adanya jaringan yang kokoh baik itu antar-negara, antar-masyarakat, maupun antara negara dan masyarakat, *critical mass* dapat dibangun untuk mendukung terjadinya proses perubahan sosial. Dan dengan adanya Internet, proses perubahan sosial ini terjadi di ruang publik baru yang dibentuk oleh jaringan-jaringan komunikasi, terutama *social media*, yang ditunjukkan dengan peningkatan penggunaan *Twitter* dan *Facebook*.

Mengapa AS berusaha untuk menyediakan akses ke berbagai situs *social media* bagi para demonstran alih-alih menciptakan suatu situs khusus bagi para demonstran untuk mengorganisasi gerakan mereka? *Pertama*, AS tidak ingin dipandang sebagai pihak yang mendukung perubahan rezim di negara tertentu. Namun, dengan cara mendukung kebebasan Internet melalui *21st Century Statecraft*, AS dapat secara tidak langsung mendukung demokratisasi yang terjadi di suatu negara. *Kedua*, penulis melihat adanya hubungan dengan pemikiran Ethan Zuckerman mengenai "*Cute Cat Theory of Digital Activism*." Zuckerman beranggapan bahwa platform *social media* dapat digunakan orang-orang untuk berbagai tujuan, mulai dari mengorganisasi gerakan-gerakan revolusi hingga mengunggah foto-foto kucing (yang menginspirasi nama dari pemikirannya ini). Platform *social media* sebagai bagian dari pengembangan Web 2.0 ini telah memudahkan penerbitan konten di Internet serta memudahkan

¹¹⁹ Clay Shirky, "The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change" dalam *Foreign Affairs*, 90, No. 1, (January/February 2011), hlm. 28.

penyebarannya dengan audiens local maupun global. Karena begitu beragamnya penggunaan *social media*, maka Zuckerman melihat bahwa dengan tersedianya akses *social media* yang “netral” seperti *Twitter*, akan lebih mudah bagi para aktivis untuk menggunakannya karena tidak difokuskan pada satu tujuan tertentu, yang tentunya akan lebih mudah untuk diblokir oleh pemerintahan.¹²⁰

Menanggapi strategi diplomasi digital AS dengan menyediakan dukungan jaringan dan kapabilitas teknologi informasi ini, Shirky memandangnya bahwa pendekatan instrumental (yang terlalu difokuskan pada peralatan-peralatan) seperti kebijakan *Haystack* dapat berimplikasi buruk. Oleh karena itu, Shirky mendukung pendekatan yang lebih menyeluruh (*environmental view*) terhadap nosi kebebasan Internet yang AS dukung melalui *21st Century Statecraft*. Shirky melihat bahwa AS seharusnya mengurangi penekanan pada pengembangan alat-alat anti-sensor dan justru memfokuskan dirinya pada pembentukan nilai-nilai kebebasan berekspresi secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan yang lebih umum, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Dirinya kemudian menambahkan bahwa strategi diplomasi digital tidak serta-merta dapat mengharapkan perubahan yang cepat dari apapun tujuan yang dimilikinya.¹²¹

Secara keseluruhan, peranan *21st Century Statecraft* dalam menyediakan jaringan dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi ini berkontribusi pada misi AS untuk menjamin kebebasan Internet di negara-negara lain. Selain itu, dengan adanya penyediaan dukungan ini, AS juga secara tidak langsung membentuk jaringan dengan publik di negara lain melalui perangkat-perangkat teknologi, yang menurut Castells, dapat mempermudah penyampaian pesan oleh AS secara internasional.

III.1.3. Penyediaan Dukungan Kebebasan Internet

Peran terakhir dari *21st Century Statecraft* terhadap penyelenggaraan *soft power* AS yang penulis analisis di sini adalah penyediaan dukungan bagi kebebasan

¹²⁰ Ethan Zuckerman, “The Cute Cat Theory Talk at ETech” diakses dari <http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/03/08/the-cute-cat-theory-talk-at-etech/> pada tanggal 16 Maret 2012, pukul 10.12 WIB.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 41.

Internet. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena Internet telah tumbuh menjadi bagian dari *public sphere* (ruang publik) di mana diskusi publik mengenai berbagai macam hal berkembang. Selain itu, Internet juga menciptakan suatu *interconnected estate*.

Eric Schmidt dan Jared Cohen melihat ruang (*space*) yang diciptakan oleh Internet sebagai “*interconnected estate*,” yaitu suatu tempat di mana semua orang yang memiliki akses Internet dapat diberikan suara dan *power* untuk menciptakan perubahan, tanpa melihat standar hidup atau nasionalitas yang dimilikinya. Bagi negara-negara maju di dunia khususnya, perkembangan *interconnected estate* ini akan menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan dan pembangunan, dan juga menciptakan tantangan baru bagi cara-cara pemerintahan yang selama ini sudah terbangun. Teknologi informasi dan komunikasi juga akan menciptakan ruangan bagi demokrasi maupun otokrasi serta akan memberdayakan para individu dengan berbagai tujuan. Karenanya, aktor negara juga akan berjuang untuk mengontrol dampak dari teknologi terhadap kekuatan politik dan ekonomi mereka, termasuk Amerika Serikat.¹²²

Melihat kegunaan *social media* sebagai alat koordinasi bagi hampir seluruh kekuatan politik dunia (dan pada saat yang bersamaan, pemerintahan otoritarian juga berusaha untuk membatasi akses terhadap hal ini), Shirky berargumen bahwa pemerintahan AS harus tetap menjadikan “kebebasan Internet” (*Internet freedom*) sebagai salah satu sasaran kebijakan luar negerinya. Mendukung kebebasan manusia untuk mengakses Internet secara bebas merupakan kebijakan yang tepat bagi AS, karena dua faktor: 1) hal ini sejalan dengan sasaran strategik untuk memperkuat masyarakat sipil di berbagai negara, dan 2) hal ini mendukung kepercayaan ideal AS akan kebebasan berekspresi.¹²³

Poin terpenting yang dikemukakan Shirky adalah ide bahwa kebijakan untuk mendukung kebebasan Internet memiliki saran yang bersifat jangka pendek (*short-term goals*)—seperti kebijakan yang secara khusus disasarkan terhadap sebuah negara yang

¹²² Eric Schmidt dan Jared Cohen, “The Digital Disrupton: Connectivity and the Diffusion of Power” dalam *Foreign Affairs*, Vol. 89, No. 6, November/December 2010, hlm. 75.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 30.

spesifik atau ditujukan untuk membantu kelompok *dissident* tertentu atau mendukung perubahan rezim—akan bersifat tidak efektif. Dan ketika hal ini gagal, maka konsekuensi yang harus ditanggung dapat bersifat serius. Shirky juga mendorong pemerintahan AS untuk berasumsi bahwa progres untuk mendukung kebebasan Internet akan berjalan dengan lambat di kebanyakan negara dengan rezim otoritarian.¹²⁴

Oleh karena itu, Shirky mengadvokasi pemerintah AS untuk memandang isu kebebasan Internet secara menyeluruh (*environmental view*). Menurutnya, kebebasan Internet harus dipandang sebagai satu bagian dari kebebasan politik secara keseluruhan. Inti dari *environmental view* terhadap kebebasan Internet adalah adanya ruang publik yang berkembang secara perlahan, di mana opini publik dapat didasarkan pada media serta percakapan atau diskusi yang terjadi. Shirky menekankan bahwa fokus AS harus berada pada pembangunan ruang publik yang kuat sebagai salah satu cara dalam mendukung kebebasan Internet.¹²⁵

Berangkat dari argumen Shirky di atas, peranan AS dalam mendukung kebebasan Internet sebagai bagian dari *21st Century Statecraft* berimplikasi pada *soft power* negara ini terutama dengan menciptakan nilai atraktif dari AS. Keatraktifan AS ini hadir melalui advokasi kebebasan Internet yang AS lakukan di Iran dan Mesir. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi pendapat masyarakat di kedua negara mengenai AS, namun dengan didukungnya kebebasan Internet, AS berusaha menampilkan citranya sebagai pendukung nilai-nilai kebebasan dan demokrasi di negara-negara tersebut. Dan seperti peran-peran sebelumnya, hal ini juga membantu realisasi demokratisasi di negara-negara tersebut, meskipun dalam cakupan yang sangat kecil dan dapat memakan waktu yang lama.

III.2. Perbandingan Implikasi Kebijakan *21st Century Statecraft* dalam Kasus Protes Iran dan Revolusi Mesir

Dalam bagian ini, penulis akan membandingkan implikasi dari *21st Century Statecraft* terhadap kedua studi kasus, yaitu kasus Protes Iran (2009-2010) dan kasus

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

Revolusi Mesir (2011). Dari sini, kemudian, akan dilihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sukses atau tidaknya strategi diplomasi digital yang dijalankan oleh Amerika Serikat di kedua negara ini.

III.2.1. Implikasi Kebijakan *21st Century Statecraft* terhadap Kasus Protes Iran

Dalam kasus Protes Iran, kebijakan *21st Century Statecraft* yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat terbagi ke dalam dua hal yang besar. Pertama, dukungan bagi kebebasan Internet di Iran dengan, salah satunya, memastikan bahwa *Twitter* sebagai salah satu alat komunikasi terpenting bagi para demonstran tetap dapat digunakan dengan melobi untuk penundaan *maintenance* yang akan dilakukan terhadap perangkat ini. Kedua, penyediaan teknologi bagi para demonstran agar mereka dapat mencari jalan lain untuk mengakses situs-situs yang diblokir oleh pemerintahan, salah satunya dengan mendukung pengembangan perangkat lunak *Haystack*, yang pada akhirnya gagal untuk diteruskan karena adanya indikasi penggunaannya justru dapat membahayakan penggunaannya.

Sebelum masuk ke dalam bagian apa saja implikasi kebijakan *21st Century Statecraft* terhadap protes pemilihan umum Iran, tentunya akan lebih baik untuk melihat apa yang terjadi pada gerakan oposisi di Iran tersebut selama protes berlangsung hingga tahun 2010. Gerakan Hijau (*Green Movement*) yang mayoritas berasal dari pendukung kandidat oposisi Mir Hussein Mousavi tidak berhasil dalam mencapai tujuan mereka untuk mendapatkan keadilan mengenai hasil pemilihan presiden yang menurut mereka disabotase oleh rezim yang berkuasa.¹²⁶ Alhasil, pemerintahan Ahmadinejad masih berpengaruh dan tetap memimpin Iran.

Meskipun AS telah menyebutkan dalam berbagai pernyataan resmi bahwa *21st Century Statecraft* tidak bertujuan untuk ikut campur dalam urusan internal Iran atau bahkan menciptakan suatu perubahan rezim di dalam negara tersebut, kegagalan *Green Movement* dalam mencapai tujuannya menjadi bukti bahwa banyak faktor yang

¹²⁶ Megan Lucero, "Twitter inhibited Green Movement success" diakses dari <http://writeswebwatch.wordpress.com/2011/03/29/twitter-inhibited-green-movement-success/> pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 5.13 WIB.

mempengaruhi kesuksesan strategi diplomasi digital AS ini. Berbicara mengenai implikasi, dapat dilihat bahwa dengan dukungan terhadap kebebasan Internet dan penyediaan akses teknologi informasi bagi warga Iran, AS telah membantu para demonstran dalam mendapatkan akses terhadap *social media*, yang dapat dikatakan merupakan salah satu alat komunikasi yang paling penting untuk digunakan ketika protes berlangsung.

Menurut Mahboub Hashem dan Abeer Najjar, terdapat beberapa peran dari penggunaan *social media* pada saat dilangsungkannya protes. *Pertama*, *social media* membantu kelompok oposisi untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dan dengan dunia internasional. *Kedua*, *social media* membantu orang-orang di negara lain untuk berinteraksi dengan orang-orang Iran dan mereka yang mendukung para demonstran. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana berita terbaru mengenai apa yang terjadi di kota-kota Iran disampaikan melalui perangkat-perangkat *social media*, seperti *Twitter* dan *Facebook*, serta situs-situs *sharing*, yaitu *YouTube* (video) dan *Flickr* (gambar/foto). Pengaruh penggunaan *social media* ini dapat terlihat pada periode antara 19 hingga 21 Juni 2009, ketika Neda Soltani, seorang perempuan Iran, ditembak oleh pasukan Basiji dan kematiannya sempat didokumentasikan melalui video. Lalu dengan Internet, video ini mulai disebar dan menggambarkan kekerasan yang terjadi di Iran terhadap para demonstran. Insiden tunggal ini kemudian meluncurkan berbagai pesan di situs-situs *social media* dan menjadi momen yang menunjukkan kemampuan *social media* untuk memobilisasi diskursus dan aktivisme yang tumbuh di Iran pada saat itu.¹²⁷

Dari kegagalan protes Iran yang dilakukan—meskipun adanya peran *social media* yang besar yang didukung oleh kebijakan *21st Century Statecraft* AS—penulis berargumen bahwa terdapat dua faktor besar yang mempengaruhi strategi diplomasi digital AS di negara ini (yang akan penulis gunakan pula dalam menganalisis kasus Revolusi Mesir). Faktor-faktor tersebut adalah kontrol pemerintahan terhadap Internet

¹²⁷ Mahboub Hashem dan Abeer Najjar, "The Role and Impact of New Information Technology (NIT) Applications in Disseminating News about the Recent Iran Presidential Election and Uprisings" dalam Yahya R. Kamalipour (ed.), *Media, Power, and Politics in the Digital Age: The 2009 Presidential Election Uprising in Iran* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010), hlm. 129-130.

dan *frame of thinking* masyarakat, yang terutama didasarkan pada pandangan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa.

1. Kontrol Pemerintahan terhadap Infrastruktur Teknologi Informasi

Dalam kasus Iran, kontrol pemerintahan Iran terhadap infrastruktur teknologi informasi sangatlah besar. Seperti telah dijelaskan di Bab II, pemerintahan Iran memiliki sejumlah unit untuk mengawasi dinamika penggunaan Internet di negaranya.

Hanya dalam beberapa bulan, unit-unit ini bekerja untuk melacak informasi-informasi yang dianggap tidak benar (yang disebut sebagai “penghinaan dan kebohongan”) mengenai rezim Ahmadinejad. Mereka yang menyebarkan informasi seperti inipun diidentifikasi dan ditangkap. Selain itu, polisi Iran juga menggunakan Internet untuk mendapatkan foto dan video yang menunjukkan wajah-wajah demonstran (yang tentunya sangat mudah untuk dicari karena sirkulasi foto dan video di *social media* yang sangat besar), yang akan diterbitkan melalui koran-koran dan situs Web yang pro-Ahmadinejad untuk diidentifikasi oleh masyarakat dan pada akhirnya ditangkap.¹²⁸

Dengan adanya kontrol dari pemerintahan yang sangat intrusif ini, maka mulai meningkat jumlah warga Iran yang khawatir untuk menggunakan Internet dalam mengorganisasikan demonstrasi atau bahkan sekedar menerbitkan pesan yang terkesan anti-pemerintahan. Menurut Evgeny Morozov, hal ini menjadi suatu dilema sendiri bagi masyarakat Iran dan menantang anggapan bahwa *social media* merupakan alat yang efektif dalam merealisasikan suatu revolusi.¹²⁹ Alih-alih membantu demonstran untuk mencapai tujuannya, *social media* justru digunakan oleh pemerintahan Ahmadinejad sendiri untuk melacak pengguna Internet yang dianggap subversif.

Nilai kebebasan Internet yang didukung oleh Amerika Serikat pun menjadi dilema tersendiri. Karena justru dengan penggunaan Internet yang bebas inilah,

¹²⁸ Evgeny Morozov, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹²⁹ *Ibid.*

pemerintahan Iran mampu untuk mendapatkan informasi mengenai kelompok-kelompok protes yang bermunculan di berbagai kota di Iran dan menangkapi orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Selain itu, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa kegunaan *social media* dalam protes Iran terlalu diromantisasi, terutama oleh media-media internasional yang sering menyebut kejadian ini sebagai suatu “revolusi *Twitter*.” Seorang jurnalis Iran bernama Saeed Kamali Dehgan menyatakan bahwa peran situs *social media* dalam protes Iran terlalu dilebih-lebihkan. Meskipun dirinya menyatakan bahwa situs-situs ini berguna sebagai alat komunikasi, namun tidak berarti bahwa melalui penggunaan *social media*, maka suatu revolusi akan dengan mudahnya dilakukan. Menurut Dehgan, selain karena aksi pemerintahan Iran yang keras untuk memberhentikan protes, kegagalan *Green Movement* juga terjadi karena kebanyakan orang menyebarkan pesan di rumah alih-alih langsung turun ke jalan karena adanya ilusi bahwa mereka dapat menciptakan suatu revolusi hanya dengan mengirimkan pandangan mereka di *Twitter*.¹³⁰

2. *Frame of Thinking* Masyarakat

Frame of thinking atau cara berpikir masyarakat di sini lebih merujuk kepada bagaimana masyarakat melihat dan memberi dukungan kepada sebuah *cause* yang tumbuh di negaranya. Meskipun media internasional menggambarkan bahwa protes yang terjadi di Iran merupakan representasi dari pandangan mayoritas rakyat Iran, hal tersebut tidak selamanya benar. Menurut Evgeny Morozov, pada saat itu, terdapat banyak orang Iran yang merasa hasil pemilihan umum yang memenangkan kandidat *incumbent* Ahmadinejad tersebut adil dan mereka juga rela untuk mempertahankan Presiden Mahmoud Ahmadinejad bila diperlukan.¹³¹

¹³⁰ Megan Lucero, “Twitter inhibited Green Movement success,” *Loc. Cit.*

¹³¹ Morozov, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Sebuah laporan analisis polling oleh *World Public Opinion* juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berpandangan pemilihan presiden yang telah dilaksanakan bersifat bebas dan adil. Hasil ini didasarkan pada tiga polling. Yang pertama oleh *GlobeScan* satu minggu setelah pemilihan dilangsungkan, yang menunjukkan bahwa 76% masyarakat melihat pemilihan yang dijalankan adil. Kedua, polling oleh Universitas Tehran satu bulan setelah pemilihan menunjukan bahwa 78% masyarakat beranggapan yang sama. Dan terakhir, polling oleh *World Public Opinion* pada bulan September 2009, yang memperlihatkan peningkatan persentase masyarakat yang melihat bahwa pemilihan yang dilangsungkan adil menjadi 83%.¹³²

Jumlah *approval* yang sangat tinggi dari masyarakat ini berbanding terbalik dengan apa yang selama ini dicitrakan oleh berbagai media internasional maupun *social media* akan sentimen masyarakat Iran terhadap hasil pemilihan presiden. Mayoritas warga Iran masih melihat Mahmoud Ahmadinejad sebagai pemimpin yang layak bagi negaranya dan hal ini memperkuat kedudukan Ahmadinejad sebagai presiden Iran.

Selain itu, faktor penting lainnya adalah pengaruh besar dari *Supreme Leader* Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang mendukung hasil pemilihan umum, dan mencoba untuk menekan protes yang terjadi. Pengaruh ini terutama muncul dari citra Khamenei sebagai figur pemimpin agama di Iran dan dihormati oleh rakyat Iran. Meskipun legitimasi Khamenei berkurang ketika protes berlangsung, dirinya dilaporkan menyatakan bahwa bila dirinya dapat mendapatkan dukungan 20-30 persen masyarakat Iran dan melakukan tekanan sistematis terhadap 70 persen lainnya, dirinya dapat memimpin untuk waktu yang lama dan tidak akan ada ancaman yang serius terhadap dirinya.¹³³

¹³² Steven Kull, et al. *An Analysis of Multiple Polls of the Iranian Public* (World Public Opinion, 2010) diakses dari http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb10/IranElection_Feb10_rpt.pdf/ pada tanggal 20 Maret 2012, pukul 7.10 WIB.

¹³³ Scott Peterson, "Iran protests: Is Supreme Leader Ali Khamenei winning?" diakses dari <http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0318/Iran-protests-Is-Supreme-Leader-Ali-Khamenei-winning/> pada tanggal 20 Maret 2012, pukul 8.15 WIB.

Dari faktor-faktor di atas, dapat dilihat bagaimana *frame of thinking* masyarakat—atau lebih tepatnya, mayoritas masyarakat Iran—bersifat kuat/solid dan mendukung pemerintahan Ahmadinejad yang didukung oleh Khamenei. Infiltrasi pesan yang datang dari luar pun—baik itu berkaitan dengan nosi kebebasan Internet maupun aspirasi untuk mereformasi Iran agar menjadi lebih demokratis—tidak dapat dengan mudahnya mempengaruhi pemikiran masyarakat Iran sehingga *Green Movement* gagal dan kebijakan *21st Century Statecraft* AS tidak sepenuhnya dapat membawa perubahan berarti di negara ini.

III.2.2. Implikasi Kebijakan *21st Century Statecraft* terhadap Kasus Revolusi Mesir

Dalam kasus revolusi Mesir, kebijakan *21st Century Statecraft* yang dijalankan oleh Amerika Serikat berimplikasi cukup signifikan, terutama dalam mendorong pemerintahan Mubarak pada saat itu untuk menghidupkan kembali akses Internet di Mesir. Meskipun AS tidak sampai harus menyediakan peralatan-peralatan teknologi bagi para demonstran untuk menembus pemblokiran situs seperti yang terjadi di Iran, melalui inisiatif *Civil Society 2.0*, Departemen Luar Negeri AS mendukung pengembangan aplikasi *Ushahidi* yang dapat dipakai oleh demonstran untuk memetakan rangkaian demonstrasi yang terjadi di seantero Mesir.

Peranan Internet dan *social media* memang juga berpengaruh pada revolusi yang terjadi di Mesir, mengingat bagaimana dukungan untuk revolusi pertama-tama dikumpulkan melalui *Facebook group* yang dibentuk oleh Wael Ghonim, yang pada akhirnya menjadi salah satu media untuk mengorganisasikan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan. Seperti telah dipaparkan di Bab II, terdapat tiga peran utama dari *social media* dalam revolusi Mesir, yaitu pengorganisasian demonstrasi, penyebaran informasi, dan menarik perhatian internasional. Selain itu, dengan adanya *social media*, para demonstran dapat membentuk narasi yang tumbuh mengenai protes yang terjadi. Contohnya, ketika penjarahan mulai terjadi di Mesir, narasi yang ada dapat justru mendukung pemerintahan Mesir. Namun, melalui *Twitter*, dilaporkan bahwa penjarahan ini dilakukan oleh kelompok pengawas di kawasan perumahan (*neighborhood watch*

groups) yang memiliki identitas polisi. Meskipun informasi ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya, hal ini menampilkan sisi baru dari penjarahan yang terjadi di mana ternyata ada beberapa orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan kerusuhan sehingga tampak bahwa para demonstran telah melakukan hal-hal yang tidak damai dan dapat dihentikan.¹³⁴

Di sisi lain, kegigihan demonstran dalam melakukan protes anti-pemerintahan juga mensukseskan revolusi yang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tetap turun ke jalan meskipun terjadi pemblokiran Internet dan jaringan telepon seluler oleh pemerintahan Mesir, serta aktivitas *hacking* untuk menembus pemblokiran yang terjadi ini. Kebijakan *21st Century Statecraft* oleh AS berpengaruh dalam memaksa pemerintahan Mesir untuk kembali menyalakan kembali akses Internet di negaranya.

Di bawah, penulis akan melihat pengaruh dua faktor yang dipakai sebelumnya untuk menganalisis kasus Iran dalam kasus Revolusi Mesir.

1. Kontrol Pemerintahan terhadap Infrastruktur Teknologi Informasi

Pada saat demonstrasi berlangsung, pemerintahan Mubarak berusaha untuk menutup seluruh akses Internet dengan menutup jaringan serta *Domain Name Servers* (DNS) resmi sehingga pengguna Internet tidak dapat mengakses situs-situs yang mereka inginkan. Hal yang sama juga diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Contohnya *provider* bernama *Vodafone* diinstruksikan oleh pemerintahan Mesir untuk memberhentikan layanannya di beberapa area. Hal ini dimungkinkan karena di bawah legislasi Mesir, otoritas memiliki hak untuk menyuruh penyedia jasa telekomunikasi memberhentikan layanannya. Situs *social media* juga tidak dapat diakses, meskipun uniknya pemerintahan Mesir tidak mengaku berada di balik pemblokiran tersebut dan justru mengatakan mendukung kebebasan berekspresi.¹³⁵

¹³⁴ E.B. Boyd, "How Social Media Accelerated the Uprising in Egypt," *Loc. Cit.*

¹³⁵ "Egypt severs Internet connection amid growing unrest" (*BBC News*, 28 January 2011) diakses dari <http://www.bbc.com/news/technology-12306041/> pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 7.09 WIB.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kontrol pemerintahan terhadap infrastruktur teknologi informasi tetap terjadi di Mesir ketika revolusi berlangsung, namun dibandingkan dengan Iran, kontrol ini tidak begitu ketat. *Pertama*, tidak ada unit-unit khusus yang dibentuk oleh pemerintahan Mesir yang khusus ditujukan untuk melacak penggunaan Internet sehingga masyarakat pun tidak memiliki kekhawatiran untuk menggunakan *social media* dalam mengorganisasi demonstrasi dan meluncurkan pesan-pesan yang bersifat anti-pemerintahan.

Kedua, meskipun terdapat pemblokiran Internet, hal ini tidak serta-merta menghentikan demonstrasi yang berlangsung. Justru para demonstran menggunakan cara-cara yang tradisional untuk mengorganisasi diri mereka, misalnya dengan berkumpul di mesjid-mesjid ketika waktu shalat Jumat sebelum memulai demonstrasi di pusat-pusat kota dan gedung-gedung pemerintahan.

Ketiga, pemblokiran yang dilakukan tidak begitu kuat karena tingginya jumlah demonstran dan juga *hacker* yang berhasil menembus pemblokiran Internet. Salah satu pengguna *Twitter* dengan akun @EgyptFreedomNow mengklaim bahwa masih dimungkinkan mengakses Internet dengan menggunakan koneksi *dial-up* di Mesir.¹³⁶ Selain hal-hal di atas, tekanan internasional yang cukup kuat (terutama dari Amerika Serikat) juga mendorong pemerintahan Mubarak untuk tidak memblokir Internet dalam waktu yang lama. Hal ini diindikasikan karena adanya hubungan yang cukup erat antara pemerintahan AS dengan Mubarak.

2. *Frame of Thinking* Masyarakat

Hal utama yang mensukseskan revolusi Mesir, selain kemampuan pengorganisasian gerakan-gerakan demonstrasi secara cepat berkat penggunaan

¹³⁶ *Ibid.*

social media, adalah opini publik yang menentang kepemimpinan Hosni Mubarak yang pada saat itu sangat signifikan.

Bagi Amerika Serikat, hal ini muncul sebagai suatu paradoks. Di satu sisi, pemerintahan Obama menjalin hubungan yang cukup dekat dengan pemerintahan Mubarak, namun di sisi lain, AS juga ingin mendorong Mubarak untuk menjalankan reformasi dan mendukung transisi demokratis dari kepemimpinannya selama 30 tahun. Berdasarkan polling yang dilakukan oleh *Zogby International* pada bulan Juli 2010, 85% masyarakat Mesir memiliki pandangan negatif terhadap Amerika Serikat,¹³⁷ sebuah data statistik yang sangat tinggi. Meskipun demikian, AS tetap memberikan bantuan bagi Mesir dan mencoba untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintahan baru yang akan muncul pasca-Mubarak. Salah satu caranya adalah dengan tetap memberikan berbagai bantuan bagi Mesir.

Frame of thinking masyarakat Mesir secara umum dapat dilihat mengalami bifurkasi pasca-revolusi, di mana muncul dua kelompok utama. Kelompok yang pertama lahir di tengah-tengah demonstrasi di *Tahrir Square* pada bulan Januari 2011 dan menolak Dewan Militer Mesir yang memegang kekuasaan untuk sementara dan mendorong agar kekuasaan segera diberikan ke dewan sipil dalam waktu beberapa minggu. Sebaliknya, kelompok lain (yang terdiri dari antara lain *Muslim Brotherhood*, yaitu gerakan Islam dan partai politik yang dikenal anti-Barat) mendukung Dewan Militer untuk memegang kekuasaan sementara hingga pemilihan umum parlemen dan presiden dilaksanakan dalam jangka waktu tujuh bulan.¹³⁸

Hal ini dapat membawa perpecahan kembali di Mesir—sesuatu yang tentunya tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Namun dengan adanya bifurkasi *frame of thinking* ini, akan lebih mudah bagi Amerika Serikat untuk mempengaruhi

¹³⁷ John Zogby, “2010 Poll: Egyptians Dislike Obama, See U.S./Israel as ‘Threats,’ Want Clergy More Political” (*Huffington Post*, March 2, 2011) diakses dari http://www.huffingtonpost.com/john-zogby/polls-egypt-obama_b_818192.html/ pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 7.25 WIB.

¹³⁸ Ghazy Assassa, “Egyptian revolution suffers from a bifurcation in directions” diakses dari <http://goarticles.com/article/Egyptian-revolution-suffers-from-a-bifurcation-in-directions/5745104/> pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 7.30 WIB.

salah satu kubu di dalam Mesir, salah satunya dengan menggelontorkan bantuan bagi negara ini.

Setelah Presiden Mubarak mundur, pemerintahan Obama mengumumkan rencana baru untuk *engagement* dengan negara-negara Arab, termasuk Mesir dengan komponen-komponen utama seperti 1) peluncuran fasilitas senilai US\$2 milyar dalam *Overseas Private Investment Corporation* untuk mendukung investasi swasta di wilayah ini; 2) penyediaan pengurangan hutang bilateral hingga US\$1 milyar dengan Mesir dan bekerja sama dengan pemerintahan Mesir untuk menginvestasikan sumber daya ini untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan; dan 3) membantu Mesir mendapatkan kembali akses pasar modal dengan menyediakan US\$1 milyar untuk mendanai infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja di Mesir.¹³⁹

Amerika Serikat tidak pernah secara eksplisit mengatakan kelompok mana yang didukung untuk memerintah Mesir pasca-Mubarak, namun ada kekhawatiran bahwa dengan sistem demokrasi yang dijalankan sekarang melalui berbagai pemilihan umum, *Muslim Brotherhood* dapat mengambil kekuasaan pemerintahan Mesir, yang selama ini menjadi salah satu rekan penting Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, meskipun mendapatkan tingkat *approval* dari masyarakat Mesir yang rendah.

III.2.3. Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Protes Iran dan Revolusi Mesir dan Kaitannya dengan Kebijakan 21st Century Statecraft Amerika Serikat

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan 21st Century Statecraft sangat bergantung pada faktor-faktor domestik di dalam suatu negara, terutama kontrol pemerintahan terhadap infrastruktur teknologi informasi serta *frame of thinking* yang dimiliki oleh masyarakat, terutama terhadap rezim pemerintahan negara

¹³⁹ Jeremy M. Sharp, *Egypt in Transition* (CSR Report for Congress, 2011), hlm. 19-20.

masing-masing. Perbandingan antara kedua negara dalam hal ini ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel III.1.

Perbandingan Faktor-faktor yang mempengaruhi Protes Iran dan Revolusi Mesir

FAKTOR	Iran	Mesir
Kontrol Pemerintahan terhadap Infrastruktur Teknologi Informasi	Kontrol pemerintahan begitu kuat yang salah satunya ditunjukkan dengan pengembangan unit-unit pemerintahan untuk melacak pengguna Internet yang menyebarkan pesan-pesan anti-pemerintahan. Selain itu, pemerintahan Iran juga menjalankan pemblokiran Internet yang canggih. Dengan kebijakan semacam ini, maka warga Iran mulai mengurangi penggunaan Internet dan perangkat <i>social media</i> dalam protes karena adanya kekhawatiran bahwa diri mereka akan ditangkap. Alhasil, kebijakan <i>21st Century Statecraft</i> yang diaplikasikan oleh Amerika Serikat tidak begitu berhasil dalam mendukung kebebasan Internet di Iran.	Kontrol pemerintahan terhadap jaringan Internet tidak begitu kuat. Meskipun, jaringan Internet sempat diblokir, kelompok-kelompok protes tetap dapat menemukan jalan pintas untuk mengakses Internet, yang juga dibantu oleh aktivitas <i>hacker</i> . Selain itu, dorongan Amerika Serikat bagi rezim Mubarak untuk tetap mendukung kebebasan Internet akhirnya berhasil untuk menghidupkan kembali akses di negara ini setelah beberapa waktu. Hal ini diindikasikan karena adanya hubungan yang cukup erat antara pemerintahan AS dengan Mubarak.

<p><i>Frame of Thinking Masyarakat</i></p>	<p><i>Frame of thinking</i> masyarakat Iran bersifat solid karena adanya pengaruh <i>Supreme Leader</i> Ayatollah Ali Khamenei sebagai figur agama yang perlu dihormati. <i>Endorsement</i> yang diberikan oleh Khamenei terhadap Ahmadinejad juga meningkatkan legitimasi dirinya di mata rakyat Iran, yang ditunjukkan oleh kemunculan kelompok-kelompok pendukung Ahmadinejad yang memiliki pengaruh signifikan dalam melemahkan pengaruh demonstran kelompok oposisi. Akibatnya, infiltrasi pesan yang datang dari luar, contohnya dalam bentuk dukungan bagi kebebasan Internet, tidak dapat dengan mudah mempengaruhi pemikiran mayoritas masyarakat Iran.</p>	<p>Opini publik yang menentang kepemimpinan Hosni Mubarak sangat signifikan dalam menggerakkan revolusi yang terjadi. Di sisi lain, <i>frame of thinking</i> masyarakat Mesir mengalami bifurkasi, yang tampak pasca-Mubarak. Satu kubu lebih mendukung nilai-nilai demokrasi, sementara kubu lain yang dibelakangi oleh <i>Muslim Brotherhood</i> bersifat anti-Barat. Hal ini dapat membawa perpecahan di Mesir, namun pada saat yang bersamaan juga mempermudah Amerika Serikat dalam mempengaruhi salah satu kubu, terutama dengan terus-menerus memberikan bantuan bagi Mesir.</p>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari perbandingan yang ada ini, maka tampak bahwa implementasi kebijakan *21st Century Statecraft*—yang difokuskan pada penyebaran nilai-nilai kebebasan (terutama kebebasan Internet)—akan tergantung pada situasi domestik di suatu negara, terutama kontrol pemerintahan terhadap infrastruktur teknologi informasi serta *frame of thinking* masyarakat, yang akan menentukan apakah pesan yang berusaha disampaikan dapat ditanamkan di tengah-tengah publik internasional ini ataupun tidak.

Tetapi perlu ditekankan pula bahwa kebijakan *21st Century Statecraft* diharapkan memiliki peran bagi penyelenggaraan *soft power* Amerika Serikat, yang akan dianalisis lebih lanjut di bagian berikutnya.

III.3. Signifikansi *21st Century Statecraft* terhadap Penyelenggaraan *Soft Power*

Amerika Serikat

21st Century Statecraft muncul sebagai salah satu agenda utama Departemen Luar Negeri AS di bawah kepemimpinan Hillary Clinton. Penasehat Menteri Luar Negeri AS di bidang inovasi, Alec Ross mengemukakan bahwa *21st Century Statecraft* bersifat komplementer bagi implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih tradisional. Hal ini dibutuhkan terutama sebagai langkah adaptasi terhadap dunia yang semakin terinterkoneksi oleh jaringan, teknologi, dan demografinya.¹⁴⁰ Pada pernyataannya dalam memperingati “*21st Century Statecraft Month*,” yaitu pada bulan Januari 2012 yang didedikasikan pada inisiatif ini, Ross mengemukakan bahwa *21st Century Statecraft* memang ditujukan untuk mensosialisasikan penggunaan peralatan dan jaringan baru untuk menghadapi tantangan yang ada di abad ke-21. Ross juga mengemukakan bagaimana dunia masih berada dalam usahanya untuk beradaptasi dengan penggunaan sosial media.

Yang menjadi pertanyaan tentunya adalah mengapa *21st Century Statecraft* menjadi sangat signifikan bagi AS. Menurut Nicholas Westcott, diplomasi digital berimplikasi pada pembuatan kebijakan luar negeri di empat area: ide, informasi, jaringan, dan penyediaan jasa.¹⁴¹

Pertama, dalam ranah ide, *21st Century Statecraft* menjadi jalan bagi AS untuk menciptakan ide-ide yang dapat mendukung penyelenggaraan *soft power*-nya. Ide ini

¹⁴⁰ Alec Ross, “*21st Century Statecraft: Continuing the Conversation*” diakses dari http://blogs.state.gov/index.php/site/entry/21st_century_statecraft_continuing_the_conversation/ pada 2 Februari 2012, pukul 13.41 WIB.

¹⁴¹ Nicholas Westcott, *Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations* (Oxford Research Institute Research Report 16, July 2008) diakses dari <http://korea.ssrn.com/delivery.php?ID=779068125074117107115085081015111028034002008002053038105114014071104012117127117124043110106115033100010092098127122116096069123000008015072070093117115094103072124091018094089078123102084026089005066117&EXT=pdf/> pada tanggal 2 April 2012, pukul 10.45 WIB.

dikejawantahkan dalam bentuk pesan-pesan AS untuk mendukung kebebasan Internet di negara lain serta mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat di negara lain.

Kedua, dengan *21st Century Statecraft*, Departemen Luar Negeri AS menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan AS di negara-negara tersebut. Salah satunya dengan membangun situs-situs Web kedutaan besar yang secara komprehensif menjelaskan hubungan AS dengan negara tertentu.

Ketiga, berkaitan dengan jaringan, *21st Century Statecraft* memberikan kesempatan bagi AS untuk berhubungan dengan publik di negara lain dengan cara yang lebih efektif dan efisien karena mengutilisasi jaringan Internet yang sudah ada. Selain itu, dengan terciptanya jaringan ini, maka akan lebih mudah bagi AS untuk menciptakan hubungan dengan publik-publik di negara lain ini.

Keempat, AS menyediakan jasa bagi publik internasional dalam bentuk dukungan bagi pengembangan jaringan, koneksi, serta aplikasi-aplikasi yang dapat membantu masyarakat internasional dalam berbagai bidang. Dalam kasus Iran dan Mesir, hal ini ditunjukkan dengan bantuan AS dalam memastikan publik di kedua negara tersebut dapat mengakses perangkat-perangkat *social media*, seperti *Twitter* dan *Facebook*.

Lebih lanjut lagi, kesuksesan kebijakan *21st Century Statecraft* AS akan tergantung pada jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Meskipun, diplomasi digital ini tidak memiliki andil yang begitu signifikan dalam gerakan protes di Iran ataupun revolusi di Mesir, namun jumlah orang yang dijangkau oleh kebijakan ini menjadi indikator dari signifikansi *21st Century Statecraft* terhadap *soft power* Amerika Serikat.

Pertama, terdapat *enabling factor* berupa Internet dan teknologi *social media* yang memungkinkan AS dengan lebih mudah berinteraksi dengan publik internasional tanpa harus mengalami batasan-batasan fisik.

Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh AS terlihat personal sehingga tercipta hubungan antara AS dengan berbagai gerakan masyarakat sipil yang ada. Dengan mengutilisasi jaringan yang ada, pemerintahan AS tidak harus mencoba untuk menjalin hubungan dengan kelompok khusus (misalnya dengan pemimpin di gerakan-gerakan

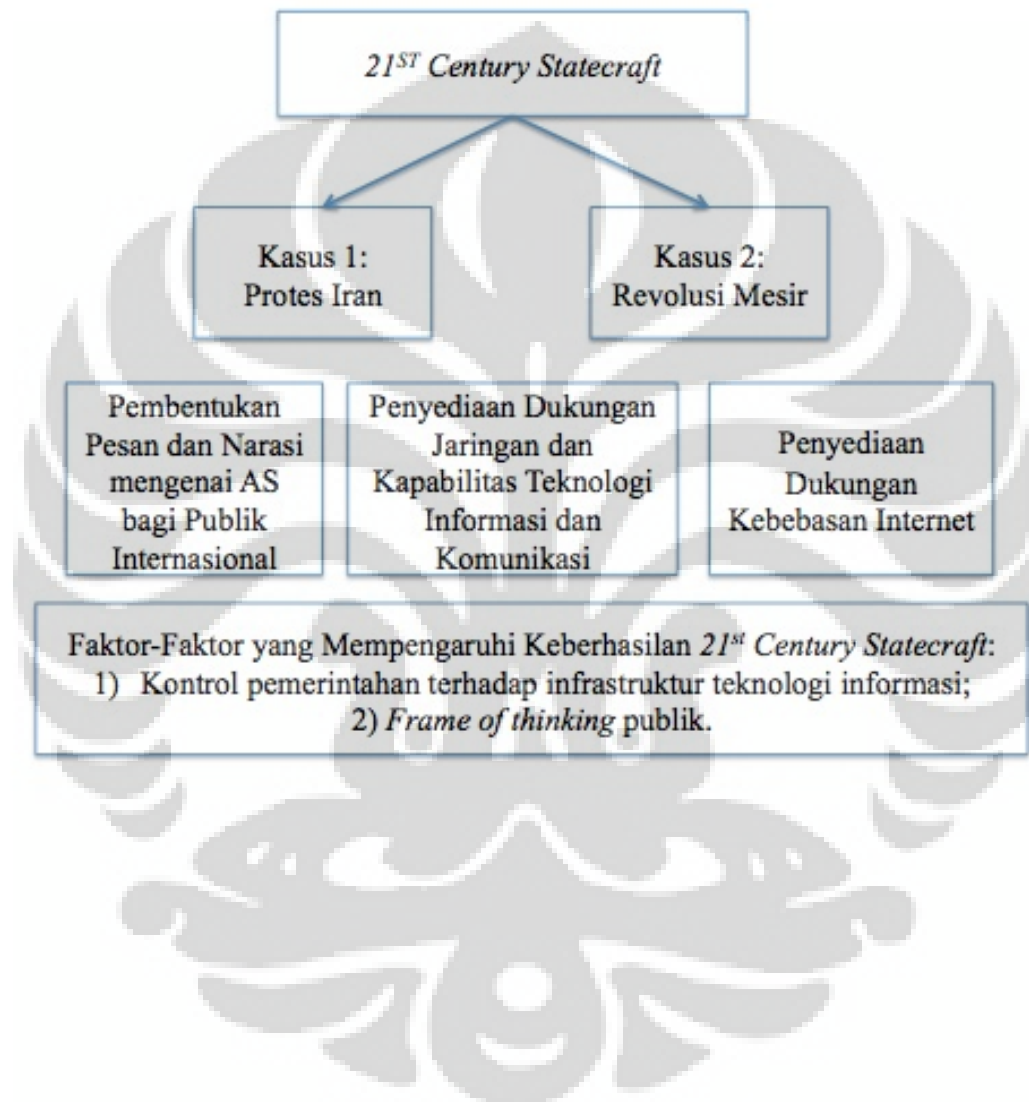
tersebut), namun pesan yang ingin disampaikan dapat terdispersi dengan menggunakan jaringan *Internet* serta *social media* yang dipakai.

Jadi, melalui kebijakan diplomasi digital yang dijalankan, pemerintahan Amerika Serikat berusaha membawa paradigma atau pandangan baru terhadap cara kerja kebijakan luar negerinya. Shirky berargumen bahwa kemunculan berbagai sumber daya baru yang hadir melalui Internet telah memunculkan surplus kognitif di tengah-tengah masyarakat.¹⁴² Alih-alih sekedar menjadi konsumen, sekarang berbagai orang mulai berperan dalam menggerakkan media baru (*new media*), yang menghasilkan implikasi yang signifikan. Kemunculan media yang semakin mudah diakses, murah, fleksibel, dan inklusif menghadirkan kesempatan baru bagi masyarakat untuk ikut menyumbang ide yang mereka miliki dibanding hanya menjadi audiens. Pada akhirnya, cara kerja masyarakat akan mengalami transformasi seiring perubahan peran yang terjadi ini. Dengan realisasi kenyataan baru inilah, AS mengutilisasi *21st Century Statecraft* sebagai strategi diplomasi barunya di tengah-tengah kemunculan aktor-aktor non-negara yang *power*-nya kian meningkat.

Di bawah ini, adalah diagram yang menunjukkan hasil temuan penelitian sehingga dapat dengan lebih jelas dimengerti signifikansi dari implementasi kebijakan *21st Century Statecraft* terhadap penyelenggaraan *soft power* Amerika Serikat.

¹⁴² Clay Shirky, *Cognitive Surplus*, hlm. 51.

Diagram III.1.
Hasil Temuan Penelitian



BAB IV

KESIMPULAN

IV.1. Kesimpulan

Adanya perubahan dunia seperti yang dikemukakan oleh Manuel Castells, dengan kemunculan *network society* merupakan salah satu faktor utama bagi Amerika Serikat—terutama Departemen Luar Negerinya di bawah pimpinan Hillary Clinton—untuk menyusun strategi diplomasi baru yang dikejawantahkan melalui *21st Century Statecraft*. Strategi yang mengutilisasi *soft power* yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini memegang peranan penting karena adanya perubahan paradigma kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahan Barack Obama setelah pemerintahan George W. Bush yang lebih berfokus pada penggunaan *hard power*, seperti ditunjukkan melalui perang di Afghanistan dan Irak.

Melalui dokumen QDDR, Hillary Clinton menekankan bahwa kebijakan luar negeri AS pada pemerintahan Obama akan lebih berfokus pada implementasi diplomasi dan aktivitas yang berhubungan dengan isu pembangunan—keduanya lebih menekankan pada esensi *soft power* dibanding *hard power* yang dimiliki oleh AS. Salah satu alasannya adalah perbaikan citra AS yang buruk selama masa pemerintahan Bush. Selain itu, arah kebijakan luar negeri yang seperti ini juga sejalan dengan latar belakang Obama yang berasal dari partai Demokrat, yang memiliki platform kebijakan luar negeri yang lebih difokuskan pada kerjasama.

Diplomasi digital sebagai pengejawantahan *soft power* di sini dilakukan sebagai tanggapan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi yang penggunaannya semakin mengglobal. Dari sini, muncul sebuah jaringan publik yang menggunakan perangkat-perangkat teknologi tersebut yang dapat menjadi sasaran baru dari kebijakan *21st Century Statecraft* ini. Dengan mengutilisasi jaringan-jaringan komunikasi

Strategi diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk melengkapi perangkat-perangkat diplomasi tradisional AS yang selama ini sudah ada dengan adaptasi penggunaan teknologi baru, namun juga mendukung nilai-nilai kontemporer dalam implementasinya. Salah satu nilai ini adalah kebebasan Internet yang terus-menerus

dilontarkan oleh Presiden Barack Obama dan Hillary Clinton dalam berbagai pidato yang mereka berikan berkaitan dengan strategi diplomasi digital ini.

Meskipun demikian, kesuksesan diplomasi digital Amerika Serikat tidak serta-merta dapat digantungkan pada anggapan bahwa dunia pada saat ini telah bertransformasi menjadi suatu *network society*, yang dikemukakan oleh Castells. Konsep *network society* ini seakan-akan memudahkan diplomasi yang dijalankan oleh AS dengan mendukung anggapan bahwa pesan dan narasi akan lebih mudah untuk disebarkan dan diterima oleh publik internasional.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi diplomasi digital AS melalui kebijakan *21st Century Statecraft*. Seperti ditunjukkan oleh studi kasus komparatif antara Protes Iran dan Revolusi Mesir, faktor-faktor utama ini adalah: **1) kontrol pemerintahan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan 2) *frame of thinking* dari masyarakat di tiap-tiap negara.**

Melalui diplomasi digital, Amerika Serikat juga berupaya untuk menjangkau sumber daya yang sebelumnya belum pernah dapat diutilisasi secara maksimal, yaitu publik/masyarakat di negara lain, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Meskipun tidak seluruh kalangan masyarakat memiliki akses Internet dan masih “buta” akan berbagai perangkat teknologi informasi yang kontemporer, data statistik menunjukkan bahwa mayoritas kalangan muda telah memiliki akses terhadap Internet dan perangkat *social media* yang disediakannya. Hal ini selaras dengan pandangan yang diungkapkan oleh Clay Shirky bahwa generasi muda telah menjadi *digital native*, di mana dinamika komunikasi yang terjadi di dunia maya dilihat sama signifikannya dengan yang terjadi di dunia nyata (dalam hal ini, melalui media cetak (koran, majalah), media elektronik (televisi, radio) yang sebagian darinya menyampaikan pesan dari pemerintahan negaranya). Kekurangan yang mungkin muncul adalah tidak seluruh orang di dalam suatu masyarakat memiliki akses ke Internet. Tetapi berdasarkan argumen Shirky, generasi mudalah yang memiliki dampak secara besar terhadap penggunaan Internet. Dan kasus di Iran dan Mesir menunjukkan bahwa generasi muda

pulalah yang secara aktif menggunakan *social media* untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Meskipun terjadi perbedaan *outcome* di kedua negara, strategi *21st Century Statecraft* yang dilakukan oleh AS sampai batasan tertentu mampu mempengaruhi pergerakan masyarakat sipil di sana. Di Iran, dengan lobi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS bagi *Twitter*, masyarakat Iran masih tetap dapat menggunakan perangkat *social media* ini. Sementara itu, di Mesir, dengan bantuan yang AS berikan untuk pengembangan perangkat-perangkat baru, seperti pemetaan *Ushahidi*, gerakan-gerakan revolusioner di negara tersebut dapat mengorganisasikan diri mereka dengan lebih baik dan efektif.

Namun, perlu diperhatikan juga bahwa meskipun tampak positif, dengan diplomasi digital, AS berusaha untuk menyampaikan pesan dan narasi tertentu kepada masyarakat sehingga dapat muncul sentimen pro-AS dari beberapa kelompok di publik. Berdasarkan hasil temuan penelitian, tentu saja hal ini sangat bergantung pada salah satunya *frame of thinking* yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Bila *frame of thinking* Iran susah untuk ditembus, hal yang sebaliknya terjadi di Mesir.

Yang perlu ditekankan di sini adalah diplomasi digital bersifat komplementer terhadap keseluruhan strategi kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Amerika Serikat, dan terutama lebih berkontribusi pada penyelenggaraan *soft power* negara ini. Namun sebagai manifestasi *soft power* AS, diplomasi digital berhasil sampai batasan tertentu, dalam menyampaikan pesan AS terhadap publik di Iran dan Mesir.

Dalam kasus ini, pengejawantahan *soft power* dipakai dan dipandang lebih efektif karena sasaran yang dituju oleh Amerika Serikat adalah publik di negara lain yang *mindset*-nya berusaha untuk dipengaruhi. Penggunaan *hard power* tentunya tidak akan efektif dan tidak akan mendukung pencapaian tujuan ini, khususnya dalam dua kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, karena AS telah mendapat berbagai kecaman akan keterlibatannya dalam perang di Afghanistan dan Irak yang dimulai pada pemerintahan George W. Bush.

Diplomasi digital di bawah tajuk *21st Century Statecraft* menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebijakan diplomasi publik AS. Hal ini dikarenakan realitas dunia

sekarang di mana Internet lama-kelamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di berbagai negara. Penulis melihat bahwa dengan keadaan dunia yang seperti ini, maka diplomasi digital dapat menjadi *salah satu* perangkat kebijakan luar negeri yang diimplementasikan oleh suatu negara. Namun keberhasilan penyelenggaraan *soft power* suatu negara tidak dapat serta-merta digantungkan pada penggunaan strategi ini semata dan membutuhkan strategi-strategi lain yang dimiliki oleh suatu negara dalam “arsenal” diplomasinya.

IV.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan sejumlah rekomendasi berikut, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ditujukan sebagai rekomendasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, dan yang kedua adalah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin membahas lebih lanjut mengenai diplomasi digital serta kebijakan luar negeri AS.

Pertama, rekomendasi bagi Indonesia dapat didasarkan pada kesimpulan hasil temuan penelitian di atas bahwa bahwa *soft power* AS sekarang diimplementasikan melalui strategi baru, yaitu diplomasi digital, yang berjalan dengan adanya asumsi bahwa dunia yang semakin terinterkoneksi akan mempermudah strategi ini. Dari sini, dapat ditarik pembelajaran yang berguna bagi Indonesia dalam menyikapi strategi diplomasi seperti ini.

1. Mempertimbangkan strategi diplomasi digital yang dijalankan oleh Amerika Serikat sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, maka Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat mulai mengaplikasikan penggunaan berbagai perangkat-perangkat teknologi baru ini untuk menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk penyebaran informasi ke berbagai negara—baik itu yang ditujukan pada pemerintahan, institusi privat, maupun publik—untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang Indonesia miliki.
2. Mengingat perkembangan teknologi informasi terjadi secara internasional, pemerintah Indonesia dapat mulai untuk mencoba masuk ke dalam ranah

diplomasi digital dengan, misalnya, melakukan *engagement* dengan publik internasional melalui *Twitter*. Hal ini penting untuk mulai dilakukan karena diplomasi publik merupakan satu ranah dalam Kementerian Luar Negeri Indonesia yang belum dikembangkan secara sepenuhnya. Melalui strategi diplomasi digital, Indonesia dapat dengan lebih mudah menjangkau publik internasional serta pada saat yang bersamaan menyebarkan informasi-informasi penting mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan hal-hal lainnya. Meskipun belum mencapai tahap yang lebih lanjut, strategi ini pada awalnya dapat digunakan untuk mempromosikan Indonesia di tingkat internasional, misalnya melalui sektor pariwisata dan budaya yang dimilikinya.

3. Pemerintah Indonesia tidak boleh lengah dalam melihat bagaimana pemerintahan AS menggunakan strategi diplomasi digital untuk langsung menciptakan hubungan dengan publik di negaranya. Dengan semakin maraknya kebijakan diplomasi digital AS di Indonesia (misalnya melalui ajang *Tech@State* yang memberikan kesempatan bagi NGO di Indonesia untuk mengembangkan kapasitas teknologinya). Selain itu, Kedutaan Besar di AS telah memiliki akun di *Twitter* dan *Facebook* yang menyebarkan berbagai info bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya mengenai kebijakan yang AS miliki, namun juga dinamika di bidang politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus menaruh lebih banyak perhatian akan saluran-saluran mana saja yang digunakan oleh AS untuk lewat untuk mempengaruhi publik Indonesia, yang dalam hal ini berkaitan dengan strategi diplomasi digital negara tersebut.

Kedua, terdapat dua poin rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas isu-isu yang bersinggungan pula dengan diplomasi digital dan kebijakan luar negeri AS.

1. Penelitian ini hanya berfokus pada strategi diplomasi digital AS, sementara makin banyak negara lain yang mulai memasuki ranah ini, contohnya Inggris. Maka akan sangat berguna bila penelitian selanjutnya dapat membahas

mengenai aplikasi diplomasi digital oleh negara-negara lain tersebut dan membandingkan implikasi yang dihasilkan dari strategi tersebut.

2. Penelitian ini hanya berfokus pada strategi diplomasi digital AS, sementara makin banyak negara lain yang mulai memasuki ranah ini, contohnya Inggris. Maka akan sangat berguna bila penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai aplikasi diplomasi digital oleh negara-negara lain tersebut dan membandingkan implikasi yang dihasilkan dari strategi tersebut.
3. Penelitian ini membahas strategi diplomasi digital AS dalam kasus spesifik, yaitu Iran dan Mesir dalam keadaan protes/revolusi. Bila penelitian selanjutnya membahas bagaimana strategi *21st Century Statecraft* diaplikasikan di kasus-kasus lain (seperti dalam bidang kemanusiaan atau kebudayaan), maka akan menarik untuk melihat perbandingan antara capaian yang dihasilkan, mengingat perbedaan sifat dari setiap kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brzezinski, Zbigniew, Brent Scowcroft, dan David Ignatius. *America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy*. New York: Basic Books, 2008.
- Castells, Manuel. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- _____. *The Rise of Network Society: The Information Age: Economic, Society, and Culture*, Volume I. West Sussex: Blackwell, 2000.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications, Inc: California, 1994.
- Dizard, Jr., Wilson. *Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age*. Westport: Praeger Publishers, 2001.
- Eriksen, Thomas Hylland, *Globalization: The Key Concepts*. Oxford & New York: Berg, 2007.
- Fitzpatrick, Kathy R. *U.S. Public Diplomacy in a Post-9/11 World: From Messaging to Mutuality*. Los Angeles: Figueroa Press, 2011.
- Jönsson, Christer dan Martin Hall. *Essence of Diplomacy*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005.
- Khanna, Parag. *How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance*. New York: Random House, 2011.
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn & Bacon : Boston, 2003.
- Nye, Jr., Joseph S. *Power in a Global Information Age: From Realism to Globalization*. London: Routledge, 2004.
- _____. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs, 2004.

- Shirky, Clay. *Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age*. New York: The Penguin Press, 2010.
- Pollack, Kenneth M. *A Path Out of the Desert: A Grand Strategy for America in the Middle East*. New York: Random House, 2008.
- Rana, Kishan S. *21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*. London: Continuum, 2011.
- Morozov, Evgeny. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: PublicAffairs, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta : Bandung, 2006.
- Zaharna, R.S. *Battle to Bridges: U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy After 9/11*. New York & Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.

Artikel dalam Buku

- Hashem, Mahboub dan Abeer Najjar. "The Role and Impact of New Information Technology (NIT) Applications in Disseminating News about the Recent Iran Presidential Election and Uprisings." Yahya R. Kamalipour (ed.). *Media, Power, and Politics in the Digital Age: The 2009 Presidential Election Uprising in Iran*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010.
- Kamalipour, Yahya R. "Introduction." Yahya R. Kamalipour (ed.). *Media, Power, and Politics in the Digital Age: The 2009 Presidential Election Uprising in Iran*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010.
- Melissen, Jan. "The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice." Jan Melissen (ed.). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. New York & Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005.

Artikel dalam Jurnal

- Clinton, Hillary Rodham. "Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development." *Foreign Affairs*, 89, No. 6, (November/December 2010).

- Hong, Zhaohui dan Yi Sun. "The Butterfly Effect and the Making of 'Ping-Ping' Diplomacy." *Journal of Contemporary China*, 9, No. 25, (2000).
- Nye, Jr., Joseph S. "Public Diplomacy and Soft Power." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* (2008).
- Schmidt, Eric dan Jared Cohen. "The Digital Disruption: Connectivity and the Diffusion of Power." *Foreign Affairs*, 89, No. 6, November/December 2010.
- Shirky, Clay. "The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change." *Foreign Affairs*, 90, No. 1, (January/February 2011).

Artikel dalam Media Cetak (Koran & Majalah)

- DuPont, Sam. "Digital Diplomacy." *Foreign Policy* (August 2010).
- Fassihi, Farnaz. "Iranian Crackdown Goes Global." *Wall Street Journal* (December 3, 2009).
- Gustin, Sam. "Digital Diplomacy." *TIME* (September 2, 2011).
- Lichtenstein, Jesse. "Digital Diplomacy." *New York Times Magazine* (July 16, 2010).
- Morozov, Evgeny. "The Digital Dictatorship." *Wall Street Journal* (February 20, 2010).
- Sheridan, Mary Beth. "U.S. warns against blocking social media, elevates Internet freedom policies." *The Washington Post* (January 28, 2011).
- Sullivan, Andrew. "The Revolution Will be Twittered." *The Atlantic* (June 13, 2009).
- "Editorial: Iran's Twitter Revolution." *The Washington Post* (June 16, 2009).

Referensi Internet

- Ackerman, Spencer. "Egypt's Internet Shutdown Can't Stop Mass Protests" diakses dari <http://www.wired.com/dangerroom/2011/01/egypts-internet-shutdown-cant-stop-mass-protests/>
- Assassa, Ghazy. "Egyptian revolution suffers from a bifurcation in directions" diakses dari <http://goarticles.com/article/Egyptian-revolution-suffers-from-a-bifurcation-in-directions/5745104/>
- Bozorgmehr, Najmeh. "Facebook sets tone in Iran's electoral Contest" diakses dari <http://www.ft.com/cms/s/0/da46ad4e-3f19-11de-ae4f-00144feabdc0.html/>

- Boyd, E.B. "How Social Media Accelerated the Uprising in Egypt" diakses dari <http://www.fastcompany.com/1722492/how-social-media-accelerated-the-uprising-in-egypt/>
- _____. "State Department is Trying to Make a Thousand Ushahidis Bloom" diakses dari <http://www.fastcoexist.com/1677975/state-department-is-trying-to-make-a-thousand-ushahidis-bloom/>
- Cohen, Noam. "Egyptians Were Unplugged, and Uncowed" diakses dari <http://www.nytimes.com/2011/02/21/business/media/21link.html/>
- DuPont, Sam. "Reflections on 21st Century Statecraft" diakses dari <http://ndn.org/blog/2010/01/reflections-21st-century-statecraft/>
- Goodman, J. David. "Iran Shuttters U.S. Embassy on the Web" (diakses dari <http://www.nytimes.com/2011/12/08/world/middleeast/iran-shuttters-us-embassy-on-the-web.html/>)
- Grossman, Lev. "Iran Protests: Twitter, the Medium of the Movement" (*TIME*, June 17, 2009) diakses dari <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1905125,00.html/>
- Kang, Cecilia. "Haystack stops tests of iran anti-censor software amid security concerns" diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/13/AR2010091305827.html/>
- Kull, Steven, et al. *An Analysis of Multiple Polls of the Iranian Public (World Public Opinion*, 2010) diakses dari http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb10/IranElection_Feb10_rpt.pdf/
- Levi, Michelle. "Gates Calls Twitter 'A Huge Strategic Asset'" diakses dari http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-5096183-503544.html/
- Leyden, John. "Anon hackers join Egyptian protests" diakses dari http://www.theregister.co.uk/2011/01/27/anonymous_egyptian_protest/
- Lucero, Megan. "Twitter inhibited Green Movement success" diakses dari <http://writeswebwatch.wordpress.com/2011/03/29/twitter-inhibited-green-movement-success/>

- Nye, Jr., Joseph S. "The Benefits of Soft Power" diakses dari <http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html/>
- Peterson, Scott. "Iran protests: Is Supreme Leader Ali Khamenei winning?" diakses dari <http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0318/Iran-protests-Is-Supreme-Leader-Ali-Khamenei-winning/>
- Pleming, Sue. "U.S. State Department speaks to Twitter over Iran" (Reuters, June 16, 2009) diakses dari <http://www.reuters.com/article/2009/06/16/us-iran-election-twitter-usa-idUSWB01137420090616/>
- Quinn, Andrew. "U.S. plans 'virtual embassy' for Iran, say Clinton" (26 October 2011), diakses dari <http://english.alarabiya.net/articles/2011/10/26/173911.html/>
- Ross, Alec. "21st Century Statecraft: Continuing the Conversation" diakses dari http://blogs.state.gov/index.php/site/entry/21st_century_statecraft_continuing_the_conversation/
- Sheridan, Mary Beth. "U.S. warns against blocking social media, elevates Internet freedom policies" (*The Washington Post*, January 28, 2011) diakses dari http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/28/AR2011012804554_2.html?sid=ST2011012806871
- Sifry, Micah L. "Hillary Clinton Launches '21st Century Statecraft' Initiative by State Department" diakses dari <http://techpresident.com/blog-entry/hillary-clinton-launches-21st-century-statecraft-initiative-state-department/>
- Zogby, John. "2010 Poll: Egyptians Dislike Obama, See U.S./Israel as 'Threats,' Want Clergy More Political" (*Huffington Post*, March 2, 2011) diakses dari http://www.huffingtonpost.com/john-zogby/polls-egypt-obama_b_818192.html/
- Zuckerman, Ethan. "The Cute Cat Theory Talk at ETech" diakses dari <http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/03/08/the-cute-cat-theory-talk-at-etech/>
- "21st Century Statecraft" | U.S. Department of State" diakses dari <http://www.state.gov/statecraft/index.htm/>

- “Civil Society 2.0 | U.S. Department of State” diakses dari <http://www.state.gov/statecraft/cs20/index.htm/>
- “Crowdmapping Egypt #Jan25” (Ushahidi Blog, February 7, 2011) diakses dari <http://blog.ushahidi.com/index.php/2011/02/07/crowdmapping-egypt-jan25/>
- “Egypt News – Revolution and Aftermath” diakses dari <http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/egypt/index.html/>
- “Egypt’s Revolution by Social Media” diakses dari <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703786804576137980252177072.html/>
- “Egypt severs Internet connection amid growing unrest” (*BBC News*, 28 January 2011) diakses dari <http://www.bbc.com/news/technology-12306041/>
- “Hackers Take Down Government Websites in Egypt and Yemen” diakses dari <http://mashable.com/2011/02/03/hackers-egypt/>
- “Internet brings events in Iran to life” (*BBC News*, 15 June 2009) diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8099579.stm/>
- “Iran Internet Usage and Telecommunications Report” diakses dari <http://www.internetworldstats.com/me/ir.htm/>
- “Mapping the Egypt Protests and Libya Crisis” (Ushahidi Blog, April 7, 2011) diakses dari <http://blog.ushahidi.com/index.php/2011/04/07/mapping-egypt-and-libya/>
- “Remarks at the Global Press Conference | Hillary Rodham Clinton” diakses dari <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/05/123645.htm/>
- “Remarks of President Obama Marking Nowruz | The White House” diakses dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-marking-nowruz/>
- “Office of eDiplomacy” diakses dari <http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/>
- “Speed Reduced for High Speed Internet in Iran” diakses dari http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2006/10/061020_fb_rsh_adsl.shtml/
- “Ushahidi: About Us” diakses dari <http://ushahidi.com/about-us/>

“What is digital diplomacy” diakses dari

<http://digitaldiplomacy.fco.gov.uk/en/about/digital-diplomacy/>

Dokumen

- Figliola, Patricia Moloney, Casey L. Addis, dan Thomas Lum. *U.S. Initiatives to Promote Global Internet Freedom: Issues, Policy, and Technology*. CSR Report for Congress, 2011.
- Khatib, Lina, William Dutton, dan Michael Thelwall. *Public Diplomacy 2.0: An Exploratory Case Study of the US Digital Outreach Team*. Center on Democracy, Development, and the Rule of Law (CDDRL) Working Papers, Number 120, January 2011.
- King, Rita J. dan Joshua S. Fouts, *Digital Diplomacy: Understanding Islam Through Virtual Worlds*. Carnegie Council, 2009.
- Pahlavi, Pierre C. *Cyber-Diplomacy: A New Strategy of Influence*. Paper presented to the Canadian Political Science Association General Meeting, 2003.
- Sharp, Jeremy M. *Egypt in Transition*. CSR Report for Congress, 2011.
- _____. *Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. Foreign Policy*. CSR Report for Congress, 2011.
- Westcott, Nicholas. *Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations*. Oxford Research Institute Research Report 16, July 2008.
- United States Department of State. *Leading Through Civilian Power: The First Quadrennial Diplomacy and Development Review*. Washington, D.C.: U.S. Department of State, 2010.
- _____. *2009 Human Rights Report: Iran*. Washington D.C.: U.S. Department of State, 2010.
- U.S. Department of State and USAID. *Leading Through Civilian Power: The First Quadrennial Diplomacy and Development Review*. Washington D.C.: U.S. Department of State, 2010.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Teks Pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary R. Clinton mengenai *21st Century Statecraft* dan Kebebasan Internet, di Washington, DC, 21 Januari 2010

Thank you very much, Alberto, for not only that kind introduction but your and your colleagues' leadership of this important institution. It's a pleasure to be here at the Newseum. The Newseum is a monument to some of our most precious freedoms, and I'm grateful for this opportunity to discuss how those freedoms apply to the challenges of the 21st century.

Although I can't see all of you because in settings like this, the lights are in my eyes and you are in the dark, I know that there are many friends and former colleagues. I wish to acknowledge Charles Overby, the CEO of Freedom Forum here at the Newseum; Senator Edward Kaufman and Senator Joe Lieberman, my former colleagues in the Senate, both of whom worked for passage of the Voice Act, which speaks to Congress's and the American people's commitment to internet freedom, a commitment that crosses party lines and branches of government.

Also, I'm told here as well are Senator Sam Brownback, Senator Ted Kaufman, Representative Loretta Sanchez, many representatives of the Diplomatic Corps, ambassadors, chargés, participants in our International Visitor Leadership Program on internet freedom from China, Colombia, Iran, and Lebanon, and Moldova. And I also want to acknowledge Walter Isaacson, president of the Aspen Institute, recently named to our Broadcasting Board of Governors and, of course, instrumental in supporting the work on internet freedom that the Aspen Institute has been doing.

This is an important speech on a very important subject. But before I begin, I want to just speak briefly about Haiti, because during the last eight days, the people of Haiti and the people of the world have joined together to deal with a tragedy of staggering proportions. Our hemisphere has seen its share of hardship, but there are few precedents for the situation we're facing in Port-au-Prince. Communication networks have played a critical role in our response. They were, of course, decimated and in many places totally destroyed. And in the hours after the quake, we worked with partners in the private sector; first, to set up the text "HAITI" campaign so that mobile phone users in the United States could donate to relief efforts via text messages. That initiative has been a showcase for the generosity of the American people, and thus far, it's raised over \$25 million for recovery efforts.

Information networks have also played a critical role on the ground. When I was with President Preval in Port-au-Prince on Saturday, one of his top priorities was to try to get communication up and going. The government couldn't talk to each other, what was left of it, and NGOs, our civilian leadership, our military leadership were severely impacted. The technology community has set up interactive maps to help us identify needs and target resources. And on Monday, a seven-year-old girl and two women were pulled from the rubble of a collapsed supermarket by an American search-and-rescue team after they sent a text message calling for help. Now, these examples are manifestations of a much broader phenomenon.

The spread of information networks is forming a new nervous system for our planet. When something happens in Haiti or Hunan, the rest of us learn about it in real time – from real people. And we can respond in real time as well. Americans eager to help in the aftermath of a disaster and the girl trapped in the supermarket are connected in ways that were not even imagined a year ago, even a generation ago. That same principle applies to almost all of humanity today. As we sit here, any of you – or maybe more likely, any of our children – can take out the tools that many carry every day and transmit this discussion to billions across the world.

Now, in many respects, information has never been so free. There are more ways to spread more ideas to more people than at any moment in history. And even in authoritarian countries, information networks are helping people discover new facts and making governments more accountable.

During his visit to China in November, for example, President Obama held a town hall meeting with an online component to highlight the importance of the Internet. In response to a question that was sent in over the Internet, he defended the right of people to freely access information, and said that the more freely information flows, the stronger societies become. He spoke about how access to information helps citizens hold their own governments accountable, generates new ideas, encourages creativity and entrepreneurship. The United States belief in that ground truth is what brings me here today.

Because amid this unprecedented surge in connectivity, we must also recognize that these technologies are not an unmitigated blessing. These tools are also being exploited to undermine human progress and political rights. Just as steel can be used to build hospitals or machine guns, or nuclear power can either energize a city or destroy it, modern information networks and the technologies they support can be harnessed for good or for ill. The same networks that help organize movements for freedom also enable al-Qaida to spew hatred and incite violence against the innocent. And technologies with the potential to open up access to government and promote transparency can also be hijacked by governments to crush dissent and deny human rights.

In the last year, we've seen a spike in threats to the free flow of information. China, Tunisia, and Uzbekistan have stepped up their censorship of the internet. In Vietnam, access to popular social networking sites has suddenly disappeared. And last Friday in Egypt, 30 bloggers and activists were detained. One member of this group, Bassem Samir, who is thankfully no longer in prison, is with us today. So while it is clear that the spread of these technologies is transforming our world, it is still unclear how that transformation will affect the human rights and the human welfare of the world's population.

On their own, new technologies do not take sides in the struggle for freedom and progress, but the United States does. We stand for a single Internet where all of humanity has equal access to knowledge and ideas. And we recognize that the world's information infrastructure will become what we and others make of it. Now, this challenge may be new, but our responsibility to help ensure the free exchange of ideas goes back to the birth of our republic. The words of the First Amendment to our Constitution are carved in 50 tons of Tennessee marble on the front of this building. And every generation of Americans has worked to protect the values etched in that stone.

Franklin Roosevelt built on these ideas when he delivered his Four Freedoms speech in 1941. Now, at the time, Americans faced a cavalcade of crises and a crisis of confidence. But the vision of a world in which all people enjoyed freedom of expression, freedom of worship, freedom from want, and freedom from fear transcended the troubles of his day. And years later, one of my heroes, Eleanor Roosevelt, worked to have these principles adopted as a cornerstone of the Universal Declaration of Human Rights. They have provided a lodestar to every succeeding generation, guiding us, galvanizing us, and enabling us to move forward in the face of uncertainty.

So as technology hurtles forward, we must think back to that legacy. We need to synchronize our technological progress with our principles. In accepting the Nobel Prize, President Obama spoke about the need to build a world in which peace rests on the inherent rights and dignities of every individual. And in my speech on human rights at Georgetown a few days later, I talked about how we must find ways to make human rights a reality. Today, we find an urgent need to protect these freedoms on the digital frontiers of the 21st century.

There are many other networks in the world. Some aid in the movement of people or resources, and some facilitate exchanges between individuals with the same work or interests. But the Internet is a network that magnifies the power and potential of all others. And that's why we believe it's critical that its users are assured certain basic freedoms. Freedom of expression is first among them. This freedom is no longer defined solely by whether citizens can go into the town square and criticize their government without fear of retribution. Blogs, emails, social networks, and text

messages have opened up new forums for exchanging ideas, and created new targets for censorship.

As I speak to you today, government censors somewhere are working furiously to erase my words from the records of history. But history itself has already condemned these tactics. Two months ago, I was in Germany to celebrate the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall. The leaders gathered at that ceremony paid tribute to the courageous men and women on the far side of that barrier who made the case against oppression by circulating small pamphlets called samizdat. Now, these leaflets questioned the claims and intentions of dictatorships in the Eastern Bloc and many people paid dearly for distributing them. But their words helped pierce the concrete and concertina wire of the Iron Curtain.

The Berlin Wall symbolized a world divided and it defined an entire era. Today, remnants of that wall sit inside this museum where they belong, and the new iconic infrastructure of our age is the internet. Instead of division, it stands for connection. But even as networks spread to nations around the globe, virtual walls are cropping up in place of visible walls.

Some countries have erected electronic barriers that prevent their people from accessing portions of the world's networks. They've expunged words, names, and phrases from search engine results. They have violated the privacy of citizens who engage in non-violent political speech. These actions contravene the Universal Declaration on Human Rights, which tells us that all people have the right "to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." With the spread of these restrictive practices, a new information curtain is descending across much of the world. And beyond this partition, viral videos and blog posts are becoming the samizdat of our day.

As in the dictatorships of the past, governments are targeting independent thinkers who use these tools. In the demonstrations that followed Iran's presidential elections, grainy cell phone footage of a young woman's bloody murder provided a digital indictment of the government's brutality. We've seen reports that when Iranians living overseas posted online criticism of their nation's leaders, their family members in Iran were singled out for retribution. And despite an intense campaign of government intimidation, brave citizen journalists in Iran continue using technology to show the world and their fellow citizens what is happening inside their country. In speaking out on behalf of their own human rights, the Iranian people have inspired the world. And their courage is redefining how technology is used to spread truth and expose injustice.

Now, all societies recognize that free expression has its limits. We do not tolerate those who incite others to violence, such as the agents of al-Qaida who are, at this moment, using the Internet to promote the mass murder of innocent people across the world. And hate speech that targets individuals on the basis of their race, religion, ethnicity, gender, or sexual orientation is reprehensible. It is an unfortunate fact that these issues are both

growing challenges that the international community must confront together. And we must also grapple with the issue of anonymous speech. Those who use the Internet to recruit terrorists or distribute stolen intellectual property cannot divorce their online actions from their real world identities. But these challenges must not become an excuse for governments to systematically violate the rights and privacy of those who use the Internet for peaceful political purposes.

The freedom of expression may be the most obvious freedom to face challenges with the spread of new technologies, but it is not the only one. The freedom of worship usually involves the rights of individuals to commune or not commune with their Creator. And that's one channel of communication that does not rely on technology. But the freedom of worship also speaks to the universal right to come together with those who share your values and vision for humanity. In our history, those gatherings often took place in churches, synagogues, mosques and temples. Today, they may also take place on line.

The Internet can help bridge divides between people of different faiths. As the President said in Cairo, freedom of religion is central to the ability of people to live together. And as we look for ways to expand dialogue, the Internet holds out such tremendous promise. We've already begun connecting students in the United States with young people in Muslim communities around the world to discuss global challenges. And we will continue using this tool to foster discussion between individuals from different religious communities.

Some nations, however, have co-opted the Internet as a tool to target and silence people of faith. Last year, for example, in Saudi Arabia, a man spent months in prison for blogging about Christianity. And a Harvard study found that the Saudi Government blocked many web pages about Hinduism, Judaism, Christianity, and even Islam. Countries including Vietnam and China employed similar tactics to restrict access to religious information.

Now, just as these technologies must not be used to punish peaceful political speech, they must also not be used to persecute or silence religious minorities. Now, prayers will always travel on higher networks. But connection technologies like the Internet and social networking sites should enhance individuals' ability to worship as they see fit, come together with people of their own faith, and learn more about the beliefs of others. We must work to advance the freedom of worship online just as we do in other areas of life.

There are, of course, hundreds of millions of people living without the benefits of these technologies. In our world, as I've said many times, talent may be distributed universally, but opportunity is not. And we know from long experience that promoting social and economic development in countries where people lack access to knowledge, markets, capital, and opportunity can be frustrating and sometimes futile work. In this

context, the Internet can serve as a great equalizer. By providing people with access to knowledge and potential markets, networks can create opportunities where none exist.

Over the last year, I've seen this firsthand in Kenya, where farmers have seen their income grow by as much as 30 percent since they started using mobile banking technology; in Bangladesh, where more than 300,000 people have signed up to learn English on their mobile phones; and in Sub-Saharan Africa, where women entrepreneurs use the internet to get access to microcredit loans and connect themselves to global markets.

Now, these examples of progress can be replicated in the lives of the billion people at the bottom of the world's economic ladder. In many cases, the Internet, mobile phones, and other connection technologies can do for economic growth what the Green Revolution did for agriculture. You can now generate significant yields from very modest inputs. And one World Bank study found that in a typical developing country, a 10 percent increase in the penetration rate for mobile phones led to an almost 1 percent increase in per capita GDP. To just put this into context, for India, that would translate into almost \$10 billion a year.

A connection to global information networks is like an on-ramp to modernity. In the early years of these technologies, many believed that they would divide the world between haves and have-nots. But that hasn't happened. There are 4 billion cell phones in use today. Many of them are in the hands of market vendors, rickshaw drivers, and others who've historically lacked access to education and opportunity. Information networks have become a great leveler, and we should use them together to help lift people out of poverty and give them a freedom from want.

Now, we have every reason to be hopeful about what people can accomplish when they leverage communication networks and connection technologies to achieve progress. But make no mistake – some are and will continue to use global information networks for darker purposes. Violent extremists, criminal cartels, sexual predators, and authoritarian governments all seek to exploit these global networks. Just as terrorists have taken advantage of the openness of our societies to carry out their plots, violent extremists use the Internet to radicalize and intimidate. As we work to advance freedoms, we must also work against those who use communication networks as tools of disruption and fear.

Governments and citizens must have confidence that the networks at the core of their national security and economic prosperity are safe and resilient. Now this is about more than petty hackers who deface websites. Our ability to bank online, use electronic commerce, and safeguard billions of dollars in intellectual property are all at stake if we cannot rely on the security of our information networks.

Disruptions in these systems demand a coordinated response by all governments, the private sector, and the international community. We need more tools to help law enforcement agencies cooperate across jurisdictions when criminal hackers and

organized crime syndicates attack networks for financial gain. The same is true when social ills such as child pornography and the exploitation of trafficked women and girls online is there for the world to see and for those who exploit these people to make a profit. We applaud efforts such as the Council on Europe's Convention on Cybercrime that facilitate international cooperation in prosecuting such offenses. And we wish to redouble our efforts.

We have taken steps as a government, and as a Department, to find diplomatic solutions to strengthen global cyber security. We have a lot of people in the State Department working on this. They've joined together, and we created two years ago an office to coordinate foreign policy in cyberspace. We've worked to address this challenge at the UN and in other multilateral forums and to put cyber security on the world's agenda. And President Obama has just appointed a new national cyberspace policy coordinator who will help us work even more closely to ensure that everyone's networks stay free, secure, and reliable.

States, terrorists, and those who would act as their proxies must know that the United States will protect our networks. Those who disrupt the free flow of information in our society or any other pose a threat to our economy, our government, and our civil society. Countries or individuals that engage in cyber attacks should face consequences and international condemnation. In an internet-connected world, an attack on one nation's networks can be an attack on all. And by reinforcing that message, we can create norms of behavior among states and encourage respect for the global networked commons.

The final freedom, one that was probably inherent in what both President and Mrs. Roosevelt thought about and wrote about all those years ago, is one that flows from the four I've already mentioned: the freedom to connect – the idea that governments should not prevent people from connecting to the internet, to websites, or to each other. The freedom to connect is like the freedom of assembly, only in cyberspace. It allows individuals to get online, come together, and hopefully cooperate. Once you're on the Internet, you don't need to be a tycoon or a rock star to have a huge impact on society.

The largest public response to the terrorist attacks in Mumbai was launched by a 13-year-old boy. He used social networks to organize blood drives and a massive interfaith book of condolence. In Colombia, an unemployed engineer brought together more than 12 million people in 190 cities around the world to demonstrate against the FARC terrorist movement. The protests were the largest antiterrorist demonstrations in history. And in the weeks that followed, the FARC saw more demobilizations and desertions than it had during a decade of military action. And in Mexico, a single email from a private citizen who was fed up with drug-related violence snowballed into huge demonstrations in all of the country's 32 states. In Mexico City alone, 150,000 people took to the streets in protest. So the Internet can help humanity push back against those who promote violence and crime and extremism.

In Iran and Moldova and other countries, online organizing has been a critical tool for advancing democracy and enabling citizens to protest suspicious election results. And even in established democracies like the United States, we've seen the power of these tools to change history. Some of you may still remember the 2008 presidential election here.

The freedom to connect to these technologies can help transform societies, but it is also critically important to individuals. I was recently moved by the story of a doctor – and I won't tell you what country he was from – who was desperately trying to diagnose his daughter's rare medical condition. He consulted with two dozen specialists, but he still didn't have an answer. But he finally identified the condition, and found a cure, by using an Internet search engine. That's one of the reasons why unfettered access to search engine technology is so important in individuals' lives.

Now, the principles I've outlined today will guide our approach in addressing the issue of Internet freedom and the use of these technologies. And I want to speak about how we apply them in practice. The United States is committed to devoting the diplomatic, economic, and technological resources necessary to advance these freedoms. We are a nation made up of immigrants from every country and every interest that spans the globe. Our foreign policy is premised on the idea that no country more than America stands to benefit when there is cooperation among peoples and states. And no country shoulders a heavier burden when conflict and misunderstanding drive nations apart. So we are well placed to seize the opportunities that come with interconnectivity. And as the birthplace for so many of these technologies, including the Internet itself, we have a responsibility to see them used for good. To do that, we need to develop our capacity for what we call, at the State Department, 21st century statecraft.

Realigning our policies and our priorities will not be easy. But adjusting to new technology rarely is. When the telegraph was introduced, it was a source of great anxiety for many in the diplomatic community, where the prospect of receiving daily instructions from capitals was not entirely welcome. But just as our diplomats eventually mastered the telegraph, they are doing the same to harness the potential of these new tools as well.

And I'm proud that the State Department is already working in more than 40 countries to help individuals silenced by oppressive governments. We are making this issue a priority at the United Nations as well, and we're including Internet freedom as a component in the first resolution we introduced after returning to the United Nations Human Rights Council.

We are also supporting the development of new tools that enable citizens to exercise their rights of free expression by circumventing politically motivated censorship. We are providing funds to groups around the world to make sure that those tools get to the people who need them in local languages, and with the training they need to access the

Internet safely. The United States has been assisting in these efforts for some time, with a focus on implementing these programs as efficiently and effectively as possible. Both the American people and nations that censor the Internet should understand that our government is committed to helping promote Internet freedom.

We want to put these tools in the hands of people who will use them to advance democracy and human rights, to fight climate change and epidemics, to build global support for President Obama's goal of a world without nuclear weapons, to encourage sustainable economic development that lifts the people at the bottom up.

That's why today I'm announcing that over the next year, we will work with partners in industry, academia, and nongovernmental organizations to establish a standing effort that will harness the power of connection technologies and apply them to our diplomatic goals. By relying on mobile phones, mapping applications, and other new tools, we can empower citizens and leverage our traditional diplomacy. We can address deficiencies in the current market for innovation.

Let me give you one example. Let's say I want to create a mobile phone application that would allow people to rate government ministries, including ours, on their responsiveness and efficiency and also to ferret out and report corruption. The hardware required to make this idea work is already in the hands of billions of potential users. And the software involved would be relatively inexpensive to develop and deploy.

If people took advantage of this tool, it would help us target our foreign assistance spending, improve lives, and encourage foreign investment in countries with responsible governments. However, right now, mobile application developers have no financial assistance to pursue that project on their own, and the State Department currently lacks a mechanism to make it happen. But this initiative should help resolve that problem and provide long-term dividends from modest investments in innovation. We're going to work with experts to find the best structure for this venture, and we'll need the talent and resources of technology companies and nonprofits in order to get the best results most quickly. So for those of you in the room who have this kind of talent, expertise, please consider yourselves invited to help us.

In the meantime, there are companies, individuals, and institutions working on ideas and applications that could already advance our diplomatic and development objectives. And the State Department will be launching an innovation competition to give this work an immediate boost. We'll be asking Americans to send us their best ideas for applications and technologies that help break down language barriers, overcome illiteracy, connect people to the services and information they need. Microsoft, for example, has already developed a prototype for a digital doctor that could help provide medical care in isolated rural communities. We want to see more ideas like that. And we'll work with the winners of the competition and provide grants to help build their ideas to scale.

Universitas Indonesia

Now, these new initiatives will supplement a great deal of important work we've already done over this past year. In the service of our diplomatic and diplomacy objectives, I assembled a talented and experienced team to lead our 21st century statecraft efforts. This team has traveled the world helping governments and groups leverage the benefits of connection technologies. They have stood up a Civil Society 2.0 Initiative to help grassroots organizations enter the digital age. They are putting in place a program in Mexico to help combat drug-related violence by allowing people to make untracked reports to reliable sources to avoid having retribution visited against them. They brought mobile banking to Afghanistan and are now pursuing the same effort in the Democratic Republic of the Congo. In Pakistan, they created the first-ever social mobile network, called Our Voice, that has already produced tens of millions of messages and connected young Pakistanis who want to stand up to violent extremism.

In a short span, we have taken significant strides to translate the promise of these technologies into results that make a difference. But there is still so much more to be done. And as we work together with the private sector and foreign governments to deploy the tools of 21st century statecraft, we have to remember our shared responsibility to safeguard the freedoms that I've talked about today. We feel strongly that principles like information freedom aren't just good policy, not just somehow connected to our national values, but they are universal and they're also good for business.

To use market terminology, a publicly listed company in Tunisia or Vietnam that operates in an environment of censorship will always trade at a discount relative to an identical firm in a free society. If corporate decision makers don't have access to global sources of news and information, investors will have less confidence in their decisions over the long term. Countries that censor news and information must recognize that from an economic standpoint, there is no distinction between censoring political speech and commercial speech. If businesses in your nations are denied access to either type of information, it will inevitably impact on growth.

Increasingly, U.S. companies are making the issue of Internet and information freedom a greater consideration in their business decisions. I hope that their competitors and foreign governments will pay close attention to this trend. The most recent situation involving Google has attracted a great deal of interest. And we look to the Chinese authorities to conduct a thorough review of the cyber intrusions that led Google to make its announcement. And we also look for that investigation and its results to be transparent.

The Internet has already been a source of tremendous progress in China, and it is fabulous. There are so many people in China now online. But countries that restrict free access to information or violate the basic rights of Internet users risk walling themselves off from the progress of the next century. Now, the United States and China have

different views on this issue, and we intend to address those differences candidly and consistently in the context of our positive, cooperative, and comprehensive relationship.

Now, ultimately, this issue isn't just about information freedom; it is about what kind of world we want and what kind of world we will inhabit. It's about whether we live on a planet with one Internet, one global community, and a common body of knowledge that benefits and unites us all, or a fragmented planet in which access to information and opportunity is dependent on where you live and the whims of censors.

Information freedom supports the peace and security that provides a foundation for global progress. Historically, asymmetrical access to information is one of the leading causes of interstate conflict. When we face serious disputes or dangerous incidents, it's critical that people on both sides of the problem have access to the same set of facts and opinions.

As it stands, Americans can consider information presented by foreign governments. We do not block your attempts to communicate with the people in the United States. But citizens in societies that practice censorship lack exposure to outside views. In North Korea, for example, the government has tried to completely isolate its citizens from outside opinions. This lopsided access to information increases both the likelihood of conflict and the probability that small disagreements could escalate. So I hope that responsible governments with an interest in global stability will work with us to address such imbalances.

For companies, this issue is about more than claiming the moral high ground. It really comes down to the trust between firms and their customers. Consumers everywhere want to have confidence that the Internet companies they rely on will provide comprehensive search results and act as responsible stewards of their own personal information. Firms that earn that confidence of those countries and basically provide that kind of service will prosper in the global marketplace. I really believe that those who lose that confidence of their customers will eventually lose customers. No matter where you live, people want to believe that what they put into the Internet is not going to be used against them.

And censorship should not be in any way accepted by any company from anywhere. And in America, American companies need to make a principled stand. This needs to be part of our national brand. I'm confident that consumers worldwide will reward companies that follow those principles.

Now, we are reinvigorating the Global Internet Freedom Task Force as a forum for addressing threats to Internet freedom around the world, and we are urging U.S. media companies to take a proactive role in challenging foreign governments' demands for censorship and surveillance. The private sector has a shared responsibility to help safeguard free expression. And when their business dealings threaten to undermine this

freedom, they need to consider what's right, not simply what's a quick profit.

We're also encouraged by the work that's being done through the Global Network Initiative, a voluntary effort by technology companies who are working with nongovernmental organizations, academic experts, and social investment funds to respond to government requests for censorship. The initiative goes beyond mere statements of principles and establishes mechanisms to promote real accountability and transparency. As part of our commitment to support responsible private sector engagement on information freedom, the State Department will be convening a high-level meeting next month co-chaired by Under Secretaries Robert Hormats and Maria Otero to bring together firms that provide network services for talks about internet freedom, because we want to have a partnership in addressing this 21st century challenge.

Now, pursuing the freedoms I've talked about today is, I believe, the right thing to do. But I also believe it's the smart thing to do. By advancing this agenda, we align our principles, our economic goals, and our strategic priorities. We need to work toward a world in which access to networks and information brings people closer together and expands the definition of the global community. Given the magnitude of the challenges we're facing, we need people around the world to pool their knowledge and creativity to help rebuild the global economy, to protect our environment, to defeat violent extremism, and build a future in which every human being can live up to and realize his or her God-given potential.

So let me close by asking you to remember the little girl who was pulled from the rubble on Monday in Port-au-Prince. She's alive, she was reunited with her family, she will have the chance to grow up because these networks took a voice that was buried and spread it to the world. No nation, no group, no individual should stay buried in the rubble of oppression. We cannot stand by while people are separated from the human family by walls of censorship. And we cannot be silent about these issues simply because we cannot hear the cries.

So let us recommit ourselves to this cause. Let us make these technologies a force for real progress the world over. And let us go forward together to champion these freedoms for our time, for our young people who deserve every opportunity we can give them.

Thank you all very much.

(Sumber: <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm/>)

LAMPIRAN 2**Teks Pidato *Nowruz* Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Tahun 2010
untuk Masyarakat Iran**

The White House
Office of the Press Secretary
March 20, 2010
Remarks of President Obama Marking Nowruz

Today, I want to extend my best wishes to all who are celebrating Nowruz in the United States and around the world. On this New Year's celebration, friends and family have a unique opportunity to reflect on the year gone by; to celebrate their time together; and to share in their hopes for the future.

One year ago, I chose this occasion to speak directly to the people and leaders of the Islamic Republic of Iran, and to offer a new chapter of engagement on the basis of mutual interests and mutual respect. I did so with no illusions. For three decades, the United States and Iran have been alienated from one another. Iran's leaders have sought their own legitimacy through hostility to America. And we continue to have serious differences on many issues.

I said, last year, that the choice for a better future was in the hands of Iran's leaders. That remains true today. Together with the international community, the United States acknowledges your right to peaceful nuclear energy – we insist only that you adhere to the same responsibilities that apply to other nations. We are familiar with your grievances from the past – we have our own grievances as well, but we are prepared to move forward. We know what you're against; now tell us what you're for.

For reasons known only to them, the leaders of Iran have shown themselves unable to answer that question. You have refused good faith proposals from the international community. They have turned their backs on a pathway that would bring more opportunity to all Iranians, and allow a great civilization to take its rightful place in the community of nations. Faced with an extended hand, Iran's leaders have shown only a clenched fist.

Last June, the world watched with admiration, as Iranians sought to exercise their universal right to be heard. But tragically, the aspirations of the Iranian people were also met with a clenched fist, as people marching silently were beaten with batons; political prisoners were rounded up and abused; absurd and false accusations were leveled against the United States and the West; and people everywhere were horrified by the video of a young woman killed in the street.

The United States does not meddle in Iran's internal affairs. Our commitment – our responsibility – is to stand up for those rights that should be universal to all human beings. That includes the right to speak freely, to assemble without fear; the right to the equal administration of justice, and to express your views without facing retribution against you or your families.

I want the Iranian people to know what my country stands for. The United States believes in the dignity of every human being, and an international order that bends the arc of history in the direction of justice – a future where Iranians can exercise their rights, to participate fully in the global economy, and enrich the world through educational and cultural exchanges beyond Iran's borders. That is the future that we seek. That is what America is for.

That is why, even as we continue to have differences with the Iranian government, we will sustain our commitment to a more hopeful future for the Iranian people. For instance, by increasing opportunities for educational exchanges so that Iranian students can come to our colleges and universities and to our efforts to ensure that Iranians can have access to the software and Internet technology that will enable them to communicate with each other, and with the world without fear of censorship.

Finally, let me be clear: we are working with the international community to hold the Iranian government accountable because they refuse to live up to their international obligations. But our offer of comprehensive diplomatic contacts and dialogue stands. Indeed, over the course of the last year, it is the Iranian government that has chosen to isolate itself, and to choose a self-defeating focus on the past over a commitment to build a better future.

Last year, I quoted the words of the poet Saadi, who said: "The children of Adam are limbs to each other, having been created of one essence." I still believe that – I believe it with every fiber of my being. And even as we have differences, the Iranian government continues to have the choice to pursue a better future, and to meet its international responsibilities, while respecting the dignity and fundamental human rights of its own people.

Thank you. And Aid-e-Shoma Mobarak.

(Sumber: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-marking-nowruz/>)